



## **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 7 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005-2025**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**dan**

**BUPATI MUSI RAWAS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005-2025.**

#### **Pasal 1**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

#### **Pasal 2**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Musi Rawas dengan memperhatikan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.

#### **Pasal 3**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Musi Rawas.

#### **Pasal 4**

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut:

Bab I   Pendahuluan;

Bab II   Kondisi Umum dan Tantangan;

Bab III   Visi, Misi, dan Arah Pembangunan ;

Bab IV   Periodisasi RPJP; dan

Bab V   Penutup.

### **Pasal 5**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 26 Oktober 2010

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 26 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**dto**

**SULAIMAN KOHAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Bagian Hukum,

**NAWAWI, S.H.,M.H.**

Pembina

NIP. 19591027 198003 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENGERTIAN**

RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. Tahapan RPJP seharusnya menjadi dasar bagi siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi yang akan dibawa dalam kampanye periodeisasi politik. Dengan demikian melalui dokumen RPJP pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan akan menunjukkan arah pembangunan yang jelas, sistematis dan terarah. Muatan RPJP akan diterjemahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lain, baik Perencanaan Jangka Menengah (RPJM, 5 tahunan) maupun Perencanaan Jangka Pendek (RKPD, 1 tahun). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas, yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Musi Rawas.

#### **B. PROSES PENYUSUNAN**

Tahapan proses penyusunan RPJP Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan draft RPJP, untuk mendapat gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap rancangan RPJP.
3. Penyusunan rancangan akhir RPJP, yang dalam hal ini termasuk seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama dalam penyempurnaan rancangan RPJP.
4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP, di bawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJP beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah tentang RPJP.

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **1. Maksud**

RPJP Kabupaten Musi Rawas 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2025, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen di Kabupaten Musi Rawas (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi,

misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Proses penyusunan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat berjalan sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap tindak menuju cita-cita Kabupaten Musi Rawas.

## **2. Tujuan**

### **a. Umum:**

Menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Musi Rawas yang sinergis, koordinatif dan *sustainable* dalam pelaksanaannya serta terarah untuk menuju Masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang diidamkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

### **b. Khusus:**

- 1) Menganalisa kondisi umum Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;
- 2) Memprediksi kondisi Kabupaten Musi Rawas sampai dengan tahun 2025;
- 3) Merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Musi Rawas sampai tahun 2025;
- 4) Mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan untuk perencanaan pembangunan sampai tahun 2025.

## **D. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.

## **E. HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN**

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Rawas mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kabupaten dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Musi Rawas dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi;

2. Dokumen Perencanaan lainnya yang berhubungan dengan RPJP Kabupaten Musi Rawas adalah Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Musi Rawas, Rencana Strategis Kabupaten Musi Rawas.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pengertian RPJP, proses penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan RPJP dengan dokumen perencanaan lain dan sistematika penulisan.

### **BAB II. KONDISI UMUM, TANTANGAN DAN MODAL DASAR**

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah saat ini dan penjelasan tentang potensi tantangan dan modal dasar yang akan dihadapi 20 tahun ke depan.

### **BAB III. VISI, MISI dan ARAH PEMBANGUNAN**

Bab ini menjelaskan rumusan Visi dan Misi Daerah, 2005 – 2025, yakni sebuah pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai berikut dengan pemaparan tentang arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari Visi dan Misi dimaksud.

### **BAB IV. PERIODESASI PEMBANGUNAN**

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan pembangunan yang harus dilaksanakan dalam periode 4 RPJM yang akan dilaksanakan periode 20 tahun kedepan.

### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan komitmen antar seluruh stakeholders pembangunan daerah tentang arti penting dan kedudukan RPJP Kabupaten Musi Rawas, 2005–2025, sebagai acuan penyusunan RPJM Lima Tahunan paska Pilkada Langsung.

## KONDISI UMUM, TANTANGAN DAN MODAL DASAR

Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 1.236.582,66Ha. Secara administratif Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 21 kecamatan, 19 kelurahan, 242 desa. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 

Sebagai wilayah perencanaan Kabupaten Musi Rawas mempunyai karakteristik yang menarik, hal ini disebabkan antara lain: *pertama*, letaknya berada diujung barat provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan provinsi Bengkulu dan provinsi Jambi. Dengan letak tersebut maka Kabupaten Musi Rawas merupakan pintu gerbang perekonomian Sumatera Selatan bagian barat. *Kedua*, Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi besar untuk dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri maupun untuk menarik daerah lainnya di wilayah perbatasan. Potensi yang besar tersebut adalah dalam sektor pertanian dan sektor pertambangan dan galian. *Ketiga*, dalam konteks Nasional dan konteks Sumatera Selatan, daerah ini berfungsi sebagai kawasan penyangga Sumatera Selatan bagian hulu, karena di daerah ini terdapat

Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat, sehingga pengembangan daerah ini harus memperhatikan aspek fisik lingkungan.

Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan bagian barat, maka Kabupaten Musi Rawas dituntut untuk mampu memikul beban tanggung jawab tersebut dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki seoptimal mungkin serta memperhatikan kendala-kendala yang ada. Hal ini dimaksudkan agar kendala-kendala tersebut tidak hanya merupakan penghalang dalam pembangunan, tetapi dapat juga menjadi potensi yang dapat dikelola dalam rangka pembangunan Musi Rawas selama periode dua puluh tahunan, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks perekonomian Sumatera Selatan, baik nilai absolut, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita maupun pertumbuhan pendapatan perkapita, Kabupaten Musi Rawas masih berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Selatan. Demikian juga indeks pembangunan manusia di Musi Rawas berada pada urutan terakhir. Hal ini berarti tingkat kesejahteraan rakyat Musi Rawas relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Selatan. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk dapat mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain di Sumatera Selatan.

Ketertinggalan Kabupaten Musi Rawas dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Selatan disebabkan struktur perekonomian daerah ini sangat tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan (sektor primer). Oleh karenanya perlu dilakukan usaha-usaha mempercepat transformasi struktur perekonomian, sehingga pengembangan sektor sekunder dan tersier merupakan salah satu alternatif yang perlu dilakukan dalam pengembangan Musi Rawas selama 20 tahun ke depan.

Potensi sektor pertanian yang mencakupi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan galian serta posisi geografis yang berada diantara wilayah-wilayah yang berkembang (PKN Palembang, Bengkulu, Jambi, Padang, Lampung) dan pada jalur regional lintas sumatera merupakan suatu keunggulan lokasi yang apabila dalam pengelolaannya dapat dikombinasikan dengan baik akan menjadi input yang andal dalam pengembangan wilayah ini.

Keunikan lainnya dari Kabupaten Musi Rawas adalah topografi wilayahnya yang bervariasi mulai dari pegunungan dan perbukitan di bagian barat, landai dan bergelombang di bagian tengah, utara dan timur serta begitu banyak DAS yang berhulu dari kawasan TNKS. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan kendala yang harus diperhitungkan dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Mengingat kondisi fisik ini, maka rencana pembangunan di Kabupaten Musi Rawas perlu disusun sebaik-baiknya agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik itu kendala fisik maupun sumberdaya manusia, sehingga daerah ini dapat memacu pertumbuhan pembangunannya tanpa menurunkan kualitas fisik alamnya.

## **A. KONDISI FISIK LINGKUNGAN**

### **1. Topografi**

Kabupaten Musi Rawas berada pada ketinggian 25 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kemiringan lereng atau topografi suatu kawasan akan mempengaruhi terhadap peruntukan lahan seperti sistem perencanaan jaringan jalan, sistem pengaliran jaringan drainase dan utilitas lainnya, peletakan bangunan-bangunan, dan aspek visual. Kemiringan wilayah Kabupaten Musi Rawas bervariasi, yaitu antara 0->40%, dimana yang terluas adalah pada wilayah dengan kemiringan 2-15%, yaitu sebesar 484.197Ha (39,16%) yang umumnya terdapat di bagian selatan Kabupaten Musi Rawas, kemudian wilayah dengan kemiringan 0-2%, terdapat di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Musi Rawas.

**Tabel Kemiringan Tanah**

| No.    | Kemiringan (%) | Luas (Ha)   | Persentase (%) | Kriteria     |
|--------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 1.     | 0-2            | 462.938,6   | 37,44          | Sangat datar |
| 2.     | 2-15           | 484.197     | 39,16          | Datar        |
| 3.     | 15-40          | 144.998     | 11,73          | Curam        |
| 4.     | >40            | 144.449     | 11,68          | Sangat Curam |
| Jumlah |                | 1.236.582,6 | 100            |              |

Dengan kondisi topografi wilayah yang bergelombang, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu: *pertama*, wilayah dengan kemiringan 0 -2% dan 2-15% merupakan wilayah dominan, namun belum dikembangkan secara optimal pemanfaatannya, khususnya penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan lahan. *Kedua*, luasan wilayah untuk daerah berkemiringan curam (15 - 40%) dan sangat curam (>40%) di Kabupaten Musi Rawas adalah 289.447Ha (23,41%). Kondisi topografis ini secara umum tentunya membatasi pengembangan karena merupakan kawasan limitasi (kawasan lindung) sehingga benar-benar tidak boleh dijadikan kawasan budidaya apapun; *Ketiga*, kondisi kemiringan curam dan sangat curam memiliki potensi untuk terjadinya bencana erosi dan tanah longsor; *keempat*, wilayah dengan status kawasan hutan produksi dan kawasan hutan yang dapat dikonversi belum ditetapkan alih fungsinya.

Selama periode 2005-2025, diharapkan Kabupaten Musi Rawas dapat mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga tercapai kondisi sebagai berikut: (1) Produktifitas pemanfaatan lahan pada kawasan dengan kemiringan 0-2% dan 2-15% yang merupakan wilayah dominan dapat dioptimalkan; (2) Dengan teknologi kondisi topografi wilayah yang bergelombang dapat dikembangkan dengan konsep yang ramah lingkungan (konsep pembangunan yang berkelanjutan); (3) Kawasan dengan kondisi kemiringan yang curam dan sangat curam tetap diperuntukan untuk kawasan konservasi sehingga akibat dari bencana alam dapat diminimalisasi; (4) Selain itu kawasan ini juga berpotensi untuk pengembangan kawasan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan; dan (5) Wilayah dengan status kawasan hutan produksi dan kawasan hutan yang dapat dikonversi dapat ditetapkan statusnya sesuai dengan fungsi dan peruntukannya saat ini.

## 2. Iklim dan Hidrologi

Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis basah, dengan kelembaban udara 87,0% dan rata-rata penyinaran matahari sebesar 61,9%. Temperatur maksimum 32,9°C dan temperatur minimum 19,6°C. Sebagai daerah tropis basah, rata-rata curah hujan di Kabupaten Musi Rawas cukup tinggi, yaitu 2.285 per tahun dan rata-rata hari hujan 116 hari hujan per tahun. Dengan bulan kering hanya empat bulan (Juni, Juli, Agustus dan September), maka wilayah ini termasuk dalam tipe curah hujan B (sangat basah).

Kondisi hidrologi atau tata air yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas pada umumnya terdiri dari sungai-sungai besar yang sebagian besar berasal dari Bukit Barisan, antara lain Sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Kelingi, Sungai Megang, Sungai Lakitan, Sungai Semangus dan Sungai Gegas. Wilayah rawa dan danau di Kabupaten Musi Rawas merupakan areal potensial pengembangan perikanan dan pertanian lahan basah.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Rawas dalam proses pembangunan, terkait dengan kondisi iklim dan hidrologinya, yaitu:

- a. Ancaman bencana banjir, akibat keberadaan sungai-sungai *perennial* (sungai dengan aliran sepanjang tahun yang memiliki simpangan debit maksimal di musim hujan dengan debit minimal di musim kemarau sangat besar) selain bisa dimanfaatkan sepanjang tahun untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air bersih juga merupakan ancaman karena simpangan debitnya yang sangat besar. Di musim hujan debit aliran sungai-sungai tersebut sangat besar mengakibatkan elevasi permukaan air sungai sangat tinggi bahkan melampaui elevasi tanggulnya sehingga meluap dan menimbulkan banjir terutama di daerah hilir. Selain curah hujan yang merupakan faktor *uncontrollable* terjadinya banjir, kegiatan masyarakat yang mengganggu aliran sungai dalam bentuk penyempitan sungai, perusakan tanggul, pendangkalan, pembuangan sampah ke sungai, polusi yang memacu pemanasan global dan timbulnya lahan oloran yang menambah panjang aliran sungai adalah faktor manusiawi yang mempengaruhi intensitas banjir;
- b. Berkurangnya pasokan air di musim kemarau, hal ini akibat terdegradasinya kawasan resapan. Kerusakan daerah resapan ini berperan penting terhadap gangguan kelestarian ratusan sumber mata air di Kabupaten Musi Rawas karena fungsi pokoknya yang menahan/menyimpan air hujan sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. Tingginya curah hujan tidak dapat dihindarkan tetapi luas lahan dan kemampuan meresapkan air sangat dipengaruhi aktivitas manusia. Perubahan peruntukan lahan seperti hutan untuk pertanian atau permukiman akan menyebabkan laju aliran permukaan menjadi besar dan volume air terserap semakin kecil. Hal ini terlihat dari kejadian banjir di musim hujan dan turunnya persediaan air di musim kemarau;
- c. Berkurangnya potensi sumber air, hal ini selain disebabkan oleh berkurangnya volume air terserap, juga oleh penggunaan yang berlebihan dan kurangnya pemeliharaan sumber air;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan potensi hidrologi yang besar untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, pembuatan industri air dalam kemasan, untuk transportasi, dan lain-lain;
- e. Kondisi DAS dan kawasan sekitar situ/danau/waduk semakin kritis, karena beberapa titik di kawasan tersebut terjadi penebangan pepohonan oleh warga untuk membuka kebun kopi, palawija, atau sayur-mayur bahkan untuk permukiman;
- f. Terlalu banyaknya sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil sehingga menyulitkan dalam membangun infrastruktur karena membutuhkan alokasi dana yang besar;
- g. Kualitas air sungai dan air situ di semua lokasi menunjukkan semua parameter masih di bawah mutu kecuali bakteri coli tinja yang sudah di atas baku mutu berkisar antara 14.000 sel bakteri/100ml - 190.000 sel bakteri/100ml (BML = 2.000 sel bakteri/100ml) hal ini terjadi akibat dari adanya buangan limbah domestik (rumah tangga) yang tidak menggunakan sarana pengolahan limbah yang dipersyaratkan.

Tantangan selama periode 2005-2025 Kabupaten Musi Rawas dapat mengatasi berbagai problema tersebut, sehingga dicapai kondisi sebagai berikut:

- a. Dengan penerapan teknologi semua masalah yang menyakut dengan pembangunan infrastruktur perairan dapat diatasi;

- b. Dengan lestarnya kawasan resapan air diharapkan berkurangnya bencana banjir dimusim hujan dan tetap terjaganya pasokan air sesuai kebutuhan dimusim kemarau;
- c. Termanfaatkannya potensi hidrologi secara optimal dalam berbagai sektor, antara lain: untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, pembuatan industri air dalam kemasan, untuk transportasi, dan lain-lain;
- d. Penetapan kawasan konservasi dan resapan air sebagai kawasan non-budidaya;
- e. Sumberdaya air seperti sungai-sungai besar akan dapat dimanfaatkan kembali untuk jalur transportasi sungai;
- f. Dengan berkurangnya tingkat pencemaran air, diharapkan akan kualitas air akan kembali baik;
- g. Dengan dilakukannya revitalisasi kawasan sekitar situ/danau/waduk dan terkendalinya tingkat pencemaran air, maka diharapkan kualitas dan kuantitas air memenuhi syarat baku mutu.

### **3. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif**

Jenis tanah dapat dibedakan ke dalam tujuh jenis. Tanah podsolik merupakan jenis tanah terluas (37,72%), menyebar di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Muara Lakitan dan Jayaloka. Struktur geologi sebagian besar didominasi oleh formasi Palembang dan sebagian lagi oleh formasi Rawas. Sedangkan pH tanah di Kabupaten Musi Rawas berada dikisaran antara 4,5 – 6,0.

Kedalaman efektif tanah dapat dibedakan ke dalam empat kelompok, yaitu lebih dari 90cm, 90cm, 60cm, dan 30cm. Untuk tekstur tanah (komposisi fraksi pasir, debu, dan liat) juga terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu sangat halus, halus, sedang, dan kasar. Secara umum kemampuan tanah di Kabupaten Musi Rawas didominasi oleh jenis tanah dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90cm, dengan tekstur tanah halus dan tidak ada erosi dengan luas lahan sebesar 1.061.621,66Ha atau 85,85% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Musi Rawas. Sementara lahan yang memiliki kemungkinan erosi sebesar 44.418Ha atau sebesar 3,59%. Berdasarkan kondisi yang ada dapat disimpulkan bahwa kemampuan lahan di Kabupaten Musi Rawas berada dalam keadaan yang baik untuk mendukung kegiatan pengembangan.

## **B. WILAYAH DAN TATA RUANG**

### **1. Struktur Ruang dan Sistem Kota-Kota**

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kecamatan Muara Beliti sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Ini artinya Kota Lubuklinggau mempunyai kapasitas untuk melayani wilayah Musi Rawas, Empat Lawang dan wilayah lain di sekitarnya. Beracu pada kebijakan dan strategi di atas, Muara Beliti diarahkan menjadi PKL untuk wilayah Musi Rawas, selain sebagai pusat pemerintahan. Adapun pusat pertumbuhan lainnya diarahkan sebagai pusat pelayanan bagi wilayah belakangnya dengan hirarki sesuai dengan hasil analisis dan hasil kesepakatan pada beberapa kali pertemuan teknis. Hal penting lain yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan sistem perkotaan Muara Beliti adalah kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJM, yaitu pembangunan akan dilakukan dengan pendekatan agropolitan.

Secara alamiah struktur ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, dimana pusat permukiman tumbuh disepanjang jalan lintas Sumatera (Utara-Selatan) dan jalan dari Lubuk Linggau menuju Kota Palembang (Barat-Timur). Terdapat dua kawasan yang membatasi pertumbuhan permukiman, yaitu di bagian barat dibatasi oleh TNKS dan bagian Tenggara dibatasi oleh kawasan hutan (BTS Ulu dan Muara Lakitan bagian Selatan). Pusat permukiman di bagian utara yang berada pada lintasan trans Sumatera (Simpang Nibung) dan yang berada pada jalur Lubuk Linggau-Palembang (Muara Lakitan) diarahkan untuk tidak saja melayani kegiatan permukiman di wilayah Musi Rawas tetapi juga kawasan permukiman di Sarolangun dan Banyuasin.

Dalam kebijakan pembangunannya, Kabupaten Musi Rawas menggunakan konsep pengembangan agropolitan. Dimana struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang Musi Rawas direncanakan seperti berikut :

- a. PKL; Pusat Kegiatan Lokal adalah Muara Beliti. Peran utama yang akan diemban Muara Beliti adalah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan agropolitan. Dengan sendirinya Muara Beliti juga akan menjadi simpul pergerakan, pusat jasa dan pelayanan pada skala kabupaten. Namun secara khusus juga akan melayani Kecamatan Muara Kepungut.
- b. PP 1; pusat pelayanan akan dibedakan secara hirarkis menjadi pusat pelayanan kawasan yang akan melayani beberapa kecamatan dan pusat pelayanan lokal yang melayani satu wilayah kecamatan yang juga dikenal dengan ibukota kecamatan. Adapun yang akan diarahkan menjadi pusat pelayanan kawasan adalah:
  - 1) *Simpang Nibung*, adalah pusat permukiman yang berada di bagian utara Musi Rawas dan berada pada jalur trans Sumatera yang diarahkan menjadi pusat pelayanan kawasan untuk wilayah utara Musi Rawas dengan radius pelayan meliputi: Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rupi
  - 2) t dan sebagian Kecamatan Karangjaya. Selain kecamatan-kecamatan di atas, Simbang Nibung juga diarahkan untuk mampu melayani kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi).
  - 3) *Simpang Terawas*, adalah pusat permukiman yang berada antara Simbang Nibung dengan Lubuk Linggau dan juga berada pada lintas trans Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani: Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Ulu Terawas, Kecamatan Selangit, dan Kecamatan Sumber Harta.
  - 4) *Megang Sakti*, diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu: Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Tugumulyo.
  - 5) *Simpang Semambang*, adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau-Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk

melayani: Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan BTS Ulu, dan Kecamatan Muara Lakitan bagian Selatan.

- 6) *Muara Lakitan*; diarahkan sebagai pusat pelayanan bagi pusat permukiman dalam wilayah kecamatannya sendiri di bagian utara, Kecamatan Muara Kelingi dan kecamatan di bagian barat Kabupaten Banyuasin.

## 2. Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan didominasi pertanian sawah dan ladang, perkebunan, dan hutan. Secara kuantitatif penggunaan lahan sebagian besar digunakan untuk perkebunan karet, yaitu seluas 426.440,535Ha (34,48%) dan berupa hutan seluas 386.674,402Ha (31,26%). Sementara untuk kegiatan permukiman penggunaan lahannya hanya sebesar 0,89% dari luas total wilayah. Artinya, daerah ini masih mempunyai peluang untuk pengembangan. Selanjutnya dengan luasnya kawasan hutan yang merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) memungkinkan daerah ini untuk meningkatkan pemafaatan hutan non kayu seperti untuk kegiatan *Ecotourism* (Ekowisata) penelitian, pendidikan dan pemafaatan keunikan, keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya.

Akan tetapi jika dilihat dari kondisi tata guna lahan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Rawas dalam proses pembangunan, yaitu:

- a. Tata ruang di Kabupaten Musi Rawas saat ini belum tertata dengan baik, dimana pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam;
- b. Alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan pemukiman dan industri. Lahan hutan dan atau rawa menjadi areal penggunaan lain sehingga dapat menghilangkan berbagai keanekaragaman hayati dan menyebabkan bencana alam;
- c. Sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor akibat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang;
- d. Rendahnya kualitas rencana tata ruang dan belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor;
- e. Belum maksimalnya perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam padahal di Kabupaten Musi Rawas terdapat potensi terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan kebakaran hutan.

Untuk periode 2005-2025, diharapkan Kabupaten Musi Rawas dapat mencapai kondisi sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya Tata Guna Lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang baik wilayah, kawasan, maupun rencana teknis;
- b. Tersedianya kajian yang detil dan komprehensif mengenai kesesuaian lahan serta adanya aturan yang jelas mengenai perubahan alih fungsi lahan;
- c. Seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

- d. Dikembangkannya sistem mitigasi bencana alam di setiap kawasan untuk meminimalisasi korban bencana alam.

### **3. Wilayah Strategis**

#### **a. Muara Beliti sebagai Ibukota Kabupaten Musi Rawas**

Muara Beliti terletak sekitar 25km ke arah timur dari Lubuklinggau. Terletak pada persimpangan tiga menuju Kota Lahat, Palembang, dan Lubuklinggau. Keberadaan Muara Beliti pada persimpangan tiga menuju kota-kota utama dan berada di jalur utama trans Sumatera menjadikan kawasan ini cukup strategis bagi pertumbuhan kawasan dalam waktu yang lebih cepat. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- 1) Posisi Kecamatan Muarabeliti tidak sentral, sehingga menyulitkan dalam hal tingkat pelayanan terutama bagi kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di utara Kabupaten Musi Rawas;
- 2) Peran sebagai pusat pemerintahan belum optimal mengingat sebagian aktifitas pemerintahan masih dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau dan peran sebagai ibukota kabupaten akan menjadi kurang optimal;
- 3) Kecenderungan pertumbuhan linier di sepanjang jalur utama trans Sumatera dapat menyebabkan bentukan kota menjadi linier sehingga akan sangat menghambat lalu lintas trans Sumatera;
- 4) Kondisi rupa bumi pada sebagian wilayahnya merupakan lahan berkontur sehingga dapat menyulitkan upaya pengembangan bagian kota;
- 5) Belum adanya prasarana dan sarana yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah-daerah produksi (lima distrik agropolitan) dengan daerah perdagangan (pusat agropolitan) dan terminal peti kemas.

Untuk periode 2005-2025, diharapkan Kecamatan Muara Beliti sebagai ibukota Kabupaten dapat mencapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal posisi, Kecamatan Muarabeliti dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk kecamatan-kecamatan lainnya, terutama yang berada di utara Kabupaten Musi Rawas;
- 2) Lokasinya yang berdekatan dengan Kota Lubuklinggau dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kota, dimana hubungan yang ada lebih bersifat *mutualistic* yang saling menguntungkan;
- 3) Adanya perencanaan kawasan dengan strategi perkembangan terpusat;
- 4) Kondisi lahan berkontur tidak menjadi hambatan dalam perkembangan kota. Akan tetapi, Muara Beliti dapat diuntungkan dengan teknis arsitektur dan *landscapenya*;
- 5) Terbangunnya sarana dan prasarana pusat perkantoran, tertatanya wilayah permukiman penduduk, dan terbangunnya akses pusat pemerintahan – pusat agropolitan – kota induk di lima distrik.

#### **b. Kawasan Agropolitan Center Muara Beliti**

Berdasarkan letak geografis, sumberdaya manusia dan alam, serta infrastruktur yang ada, maka Kecamatan Muara Beliti dapat dijadikan *Agropolitan Center*. Akan tetapi kondisi ideal kawasan ini belum terpenuhi semua dan masih terdapat permasalahan dalam pengembangannya, antara lain:

- 1) Belum terhubungkannya berbagai kawasan rencana Pengembangan Agropolitan akibat rencana tata ruang kawasan agropolitan yang telah disusun belum terealisasi;
- 2) Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan dan produk unggulan daerah;
- 3) Sebagian besar wilayah pertanian belum mempunyai fasilitas kota yang dapat melayani kebutuhan sosial – ekonomi petani dan masyarakat di perdesaan;
- 4) Perkembangan kelembagaan di perdesaan masih menghadapi banyak hambatan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, hambatan informasi dan komunikasi;
- 5) Masih tersekat – sekatnya pembinaan agribisnis, dan pelaku sentral agribisnis (petani) mempunyai posisi tawar yang rendah;
- 6) Belum tergalinya potensi dan peluang investasi di seluruh sektor karena kurangnya infrastruktur, sehingga para pengusaha lebih berminat menanam modalnya ke daerah-daerah yang telah maju;
- 7) Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
- 8) Belum tumbuhnya jiwa *entrepreneurship* masyarakat perdesaan yang berbasis agraris.

Akan tetapi masalah tersebut bukan merupakan harga mati untuk tidak ditetapkannya Muara Beliti sebagai *Agropolitan Center*. Estimasi dan proyeksi peluang pengembangannya pada masa mendatang juga menjadi pertimbangan tambahan, yaitu:

- 1) Berkembangnya Agropolitan sesuai dengan Rencana tata ruang kawasan;
- 2) Prasarana sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan dan produk unggulan daerah telah tersedia;
- 3) Investasi berkembang diseluruh sektor-sektor potensial. Dan para pengusaha mulai berminat menanamkan modalnya ke daerah-daerah tertinggal karena kondisi infrastruktur yang semakin baik;
- 4) Akses para petani terhadap permodalan, input produksi, teknologi tepat guna, jaringan pemasaran dan peluang-peluang investasi tinggi;
- 5) Iklim *entrepreneurship* diperdesaan dikuasai oleh masyarakat desa itu sendiri;
- 6) Seluruh jaringan infrastruktur fisik dan ekonomi terhubungkan dengan baik antar kawasan dan berkembangnya produk-produk unggulan sehingga tumbuh iklim berusaha yang sangat baik di perdesaan.

### c. Kawasan TNKS

Ada beberapa masalah terkait dengan pengembangan kawasan TNKS sebagai wilayah strategis di Kabupaten Musi Rawas, yaitu:

- 1) Batas wilayah TNKS dan kawasan buffer zone TNKS belum disepakati dan dipahami secara baik dan jelas, sehingga masih terjadi konflik pemanfaatan;

- 2) Fungsi kawasan TNKS belum dipandang sebagai kawasan yang harus dijaga;
- 3) Aktivitas perambahan hutan oleh masyarakat TNKS masih berlangsung sehingga terjadi degradasi kawasan hutan;
- 4) Lemahnya penegakan hukum dan implementasi Peraturan Pemerintah Daerah tentang izin pemanfaatan TNKS, serta kondisi masyarakat sekitar yang berekonomi rendah;
- 5) Tidak dilibatkannya masyarakat sekitar TNKS dalam penjagaan hutan, dicabutnya hak kelola dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan;
- 6) Keberadaan lahan yang sesuai untuk kawasan TNKS sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat dan digunakan untuk kegiatan budidaya dan pemukiman;
- 7) Sistem pengelolaan hutan TNKS secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan.

Akan tetapi, proyeksi di masa mendatang Kabupaten Musi Rawas dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tercapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Berkembangnya pemanfaatan wilayah TNKS dan bufferzone TNKS secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, karena telah disepakati dan dipahami secara baik dan jelas fungsi-fungsi pelestarian TNKS;
- 2) Perambahan hutan oleh masyarakat di kawasan TNKS dapat dicegah;
- 3) Tegasnya penegakan hukum terhadap penebangan liar dan penyelundupan kayu;
- 4) Mulai terlibatnya masyarakat sekitar hutan dalam penjagaan hutan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan TNKS, sehingga masyarakat dapat menjadi salah satu komponen dalam pemeliharaan kelestarian hutan TNKS;
- 5) Adanya peraturan mengenai fungsi kawasan TNKS, sehingga tumbuhnya kegiatan budidaya dan pemukiman di kawasan TNKS dapat dicegah;
- 6) Sistem pengelolaan hutan TNKS secara berkelanjutan sudah optimal dilaksanakan dan sudah berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan.

#### **4. Kawasan Andalan, Cepat Tumbuh dan Produk Unggulan**

##### **a. Pengembangan Agropolitan District**

Pembangunan kawasan agropolitan di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Agropolitan Center Muara Beliti dan lima Agropolitan District, yaitu Kecamatan Nibung, BKL Ulu Terawas, Megang Sakti, Muara Kelingi, dan Muara Lakitan. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain:

- 1) Sebagian besar kawasan yang ditetapkan sebagai agropolitan distrik masih sangat terbatas infrastruktur;
- 2) Sebagian besar wilayah pertanian belum mempunyai fasilitas kota yang dapat melayani kebutuhan sosial – ekonomi petani dan masyarakat di perdesaan;

- 3) Belum optimalnya sosialisasi program/ kegiatan Agropolitan, sehingga minat masyarakat untuk menunjang program Agropolitan masih kurang. Selain itu jiwa *enterprenership* masyarakat perdesaan yang berbasis agraris belum tumbuh;
- 4) Peluang pengembangan investasi di kawasan ini belum dieksplorasi secara baik. Hal ini disebabkan para investor kurang tertarik membuka usaha di kawasan agropolitan karena infrastruktur yang masih terbatas dan tingkat keamanan yang belum mendukung;
- 5) Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
- 6) Perkembangan kelembagaan di perdesaan masih menghadapi banyak hambatan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, hambatan informasi dan komunikasi;
- 7) Masih tersekat-sekatnya pembinaan agribisnis, dan pelaku sentral agribisnis (petani) mempunyai posisi tawar yang rendah.

Melihat kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya pengembangan untuk mendukung wilayah ini sebagai agropolitan distrik, sehingga pada periode 2005-2025 diharapkan dapat dicapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Seluruh wilayah agropolitan distrik telah memiliki fasilitas perkotaan yang dapat melayani kebutuhan sosial-ekonomi petani dan masyarakat di pedesaan;
- 2) Telah optimalnya sosialisasi program/ kegiatan Agropolitan District sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kawasan Agropolitan District meningkat;
- 3) Penyediaan infrastruktur strategis, meliputi pelaksanaan studi kelayakan, pembebasan lahan, penyiapan design Agropolitan District, pembangunan rumah toko (ruko), terminal dan infrastruktur lainnya. Dengan kondisi seperti ini dapat meningkatkan peluang pengembangan investasi di kawasan ini;
- 4) Meningkatnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran;
- 5) Pengembangan kawasan agropolitan telah didukung oleh sistem kelembagaan yang optimal;
- 6) Meningkatnya kapasitas para pelaku agribisnis sehingga sehingga memiliki daya saing dengan daerah sekitarnya.

#### **b. Kecamatan Tugumulyo**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Musi Rawas, ada tiga kecamatan yang termasuk dalam kawasan andalan, yaitu: (1) Kecamatan Tugumulyo dengan sektor unggulan, meliputi: peternakan, perikanan, dan pertanian (padi); (2) Kecamatan Muara Beliti dengan sektor unggulan, meliputi: pertanian (padi), perkebunan, industri, peternakan, dan perikanan; dan (3) Kecamatan BKL Ulu Terawas dengan sektor unggulan, meliputi: pertanian, perkebunan, pertambangan (galian C), dan perikanan.

Penggunaan lahan di Kecamatan Tugumulyo sebagian besar adalah persawahan padi yang sangat luas. Selain itu ditunjang dengan sistem irigasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Tugumulyo merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai areal

pertanian dan perikanan karena kondisinya yang sangat mendukung untuk kegiatan tersebut. Potensi yang dimiliki Kecamatan Tugumulyo menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan andalan di Kabupaten Musi Rawas. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya, yaitu:

- 1) Kecenderungan alih fungsi lahan sawah irigasi teknis menjadi penggunaan lain khususnya di luar RTRW Kecamatan Tugumulyo;
- 2) Belum memadainya fasilitas perdagangan dan fasilitas pengolahan padi menjadi beras dan produk turunannya dan adanya ancaman hama dan penyakit pada lahan sawah beririgasi teknis;
- 3) Tingginya pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk tidak seimbang dengan luas wilayah dan daya dukung (*carrying capacity*);
- 4) Belum tersedianya sanitasi lingkungan, pengolahan sampah, pengolahan limbah, pengaturan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di kawasan ini dan belum memadainya suplai air bersih ke seluruh desa dalam wilayah ini;
- 5) Belum dikembangkan secara optimal produk-produk unggulan perdesaan akibat keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
- 6) Rendahnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku usaha;
- 7) Terbatasnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian;
- 8) Lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat;
- 9) Terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Melihat kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya pengembangan sehingga pada periode 2005-2025 diharapkan dapat dicapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Luasan lahan sawah dapat dipertahankan melalui penetapan sawah abadi agar alih fungsi lahan dapat diperlambat;
- 2) Tersedianya fasilitas pengolahan padi menjadi beras dan produk turunannya, sehingga dapat meningkatkan nilai jual;
- 3) Meminimalisir ancaman hama dan penyakit pada lahan sawah beririgasi teknis;
- 4) Pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan sesuai dengan carrying capacity sehingga antara kepadatan penduduk dengan wilayah seimbang;
- 5) Meningkatnya kesehatan lingkungan dan permukiman dengan fasilitas sanitasi lingkungan, air bersih, pengolahan sampah, pengolahan limbah, pengaturan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan secara baik;
- 6) Mudah akses masyarakat terhadap informasi pasar dan teknologi mempengaruhi berkembangnya produk-produk unggulan perdesaan,

kawasan-kawasan andalan serta kawasan strategis sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat sekitar;

- 7) Tumbuhnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku usaha di kawasan andalan dan strategis;
- 8) Meningkatnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian;
- 9) Tumbuhnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat;
- 10) Mudah akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi, yaitu dengan terbangunnya jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi;
- 11) Meningkatnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

#### **c. Kawasan Daerah Irigasi Lakitan dan Daerah Irigasi Lainnya**

Sehubungan dengan program peningkatan katahanan pangan dan Musi Rawas sebagai bagian lumbung pangan di Sumatera Selatan dan meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kebutuhan akan sarana irigasi skala besar mendesak. Ada beberapa kendala terkait dengan pengembangan kawasan irigasi, yaitu:

- 1) Daya tarik pertanian lahan basah khususnya padi mulai berkurang, mengingat tidak sebandingnya antara dana yang dibutuhkan untuk produksi dengan hasil yang didapat;
- 2) Luasan untuk lahan sawah irigasi Lakitan belum ditetapkan dengan aspek legalitasnya;
- 3) Meningkatnya potensi konflik air antara fungsi untuk irigasi sawah dengan peruntukan kolam ikan;
- 4) Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi;
- 5) Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
- 6) Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi;
- 7) Kerusakan prasarana sumberdaya air akibat bencana alam.

Melihat kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya pengembangan sehingga pada periode 2005-2025 diharapkan dapat dicapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Potensi konflik air antara fungsi untuk irigasi sawah dengan peruntukan kolam ikan dapat diminimalisir melalui penetapan fungsi jaringan;
- 2) Tingkat layanan jaringan irigasi semakin optimal;
- 3) Menguatnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi;
- 5) Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis berkelanjutan.

#### **d. Kawasan Jalan Poros Muara Beliti – Simpang Terawas**

Ada beberapa kendala dalam pengembangan kawasan jalan poros Muara Beliti-Simpang Terawas, yaitu:

- 1) Belum diatur dan ditetapkannya kawasan penggunaan khusus demplot-demplot untuk setiap sektor dan komoditi;
- 2) Belum didukung oleh sarana dan prasarana jalan yang memadai;
- 3) Sempadan jalan dan sempadan sungai serta saluran irigasi belum diterapkan sesuai dengan peraturan;

Melihat kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya pengembangan sehingga pada periode 2005-2025 diharapkan dapat dicapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Berkembangnya kawasan penggunaan khusus demplot-demplot untuk setiap sektor dan komoditi sesuai dengan kelayakan fungsi dan peruntukannya;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai;
- 3) Adanya penetapan mengenai jarak pemukiman dengan jalan (sempadan jalan) dalam Perda IMB sehingga tidak menyulitkan proses pelebaran jalan.

#### **e. Kawasan Peti Kemas**

Pembangunan terminal peti kemas bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dari dan ke Kabupaten Musi Rawas. Dalam pengembangannya, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- 1) Belum dibangunnya jalur rel kereta api menuju kawasan Peti Kemas Durian Remuk;
- 2) Belum dibangunnya sarana dan prasarana sebagai pelabuhan darat (*dry port*);
- 3) Belum disusunnya *standard* dan manual untuk pemanfaatan pelabuhan peti kemas sebagai *feeder* Tanjung Api-api;
- 4) Produk unggulan belum terangkat secara optimal padahal volume perdagangan kian meningkat. Hal ini diperparah dengan belum tersedianya komplek pergudangan produk– produk daerah dan belum adanya fasilitas penampungan produksi pertanian dan agroindustri;
- 5) Belum ada fasilitas jaringan telekomunikasi, air bersih, dan jaringan listrik menuju kawasan peti kemas.

Melihat kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya pengembangan sehingga pada periode 2005-2025 diharapkan dapat dicapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Beroperasinya Stasiun Kereta Api di Kawasan Peti Kemas Durian Remuk sebagai *feeder* Pelabuhan Samudra Tanjung Api-api;
- 2) Berkembangnya produk-produk jadi dan setengah jadi yang siap ekspor;
- 3) Beroperasinya komplek pergudangan sebagai pusat loading dan upload (bongkar-muat) barang;
- 4) Terbangunya pusat-pusat penampungan produk-produk pertanian dan agroindustri;
- 5) Dengan beroperasinya Pelabuhan Peti Kemas dapat mendorong aktifitas perdagangan, baik skala lokal, regional maupun ekspor;

- 6) Berfungsinya terminal peti kemas sebagai outlet bagi produk-produk daerah sekitar, tidak hanya untuk Kabupaten Musi Rawas, tetapi juga bagi wilayah yang lebih luas;
- 7) Terbangunnya fasilitas jaringan telekomunikasi, air bersih dan kelistrikan ke kawasan peti kemas.

## 5. Kawasan Terisolir

Pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, karena:

- a. Masih tingginya kesenjangan perkembangan antarkawasan, antarkota kecamatan dan antar kelompok;
- b. Sampai saat ini belum ada kota-kota di Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai karakteristik perkotaan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mampu berperan sebagai pusat pelayanan;
- c. Terdapat 6 kecamatan yang masih dikategorikan sebagai kawasan terisolir yaitu Ulu Rawas, Rawas Ilir, Selangit, Muara Lakitan, BTS Ulu, dan Karangjaya dan terdapat 117 desa tertinggal;
- b. Terbatasnya akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik dari wilayah di sekitarnya akibat terbatasnya akses transportasi dan komunikasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju;
- c. Sebagian besar kawasan terisolir tersebut miskin sumberdaya khususnya sumberdaya alam dan manusia dan belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan kawasan-kawasan terisolir;
- d. Pembangunan dan investasi baik oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan dan belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal;
- e. Pembangunan perkotaan dan perdesaan belum saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah yang sinergis, bahkan cenderung sendiri-sendiri dan saling merugikan. Peran kota sebagai 'motor penggerak' (*engine of development*) dan pendorong belum berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan pedesaan; Belum terwujudnya pembangunan kota-kota kecamatan yang hirarkis sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah belakangnya;
- f. Sebagian besar komoditi yang dihasilkan dari daerah tertinggal masih berupa bahan mentah, sehingga nilai tambah tidak tercipta di kawasan tersebut.

Dan diharapkan Kabupaten Musi Rawas dapat menyelesaikan segala permasalahan sehingga pada periode 2005-2025 tidak ada lagi kawasan terisolir dan kawasan tertinggal, melalui upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat di kawasan-kawasan tertinggal terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta transportasi sehingga kawasan-kawasan yang tadinya terisolir dapat mengikuti perkembangan dan dapat berhubungan dengan wilayah di sekitarnya yang relatif lebih maju;
- b. Tergalinya potensi sumberdaya alam dan membaiknya kualitas SDM di kawasan terisolir serta mulai optimalnya dukungan dari sektor terkait sehingga pengembangan kawasan-kawasan terisolir berlangsung cepat;

- c. Pembangunan lebih diarahkan untuk membuka akses di wilayah tertinggal sehingga daerah tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki;
- d. Pembangunan perkotaan dan perdesaan saling terkait sehingga membentuk suatu sistem pembangunan wilayah yang sinergis. Dan peran kota-kota sebagai 'motor penggerak' (*engine of development*) dan pendorong perkembangan perdesaan berjalan optimal;
- e. Terwujudnya pembangunan kota-kota kecamatan yang hirarkis sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah belakangnya;
- f. Tersedianya lapangan pekerjaan di sektor sekunder dan tersier sehingga masyarakat tidak terlalu bergantung dengan sektor pertanian.

### **C. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi kekayaan alam yang beragam. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Peranan sumber daya alam dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB yang pada tahun 2005 mencapai di atas 78% dan penyerapan tenaga kerja mencapai di atas 80%. Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Rawas terkait dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu:

1. Keberlanjutan atas ketersediaan SDA sering diabaikan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis;
2. Adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya bencana alam;
3. Potensi dan Keragaman SDA dan ekosistem alam belum dikelola secara bijaksana untuk kepentingan pendidikan, penelitian, obat-obatan, pariwisata, dll;
4. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan;
5. Belum ada sistem pengolahan limbah secara terpadu, baik limbah padat, limbah cair (domestik maupun industri) dan limbah gas dari beberapa penampungan dan pengolahan industri dan agroindustri;
6. Kabupaten Musi Rawas belum memiliki TPA, TPS dan pengelolaan persampahan secara terpadu, masih banyaknya pengelolaan sampah yang dilakukan secara individual setiap rumah tangga dengan cara ditimbun/ dibakar dan dibuang kesungai, parit dan saluran irigasi;
7. Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan daerah dan adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) belum dilaksanakan;
8. Belum diterapkannya peraturan lingkungan hidup dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

Menghadapi kondisi ini, tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Musi Rawas adalah dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada terkait dengan terganggunya SDA dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan keanekaragaman hayati sebagai alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari;

- b. Terlaksananya pengelolaan SDA dan LH dengan secara bijaksana dan optimal;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting pelestarian lingkungan hidup. Sehingga gaya hidup menjadi bijaksana dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan dalam kehidupan sehari-hari dapat menerapkan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*);
- d. Perubahan iklim dan pemanasan global dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pembuatan kebijakan. Isu lingkungan global mulai diterapkan dalam pembangunan daerah;
- e. Dampak negatif seluruh pembangunan menjadi minimal karena telah mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan seluruh kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting harus dilakukan AMDAL secara baik;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah, pengolahan limbah dan terkendalinya berbagai sumber pencemaran lingkungan;
- g. Terwujudnya pengolahan sampah secara terpadu (*integrated*) baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran penduduk tentang kebersihan lingkungan dan persampahan.

## **D. PRASARANA dan SARANA**

### **1. Prasarana dan Sarana Perhubungan**

Sebagai daerah transito, sektor perhubungan merupakan sektor yang sangat menunjang perekonomian daerah. Di Kabupaten Musi Rawas sarana transportasi sangat beragam, di antaranya, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandeng, kereta tempel, kendaraan khusus. Jumlah total kendaraan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 berjumlah 2.890 unit kendaraan. Berdasarkan data yang ada diperoleh diketahui bahwa jumlah kendaraan pribadi merupakan kendaraan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Musi Rawas, yaitu berjumlah 2.369 unit, sedangkan untuk jenis kendaraan terbanyak yaitu mobil barang yang berjumlah 2.632 unit.

Prasarana jalan menunjukkan bahwa, panjang jalan yang terdapat di Wilayah Kabupaten Musi Rawas 1.900,96 km. Terdiri dari 246,6 km jalan negara dengan kondisi baik dan beraspal, 200,7 km jalan Provinsi dengan kondisi sebagian besar sedang dan jalan kabupaten sepanjang 1.453,8 km. Dalam kurun waktu 1998 – 2000, panjang jalan Provinsi dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan yang pesat, yaitu dari 24 km menjadi 197 km, sedangkan panjang jalan kabupaten dan negara relatif tetap selama kurun waktu tersebut. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Musi Rawas dapat dikatakan masih memprihatinkan. Indikasinya, masih banyak terdapat jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain kerusakan jalan, ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi yaitu: (a) kemampuan pendanaan keuangan daerah yang sangat terbatas sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan penanganan jalan dan jembatan yang sedemikian besarnya; (b) masih relatif tingginya kerusakan jalan dan tingkat kecelakaan lalu lintas serta kualitas pelayanan lalulintas dan angkutan jalan masih belum memadai; (c) masih belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap tertib pemanfaatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan, serta kurangnya fasilitas sarana prasarana pendukungnya; (d) kurang terarah dan terpadunya pembangunan dan pengembangan transportasi darat.

#### **a. Jaringan Jalan dan Pendukung**

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Rawas terkait dengan kondisi jaringan jalan dan pendukung, yaitu:

- 1) Belum tersusunnya sistem jaringan dan hirarki jalan dan jembatan sehingga belum semua pusat-pusat pemukiman antar kecamatan terhubung dengan jalan dan jembatan beraspal;
- 2) Banyaknya sentra produksi pertanian dan perkebunan yang belum terhubung dengan pusat-pusat pemasaran regional sehingga memperpanjang jarak tempuh dan meningkatkan ongkos angkut;
- 3) Panjang dan luas jalan yang ada saat ini belum mencapai standar (5% dari luas wilayah);
- 4) Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat kelebihan tonase kendaraan angkutan barang dan penumpang;
- 5) Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan dan belum dapat melayani seluruh wilayah dan mendukung orientasi yang tepat;
- 6) Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan;
- 7) Kondisi jaringan jalan poros desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan;
- 8) Mekanisme pendanaan dan penanganan jalan provinsi, kabupaten dan desa belum jelas bahkan masih mengacu kepada batas-batas administrasi wilayah;
- 9) Pembangunan jalan baru untuk membuka akses ke suatu wilayah berlangsung lambat akibat terbatasnya dana pemeliharaan dan rehab jalan dan jembatan akibat rendahnya sumber-sumber pembiayaan yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya pembangunan sehingga dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, dapat dicapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya sistem jaringan dan hirarki jalan dan jembatan sehingga seluruh pusat-pusat pemukiman antar kecamatan dapat terhubung dengan jalan dan jembatan yang beraspal;
- 2) Seluruh sentra produksi pertanian dan perkebunan telah terhubung dengan pusat-pusat pemasaran regional sehingga *transport cost* dapat ditekan;
- 3) Panjang dan luas jalan yang ada telah mencapai standar (5% dari luas wilayah);
- 4) Tegaknya peraturan mengenai berat maksimum untuk kendaraan angkutan barang dan penumpang, sehingga kerusakan jalan akibat kelebihan tonase dapat dihindari;
- 5) Membaiknya kondisi pelayanan prasarana jalan dan telah mampu melayani seluruh wilayah;
- 6) Terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan;
- 7) Meningkatnya kondisi jaringan jalan poros desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi;

- 8) Adanya mekanisme yang jelas mengenai pendanaan dan penanganan jalan provinsi, kabupaten dan desa;
- 9) Pembangunan jalan baru untuk membuka akses ke suatu wilayah berlangsung cepat seiring dengan tercukupinya dana untuk pemeliharaan dan rehab jalan dan jembatan.

#### **b. Angkutan Umum**

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Rawas terkait dengan kondisi angkutan umum yang ada saat ini, yaitu:

- 1) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum dan perkeretaapian masih rendah;
- 2) Masih terbatasnya jumlah dan keterjangkauan prasarana dan sarana transportasi darat dan sungai;
- 3) Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi sungai dengan rencana pengembangan wilayah dan keterjangkauan pelayanan angkutan sungai;
- 4) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ;
- 5) Belum diterapkannya peraturan berlalu lintas pada kendaraan umum khususnya angkutan lokal perdesaan;
- 6) Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai jam kerja sopir angkutan;
- 7) Rendahnya *Law Enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalulintas;
- 8) Rendahnya disiplin pengguna jalan;
- 9) Rendahnya tingkat kelaikan armada, rambu dan fasilitas keselamatan di jalan baik darat maupun perkeretaapian dan angkutan sungai.

Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kebijakan pembangunan untuk 20 tahun ke depan harus diarahkan pada:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum dan perkertaapian;
- 2) Jumlah dan jangkauan prasarana dan sarana angkutan jalan dan sungai meningkat;
- 3) Adanya keterpaduan antara pembangunan jaringan transportasi sungai dengan rencana pengembangan wilayah dan keterjangkauan pelayanan angkutan sungai;
- 4) Berkembangnya kualitas SDM di bidang LLAJ;
- 5) Meningkatnya disiplin para pengguna jalan;
- 6) Adanya aturan yang jelas mengenai jam kerja sopir angkutan;
- 7) Meningkatnya tingkat kelaikan armada, rambu dan fasilitas keselamatan di jalan baik darat maupun perkeretaapian dan angkutan sungai;
- 8) Membaiknya *Law Enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalulintas di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

## **2. Permukiman dan Perumahan**

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap permukiman. Saat ini ada beberapa masalah yang dihadapi dalam hal jumlah dan sebaran permukiman dan perumahan, yaitu antara lain:

- a. Terdapat 21 kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pemukiman yang terdiri dari sub-sub pemukiman dengan tingkat persebaran dan kepadatan penduduk yang sangat pincang sehingga menyebabkan kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Tingginya kesenjangan antar wilayah dan belum adanya hirarki kota-kota di dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas telah menyebabkan berlangsungnya hubungan antara setiap pusat pemukiman di Musi Rawas dengan kota Lubuklinggau sebagai kota terbesar di bagian selatan yang bersifat *parasitic*, bukan hubungan yang bersifat generatif;
- c. Belum tertatanya kawasan permukiman dan semakin luasnya kawasan kumuh;
- d. Persebaran permukiman yang makin menjauh akses sosial dan ekonomi;
- e. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan pada wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi dan memiliki lokasi yang strategis;
- f. Pola pertumbuhan pusat pemukiman regional di dalam Kabupaten Musi Rawas berlangsung secara alami sesuai dengan dinamika sosial ekonomi setempat, bukan berdasarkan masterplan yang direncanakan;
- g. Belum adanya sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat pemukiman;
- h. Banyaknya pusat pemukiman yang terletak di kawasan lindung setempat, terutama di sekitar DAS Rawas dan DAS Musi;
- i. Aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang kurang memadai sehingga perlu disesuaikan dengan rencana struktur tata ruangnya dan tingkat pelayanan wilayah (struktur/hirarki kota);
- j. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana/sarana permukiman;
- k. Sistem sanitasi lingkungan, MCK, pembuangan sampah yang masih buruk;
- l. Belum menerapkan sistem ramah lingkungan/ konservasi dalam pembangunan perumahan;
- m. Belum ada standarisasi pembangunan perumahan yang layak huni;
- n. Belum ada sistem terpadu dalam pembangunan perumahan/ pemukiman.

Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kebijakan pembangunan untuk 20 tahun ke depan harus diarahkan pada:

- a. Tingkat persebaran penduduk merata di semua wilayah sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang seimbang di semua wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Kesenjangan antar wilayah hilang dan adanya hirarki kota-kota di dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas sehingga hubungan antara setiap pusat pemukiman di Musi Rawas dengan kota Lubuklinggau bersifat generatif;
- c. Tertatanya kawasan permukiman dan terwujudnya wilayah tanpa permukiman kumuh;
- d. Persebaran permukiman mendekati akses sosial dan ekonomi;
- e. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan pada wilayah dengan konsentrasi penduduk yang rendah sehingga sebaran penduduk dapat merata;
- f. Pola pertumbuhan pusat pemukiman regional di dalam Kabupaten Musi Rawas sudah berdasarkan masterplan yang direncanakan sehingga pusat pemukiman yang terletak di kawasan lindung setempat, terutama di sekitar DAS Rawas dan DAS Musi berkurang;

- g. Sudah berjalannya sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat pemukiman;
- h. Aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang sudah memadai sehingga perlu disesuaikan dengan rencana struktur tata ruangnya dan tingkat pelayanan wilayah (struktur/hirarki kota);
- i. Meningkatnya kemampuan penyediaan prasarana/sarana permukiman;
- j. Mengendalikan kelestarian lingkungan pada kawasan permukiman yang mencakup sumur resapan air, air tanah, dan TPS;
- k. Pengolahan sampah rumah tangga secara komunal dan terintegrasi (*integrated solidwaste management*);
- l. Sudah ada standarisasi pembangunan perumahan yang layak huni;
- m. Sudah ada sistem terpadu dalam pembangunan perumahan/ permukiman.

### **3. Prasarana dan Sarana Utilitas**

#### **a. Energi dan Jaringan Listrik**

Fasilitas tenaga listrik yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas berasal dari Gardu Induk (GI) Lahat dan GI Curup, PLTD Lubuklinggau dan Listrik yang berasal dari pembangkit sendiri, yaitu sub-ranting Muara Rupit, sub ranting Bingin Teluk, sub ranting Sungai Rawas. Dari Jumlah kapasitas listrik yang tersalurkan sebesar 4.091.875 Kwh yang terpasang ke pelanggan sebesar 3.537.242 Kwh. Dengan demikian kapasitas yang tersalurkan masih tersisa 444.633 Kwh. Berdasarkan informasi PLN Ranting Lubuklinggau, dalam waktu dekat ini sedang diusahakan langsung menginduk dengan Tanjung Enim (Interkoneksi). Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyediaan energi dan jaringan listrik, yaitu:

- 1) Walaupun masih ada kapasitas yang belum terpasang, namun akses fasilitas tenaga listrik belum menyebar secara merata. Layanan hanya menjangkau 8 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada;
- 2) Rasio elektrifikasi desa baru mencapai 64%;
- 3) Jumlah pelanggan/ pemakai/ rumah tangga berlistrik baru mencapai  $\pm 40\%$ ;
- 4) Penggunaan bahan bakar untuk rumah tangga masih dominan menggunakan kayu bakar;
- 5) Belum ada konversi penggunaan bahan bakar selain fosil;
- 6) Batubara belum dieksploitasi untuk kebutuhan energi;
- 7) Energi dari SD terbarukan belum dimanfaatkan (SD air, matahari, angin, biogas);
- 8) Belum dimanfaatkannya potensi gas alam untuk keperluan rumah tangga.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya pembangunan sehingga dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, dapat dicapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Layanan listrik dapat menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten;
- 2) Rasio elektrifikasi desa mencapai 100%;
- 3) Jumlah pelanggan/ pemakai/ rumah tangga berlistrik mencapai 100%;
- 4) Dimanfaatkannya sumber energi lain seperti gas alam, batu bara, SD air, matahari, angin, dan biogas.

## **b. Air Bersih**

Pada umumnya kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas telah mendapat pelayanan air minum/air bersih dari BPAM/PDAM Musi Rawas. Banyaknya debit air minum yang disalurkan BPAM kepada pelanggan tercatat sebesar 2.391.385m<sup>3</sup>. Sebagian besar debit tersebut untuk pelanggan rumah tangga yang banyaknya 1.964.411m<sup>3</sup> atau 82,15%. Sampai saat ini PDAM Musi Rawas masih dibawah urusan PU Cipta Karya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu:

- 1) Belum meratanya pengolahan sumber air baku menjadi air bersih sebagai akibat dari belum meratanya ketersediaan fasilitas instalasi pengolahan air bersih antar kecamatan;
- 2) Tingginya kesenjangan kebutuhan air bersih akibat tidak meratanya sebaran pemukiman penduduk antar kecamatan;
- 3) Tingginya pencemaran sumber air baku akibat pembuangan sampah rumah tangga dan limbah industri;
- 4) Belum tumbuhnya industri pengolahan air dalam kemasan.

Untuk itu dalam jangka waktu ke depan perlu ada beberapa program pembangunan yang harus dilakukan hingga dapat mencapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Perluasan jaringan penyediaan air bersih yang dapat diakses masyarakat yang lebih dan dapat menjangkau seluruh kecamatan;
- 2) Kapasitas sumber air meningkat baik kuantitas maupun kualitas;
- 3) Ketersediaan air bersih yang cukup untuk konsumsi rumah tangga, industri, dan irigasi pertanian;
- 4) Penggunaan teknologi pengolahan air baku dalam pengembangan usaha pengolahan air dalam kemasan.

## **c. Drainase**

Penanganan air dalam hal ini air yang mengalir diatas permukaan tanah (*run off*) dengan limpasannya perlu dilakukan penyediaan saluran drainase, saluran ini baik yang sifatnya terbuka maupun yang tertutup. Sistem jaringan drainase ini mengikuti klasifikasi sistem primer, sekunder dan tersier yang pada prinsipnya dibuat mengikuti rencana jaringan jalan dan berada pada sisi kiri dan kanan jalan. Volume *run off* antara lain akan dipengaruhi oleh kepadatan bangunan disuatu lingkungan atau kawasan dengan kata lain tergantung dari besarnya koefisien dasar bangunan serta kecenderungan pengaliran air yang dipengaruhi oleh kemiringan tanah. Ada beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan jaringan drainase yang ada di Kabupaten Musi Rawas, yaitu:

- 1) Tidak semua jalan didukung oleh jaringan drainase sehingga menyebabkan genangan air yang berakibat pada tingginya kerusakan jalan;
- 2) Banyaknya fasilitas drainase yang rusak akibat terbatasnya biaya pemeliharaan yang tersedia;
- 3) Masih tingginya kecenderungan untuk menempatkan pembangunan drainase dalam skala prioritas rendah.

Sehingga untuk 20 tahun ke depan, diharapkan ada perbaikan drainase yang mencakup:

- 1) Semua jalan telah didukung oleh jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan air di jalan;
- 2) Berkurangnya fasilitas drainase yang rusak akibat terbatasnya biaya pemeliharaan yang tersedia;
- 3) Menurunnya kecenderungan untuk menempatkan pembangunan drainase dalam skala prioritas rendah.

#### **d. Irigasi.**

Sebagai wilayah agraris, keberadaan jaringan irigasi merupakan prasarana ekonomi yang strategis. Kabupaten Musi Rawas mempunyai banyak sungai besar yang berasal dari TNKS, sehingga ketersediaan airnya masih relatif stabil. Namun demikian, pemanfaatannya untuk irigasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan besarnya investasi yang harus disediakan untuk pembangunan suatu bendungan atau jaringan irigasi.

Di Kabupaten Musi Rawas masih berpotensi untuk dikembangkan irigasi skala besar seperti bendungan Sungai Rawas. Adanya rencana ke depan untuk memanfaatkan potensi Sungai Rawas ditambah dengan pembangunan bendungan Sungai Lakitan yang sedang dibangun sekarang ini, akan menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan jaringan irigasi, antar lain:

- 1) Tingginya kesenjangan debit air pada musim kemarau dan musim hujan;
- 2) Belum tersedianya situ-situ tempat penampungan cadangan air pada musim hujan yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau;
- 3) Tingginya kerusakan prasarana irigasi sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat mengairi areal persawahan yang berada di lokasi elevasi tanah tinggi;
- 4) Pembangunan irigasi baru memerlukan biaya yang tinggi.

Dan diharapkan Kabupaten Musi Rawas dapat menyelesaikan segala permasalahan sehingga pada periode 2005-2025 dicapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Irigasi yang mampu memenuhi kebutuhan sektor pertanian serta pembangunan bendungan yang mampu menahan luapan air dan banjir semakin membaik;
- 2) Pengembangan irigasi skala besar dengan mengundang investor asing.

#### **e. Telekomunikasi**

Sarana dan prasarana telekomunikasi yang tersedia cukup lengkap seperti telepon seluler, wartel, kiospon, warnet yang kesemuanya melalui saluran telepon otomatis dapat menghubungkan keluar daerah. Namun sampai saat ini, baru 2 kecamatan yang telah terhubung dengan STO, yaitu Tugumulyo dan Rupit. Kecamatan yang lain masih belum mendapat jaringan telepon, tetapi jaringan cellular telah menjangkau beberapa kecamatan. Dan untuk itu, pada tahun ke depan diharapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kecamatan.

#### **f. Sampah**

Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2025 diperkirakan 615.820 jiwa. Implikasi perkembangan penduduk ini adalah bertambahnya jumlah timbulan sampah. Agar dapat melayani konsumsi sampah pada tahun 2025, maka diperlukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang antara lain meliputi alat angkut sampah, kontainer/TPS, sistem transfer depo dan TPA serta pengolahan sampah sebagai pupuk organik atau penghasil gas.

Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah merupakan salah satu kendala yang harus diselesaikan. Membiasakan masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) harus diterapkan sejak dini. Pada periode kedepan, diharapkan di Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan konsep pengelolaan sampah yang terintegrasi (*integrated solidwaste management*) yaitu mulai dari proses pembuangan, pengangkutan dan pengolahan yang ramah lingkungan.

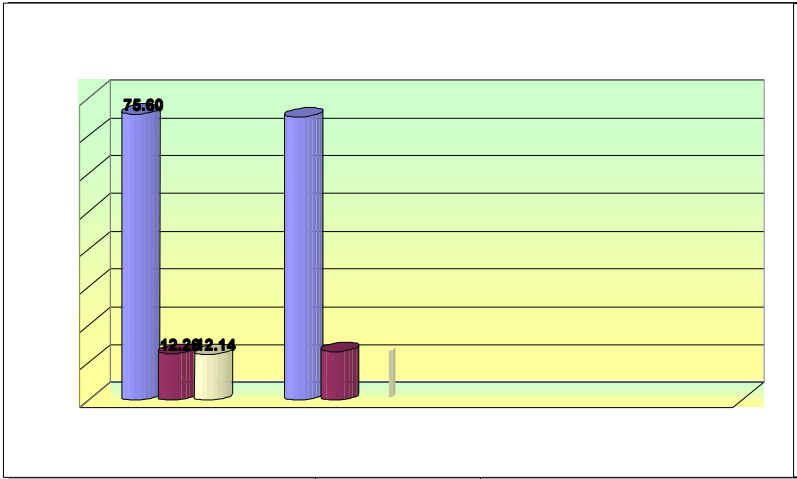
## E. PEREKONOMIAN

Analisis ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui karakter ekonomi wilayah dan peluang untuk pengembangannya dikaitkan dengan struktur tata ruang dan kebutuhan terhadap pelayanan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat alat analisis seperti struktur output, export base, location quotient, dan shift and share. Keluaran dari hasil analisis ini, meliputi: struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan prospek pengembangannya, pola investasi, kemampuan keuangan daerah yang ditinjau dari sisi penerimaan dan pengeluaran serta pola perdagangan.

### 1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari sumbangan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, yang biasanya dibagi ke dalam 3 kegiatan pokok, yaitu: sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi masing-masing sektor, pergeseran struktur ekonomi dalam rentang waktu tertentu dan peluang untuk pengembangannya di masa mendatang.

Selama kurun waktu 2003-2006 struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti, dimana kontribusi yang terbesar pada masih didominasi oleh **sektor primer**, yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. sektor ini pada tahun 2006 memberikan kontribusi sebesar 73,65 persen dari total PDRB Kabupaten Musi Rawas. Sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 38,43 persen dan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 35,22 persen.



**Sektor Sekunder** terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan. Sektor sekunder ini pada tahun 2006 memberikan kontribusi sebesar 13,37 persen dari total PDRB Kabupaten Musi Rawas. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dari sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 9,28 persen, sektor bangunan memberikan kontribusi sebesar 4,01 persen, sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih hanya memberikan kontribusi sebesar 0,08 persen dari total PDRB Kabupaten Musi Rawas.

**Sektor Tersier** terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Dari sektor ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor jasa-jasa sebesar 6,03 persen, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 4,84 persen dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,63 persen, sedangkan sektor angkutan dan komunikasi hanya memberikan kontribusi sebesar 0,48 persen.

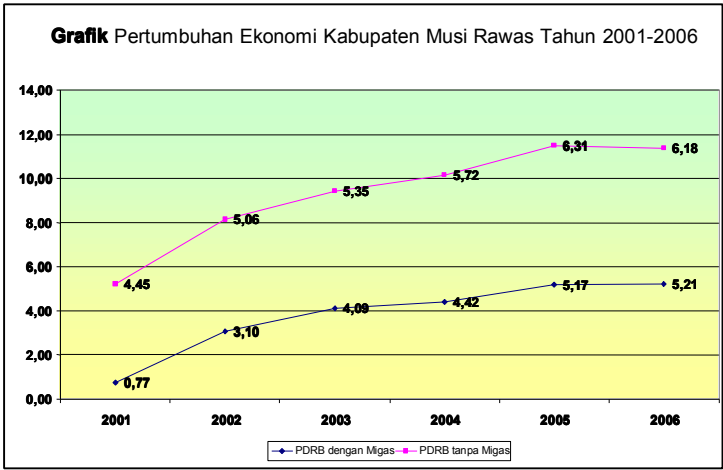
**Tabel** Peranan Sektor-sektor dalam pembentukan PDRB dengan Migas atas Dasar Harga Berlaku (%)

| KELOMPOK SEKTOR                                  | 2003         | 2004         | 2005         | 2006         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                | 2            | 3            | 4            | 5            |
| <b>1. Sektor Primer</b>                          | <b>75.60</b> | <b>74.82</b> | <b>74.38</b> | <b>73.65</b> |
| - Sektor Pertanian                               | 36.39        | 36.08        | 37.70        | 38.43        |
| - Sektor Pertambangan dan Penggalan              | 39.22        | 38.74        | 36.68        | 35.22        |
| <b>2. Sektor Sekunder</b>                        | <b>12.26</b> | <b>12.82</b> | <b>13.03</b> | <b>13.37</b> |
| - Sektor Industri Pengolahan                     | 8.40         | 8.85         | 9.11         | 9.28         |
| - Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih             | 0.07         | 0.07         | 0.08         | 0.08         |
| - Sektor Bangunan                                | 3.78         | 3.90         | 3.85         | 4.01         |
| <b>3. Sektor Tersier</b>                         | <b>12.14</b> | <b>12.36</b> | <b>12.59</b> | <b>12.98</b> |
| - Sektor Perdagangan                             | 4.49         | 4.61         | 4.73         | 4.84         |
| - Sektor Angkutan                                | 0.40         | 0.41         | 0.47         | 0.48         |
| - Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 1.44         | 1.49         | 1.54         | 1.63         |
| - Sektor Jasa-jasa Lainnya                       | 5.81         | 5.86         | 5.85         | 6.03         |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah dapat diamati dari perubahan output dari barang dan jasa yang diproduksi selama periode tertentu. Analisis ini gunakan untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pembangunan ekonomi baik secara agregat maupun sektoral.



Perekonomian Kabupaten Musi Rawas tahun 2006 secara keseluruhan cenderung lebih baik dibanding tahun 2005 hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 5,21 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 6,12 persen. Penyebab utama dari pertumbuhan ekonomi kabupaten ini adalah sektor bangunan, ini sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dasar untuk membuka akses ke daerah terpencil.

Secara sektoral pada tahun 2006 beberapa sektor mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi diatas 5 persen yaitu: sektor bangunan dengan pertumbuhan sebesar 7,17 persen, angkutan dan komunikasi sebesar 6,76 persen, pertanian sebesar 6,39 persen, listrik, gas dan air sebesar 6,27 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,24 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 5,49 persen serta sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 5,22 persen, sedangkan untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan hanya tumbuh sebesar 4.17 persen bahkan sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh sebesar 3,78 persen.

**Tabel** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (%)

| KELOMPOK SEKTOR                                   | 2003        | 2004        | 2005        | 2006        |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                 | 2           | 3           | 4           | 5           |
| 1. Sektor Pertanian                               | 5.44        | 6.20        | 7.11        | 6.39        |
| 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian             | 2.29        | 2.41        | 3.36        | 3.78        |
| 3. Sektor Industri Pengolahan                     | 5.12        | 6.88        | 6.67        | 5.49        |
| 4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih             | 5.34        | 6.11        | 6.80        | 6.27        |
| 5. Sektor Bangunan                                | 4.41        | 2.34        | 3.34        | 7.17        |
| 6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran         | 5.51        | 4.09        | 5.09        | 6.24        |
| 7. Sektor Angkutan dan Komunikasi                 | 11.01       | 7.18        | 6.40        | 6.76        |
| 8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 5.61        | 5.44        | 4.94        | 4.17        |
| 9. Sektor Jasa-jasa                               | 5.22        | 5.41        | 4.64        | 5.22        |
| <b>PDRB dengan Migas</b>                          | <b>4.09</b> | <b>4.42</b> | <b>5.17</b> | <b>5.21</b> |
| <b>PDRB Tanpa Migas</b>                           | <b>5.35</b> | <b>5.72</b> | <b>6.31</b> | <b>6.18</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas

3. Inflasi Sektoral

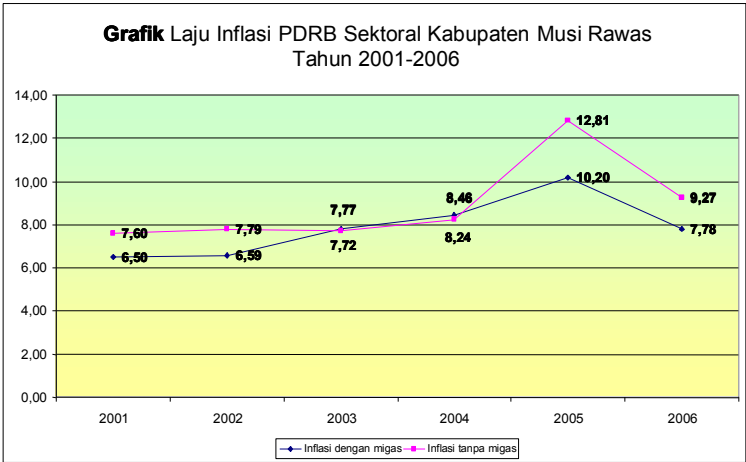
Inflasi merupakan indikator untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi sektoral digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di tingkat produsen, bukan inflasi di tingkat konsumen yang lazim dibicarakan. Inflasi dengan migas tahun 2006 sebesar 7,78 persen lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2005 yang mencapai 10,20 persen, sedangkan inflasi tanpa migas tahun 2006 sebesar 9,27 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 12,81 persen.

Tabel Laju Inflasi PDRB Sektoral Kabupaten Musi Rawas (%)

| KELOMPOK SEKTOR                                   | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1                                                 | 2     | 3     | 4     | 5     |
| 1. Sektor Pertanian                               | 7.25  | 5.75  | 13.07 | 8.64  |
| 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian             | 7.70  | 9.25  | 6.15  | 4.92  |
| 3. Sektor Industri Pengolahan                     | 11.11 | 11.62 | 11.79 | 9.48  |
| 4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih             | 5.38  | 5.13  | 21.12 | 13.34 |
| 5. Sektor Bangunan                                | 11.36 | 13.93 | 10.85 | 10.31 |
| 6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran         | 8.73  | 11.69 | 13.37 | 9.18  |
| 7. Sektor Angkutan dan Komunikasi                 | 4.57  | 9.02  | 22.71 | 9.38  |
| 8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 2.46  | 10.84 | 14.30 | 15.29 |
| 9. Sektor Jasa-jasa                               | 4.82  | 8.30  | 10.61 | 11.08 |
| Inflasi dengan Migas                              | 7.77  | 8.46  | 10.20 | 7.78  |
| Inflasi Tanpa Migas                               | 7.72  | 8.24  | 12.81 | 9.27  |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas

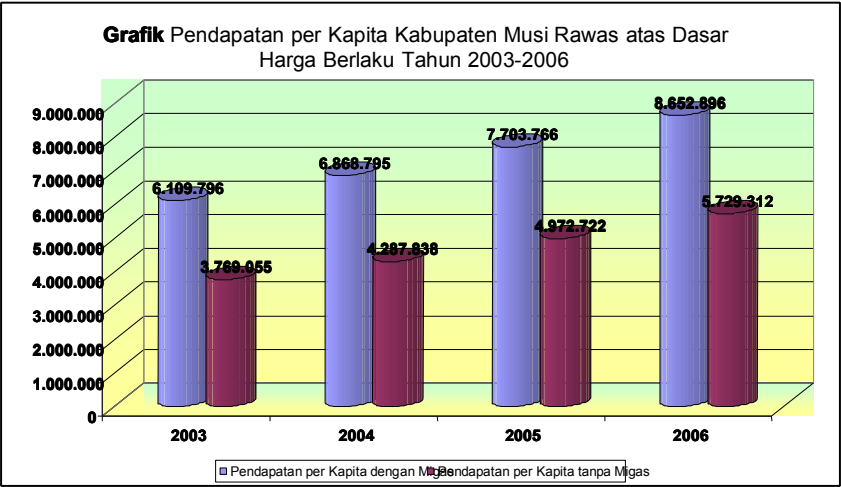
Sektor yang mengalami inflasi terbesar tahun 2006 adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan, inflasi sektor ini sebesar 15,29 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 14,30 persen. Sektor lainnya yang nilai inflasinya 2 digit yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 13,34 persen, sektor jasa-jasa sebesar 11,08 persen dan sektor bangunan sebesar 10,31 persen. Sektor Pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang nilai inflasinya terkecil yaitu sebesar 4,61 persen.



#### 4. Pendapatan per Kapita

Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dapat diamati dari perkembangan pendapatan perkapita. Analisis mengenai pendapatan perkapita ini diperoleh dari ratio antara PDRB dengan penduduk pertengahan tahun. Namun, hal ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena angka ini belum memperhitungkan *net factor income* yaitu selisih dari *income outflow* dengan *income in flow*. Secara umum apabila pendapatan per kapita suatu daerah naik maka dapat diartikan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk meningkat. Demikian sebaliknya turunnya perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari menurunnya pula pendapatan per kapita daerah tersebut. Tumbuhnya ekonomi suatu daerah selain memberikan gambaran terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, juga memberikan gambaran tentang peningkatan pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita dengan migas atas dasar harga berlaku Kabupaten Musi Rawas dalam rentang waktu 4 tahun dari tahun 2003-2006 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 6,109,796 menjadi Rp. 8.652.896 pada tahun 2006 atau meningkat sebesar 41,62 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 pendapatan per kapita dengan migas penduduk Kabupaten Musi Rawas naik sebesar 12,32 persen.



#### 5. Sektor-Sektor Produksi

##### a. Sektor Pertanian Lahan Basah

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang sektor produksi terutama pada pertanian lahan basah, yaitu:

- 1) Lahan sawah setiap tahunnya berkurang akibat adanya alih fungsi lahan pertanian produktif;
- 2) Kualitas hasil panen yang belum optimal dan rata-rata produksi padi/gabah adalah 1-2 Ton/Ha/tahun (dibawah standar, yaitu 6-7 Ton/ha/Thn);
- 3) Masih banyak lahan sawah dengan Indeks Pertanaman (IP) 100 (satu kali tanam setahun);
- 4) Kurangnya debit air untuk pengairan dan cuaca yang semakin tidak menentu;
- 5) Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Dan hal ini diperparah dengan tingginya harga pupuk dan obat-obatan;
- 6) Belum banyaknya penggunaan bibit unggul lokal, pemberian kredit tidak merata dan kurang efektifnya balai penyuluhan yang ada;

7) Rendahnya harga hasil pertanian lahan basah (domestik dan ekspor).

Pada sisi lain, kesempatan usaha pertanian sebagai upaya penanggulangan krisis ekonomi belum menunjukkan efektivitasnya dan belum mendorong terwujudnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan. Pengembangan agribisnis terutama hortikultura mempunyai peluang/potensi pengembangan yang sangat besar serta berkemampuan dalam menciptakan lapangan kerja, tapi pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna belum optimal. Pola-pola kemitraan yang dilaksanakan diharapkan akan memberdayakan penciptaan lapangan kerja melalui program pembangunan fisik dan ekonomi produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Revitalisasi pertanian menjadi penting, mengingat permasalahan Ketahanan Pangan yang meliputi: (a) Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah berarti pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan ketahanan pangan keluarga; (b) masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang bergizi; (c) belum optimalnya pengembangan sistem pengamanan pangan; (d) keterampilan petani masih rendah; (e) distribusi dan ketersediaan pangan yang tidak merata, serta distribusi (waktu dan lokasi) harga pangan yang tidak merata, serta keberadaan dan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai bagian dari penyangga pangan dan sudah dikenal di kalangan petani belum berjalan secara optimal; (f) prasarana dan sarana distribusi pangan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga arus lalu lintas pangan antar-wilayah dan antar-waktu kurang lancar; (g) kelembagaan petani yang belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Sehingga dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang Kabupaten Musi Rawas harus menuntaskan persoalan di atas melalui program-program dari SATKER terkait.

Selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan secara signifikan sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya alih fungsi lahan pertanian produktif akibat penetapan sawah abadi;
- 2) Rata-rata produksi padi/gabah adalah 7-8 Ton/Ha/tahun dan meningkatnya kualitas hasil panen;
- 3) Telah banyak lahan sawah dengan Indeks Pertanaman (IP) 300 (tiga kali tanam dalam dua tahun);
- 4) Debit air yang memadai untuk pengairan dan kondisi pertanian yang sudah tidak terlalu tergantung pada cuaca;
- 5) Semakin berkurangnya ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, sehingga beban petani menjadi lebih ringan karena penggunaan pupuk organik yang harganya jauh lebih rendah;
- 6) Sudah banyak penggunaan bibit unggul lokal, pemberian kredit sudah merata, dan semakin efektif dan berperannya balai penyuluhan yang ada;
- 7) Semakin membaiknya harga hasil pertanian lahan basah (domestik dan ekspor).

**b. Sektor Pertanian Lahan Kering**

Sementara itu untuk pertanian lahan kering, Kabupaten Musi Rawas menghadapi beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Lahan kering di Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan, dan BTS Ulu sulit berkembang karena masyarakat lebih tertarik dengan tanaman keras (kelapa sawit dan karet) dan pemanfaatan teknologi lahan kering yang masih terbatas;
- 2) Produksi dan kualitas pertanian lahan kering masih belum optimal dan diperparah dengan mewabahnya hama dan penyakit tanaman;
- 3) Kecilnya minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil pertanian lahan kering. Dan hasil lahan kering hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri (bukan sektor basis);
- 4) Pemasaran hasil-hasil pertanian lahan kering belum jelas. Selain itu, nilai dan harga hasil-hasil lahan kering fluktuatif dan harga pupuk yang tinggi.

Selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan secara signifikan sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertanian lahan kering di Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan, dan BTS Ulu bisa berkembang dan alih fungsi lahan pertanian dapat dicegah karena masyarakat mulai beralih ke pertanian lahan kering, tidak hanya tertarik dengan tanaman keras (kelapa sawit dan karet) dan adanya pemanfaatan teknologi yang optimal dalam pengembangan pertanian lahan kering;
- 2) Produksi dan kualitas pertanian lahan kering sudah semakin optimal didukung oleh berkurangnya gangguan hama dan penyakit tanaman;
- 3) Tumbuhnya minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil pertanian lahan kering dan hasil lahan kering tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri tapi sudah untuk dijual;
- 4) Pemasaran hasil-hasil pertanian lahan kering telah terstruktur dengan baik. Selain itu nilai dan harga hasil-hasil lahan kering cenderung stabil.

### **c. Sektor Perkebunan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sektor perkebunan di Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

- 1) Produksi dan kualitas perkebunan belum optimal yaitu masih dibawah produksi standar;
- 2) Terjadinya kesenjangan kepemilikan lahan perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian beririgasi teknis antara pemilik yang menguasai lahan dalam jumlah besar dan yang menguasai lahan dalam jumlah kecil;
- 3) Terjadinya kecenderungan *capital flight* dimana hasil investasi perkebunan karet dan kelapa sawit diinvestasi ulang pada sektor yang berbeda di daerah yang lain;
- 4) Produksi masih dikuasai oleh swasta (perusahaan besar) dan pengelolaannya masih menggunakan sistem tradisional;
- 5) Minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil tanaman tahunan/perkebunan terbatas dan hanya dimanfaatkan (banyak) untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

- 6) Sub-sektor perkebunan dinilai masih belum dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah;
- 7) Tidak transparannya harga standar jual, sulitnya distribusi pemasaran hasil perkebunan selain karet dan kelapa sawit (domestik dan ekspor) terutama yang langsung penjualannya oleh petani.

Selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan secara signifikan sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Produksi dan kualitas perkebunan sudah optimal yaitu sudah di atas produksi standar;
- 2) Berkurangnya kesenjangan kepemilikan lahan perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian beririgasi teknis antara pemilik yang menguasai lahan dalam jumlah besar dan yang menguasai lahan dalam jumlah kecil;
- 3) Menurunnya *capital flight* dimana hasil investasi perkebunan karet dan kelapa sawit diinvestasi ulang pada sektor yang berbeda di daerah yang lain;
- 4) Produksi tidak hanya dikuasai oleh swasta (perusahaan besar) tapi juga oleh masyarakat dan pengelolaannya telah memanfaatkan teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah;
- 5) Minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil tanaman tahunan/perkebunan menjadi tinggi. Dan hasil produksi tidak hanya dimanfaatkan (banyak) untuk memenuhi kebutuhan sendiri tapi juga untuk dijual;
- 6) Sub-sektor perkebunan dinilai sudah dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah;
- 7) Semakin transparannya harga standar jual dan semakin lancarnya distribusi pemasaran hasil perkebunan selain karet dan kelapa sawit (domestik dan ekspor).

#### **d. Sektor Peternakan dan Perikanan**

Di sub sektor peternakan dan perikanan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Musi Rawas adalah :

- 1) Kontribusi ekonomi yang relatif rendah (berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki);
- 2) Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem sungai menyebabkan rendahnya produktivitas penangkapan ikan perairan umum dan menurunnya mutu genetik induk ikan dan ternak;
- 3) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya *restocking* (penebaran bibit ikan kembali) dan sering kali menggunakan bahan beracun dan berbahaya dan alat-alat yang memiliki sengatan/arus listrik tinggi;
- 4) Manajemen/pengelolaan produksi peternakan dan perikanan belum optimal dan hasil peternakan/perikanan (banyak) hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan dan atau dikonsumsi sendiri;
- 5) Pemasaran hasil-hasil peternakan/perikanan yang belum jelas yaitu masih mengandalkan

pasar lokal dan pemanfaatan pasar ternak masih belum optimal. Sedangkan untuk pasar sasaran luar daerah sering mengalami penekanan harga.

Selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan secara signifikan sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kontribusi ekonomi yang sudah tinggi (berbanding lurus dengan potensi yang dimiliki);
- 2) Meningkatnya ketersediaan pakan alami (cacing sutra);
- 3) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan memperhatikan adanya *restocking* (penebaran bibit ikan kembali) dan penangkapan ikan tidak lagi menggunakan bahan beracun dan berbahaya dan alat-alat yang memiliki sengatan/arus listrik tinggi;
- 4) Manajemen/pengelolaan produksi peternakan dan perikanan sudah optimal dan hasil peternakan/perikanan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri tetapi juga untuk dijual;
- 5) Dan untuk pemasaran hasil-hasil peternakan/perikanan sudah mengandalkan pasar regional, nasional dan internasional.

#### **e. Sektor Kehutanan**

Sedangkan di sektor hutan terutama hutan produksi, masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Berkurangnya luasan lahan untuk kegiatan hutan produksi, padahal untuk pemanfaatan hutan produksi memerlukan lahan yang banyak;
- 2) Masih kecilnya minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil hutan produksi. Dan untuk hasil hutan produksi yang berkembang belum memiliki nilai tambah yang berarti;
- 3) Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan salah satunya akibat lemahnya penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu;
- 4) Hasil hutan produksi dari waktu pembibitan memerlukan waktu yang lama;
- 5) Sulitnya mendapatkan benih kayu unggul;
- 6) Teknologi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi masih terbatas.

Selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan secara signifikan sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya luasan lahan untuk kegiatan hutan produksi;
- 2) Meningkatnya minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil hutan produksi dan untuk hasil hutan produksi yang berkembang sudah memiliki nilai tambah yang berarti;
- 3) Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan sudah dilaksanakan dan semakin tegasnya penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu;
- 4) Semakin mudahnya mendapatkan benih kayu unggul melalui program pembibitan benih kayu unggul terutama waktu produksi yang relatif lebih singkat;
- 5) Teknologi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi semakin luas.

#### **f. Sektor Pertambangan dan Galian**

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Musi Rawas di bidang pertambangan dan galian adalah:

- 1) Sumberdaya pertambangan dan galian bersifat terbatas (*non-renewable*);  
Pemanfaatan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Musi Rawas masih relatif sederhana/konvensional (banyak yang terbuang/tidak efektif dan efisien);
- 2) Sektor ini belum dapat menciptakan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat;
- 3) Masih sedikitnya industri/sentra industri yang mengelola hasil tambang;
- 4) Sulitnya penerapan teknologi tinggi pengolahan yang ramah lingkungan di samping memerlukan investasi yang tinggi;
- 5) Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya, seperti eks-BTM tambang emas;
- 6) Belum dilaksanakannya aktifitas eksploitasi pertambangan batubara dan belum adanya sarana prasarana di kawasan ini;
- 7) Belum ditetapkannya kawasan khusus pertambangan batubara di dalam RTRW sekaligus kondisi cadangan yang potensial untuk dieksploitasi.

Selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan secara signifikan sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Musi Rawas sudah tidak bersifat sederhana/konvensional (banyak yang terbuang/tidak efektif dan efisien);
- 2) Sektor ini sudah dapat menciptakan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat;
- 3) Semakin banyaknya industri/sentra industri yang mengelola hasil tambang sehingga meningkatkan angka produksi dan memberikan nilai tambah bagi produk pertambangan;
- 4) Penerapan teknologi tinggi pengolahan yang ramah lingkungan dalam proses pemanfaatan pertambangan dan penggalian;
- 5) Adanya sumber energi lain yang dapat diperbaharui, sehingga sumberdaya yang bersifat terbatas dapat dikurangi pemakaiannya;
- 6) Optimalnya peran sektor migas dalam penerimaan daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi;
- 7) Meningkatnya investasi pertambangan dan sumberdaya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- 8) Meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumberdaya mineral;
- 9) Teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana;
- 10) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi energi dan sumber daya mineral.

#### **g. Sektor Industri**

Sementara itu, upaya peningkatan daya saing industri, masih menghadapi berbagai permasalahan meliputi: (a) panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar dalam negeri maupun global; (b) belum optimalnya perlindungan HAKI, Standarisasi produk Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM); (c) keterkaitan antar IMKM dengan besar/BUMN; (d) belum optimalnya kualitas sumber daya dan lembaga pendukung pasar; (e) belum optimalnya IMKM menggunakan bahan baku potensi unggulan daerah serta masih tingginya ketergantungan sebagian produk pada komponen bahan baku import; (f) belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri; (g) masih terbatasnya sarana promosi industri kecil dan menengah. Permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas pada sektor industri adalah sebagai berikut:

- 1) Belum dilakukan pengolahan produk-produk lokal menjadi produk setengah jadi atau produk jadi;
- 2) Belum dimanfaatkannya peluang-peluang pendanaan untuk pengembangan industri kerajinan dari bahan-bahan lokal;
- 3) Pembangunan industri membutuhkan investasi tinggi dan belum ada investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di sektor-sektor pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi;
- 4) Belum dikembangkannya industri pengolahan pendukung pertanian misalnya industri pakan ikan, industri pakan ternak, dan industri-industri lain untuk men-*support* produksi;
- 5) Biaya produksi yang relatif lebih besar dari nilai jual hasil produksi sehingga industri terancam gulung tikar;
- 6) Sulitnya mendapatkan bahan baku, sehingga untuk bahan baku industri masih harus meng-import (tidak memanfaatkan bahan baku lokal);
- 7) Masih tingginya dampak negatif terhadap lingkungan;
- 8) Ketersediaan tenaga kerja (SDM) relatif rendah dan pembangunan industri harus memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan secara signifikan sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sudah dilakukan pengolahan produk-produk lokal menjadi produk setengah jadi atau produk jadi;
- 2) Telah dimanfaatkannya peluang-peluang pendanaan untuk pengembangan industri kerajinan dari bahan-bahan lokal;
- 3) Semakin banyaknya investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di sektor-sektor pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi;
- 4) Sudah dikembangkannya industri pengolahan pendukung pertanian misalnya industri pakan ikan, industri pakan ternak, dan industri-industri lain untuk mensupport produksi;
- 5) Biaya produksi yang relatif rendah dari nilai jual hasil produksi;
- 6) Semakin mudahnya mendapatkan bahan baku dengan memanfaatkan bahan baku lokal;
- 7) Semakin rendahnya dampak negatif terhadap lingkungan;

- 8) Ketersediaan tenaga kerja (SDM) relatif sudah tinggi dan pembangunan industri harus memanfaatkan tenaga kerja lokal dan non lokal yang terlatih dan terdidik.

#### **h. Sektor Pariwisata**

Sektor pariwisata di Kabupaten Musi Rawas juga menghadapi kendala dan permasalahan-permasalahan, yaitu:

- 1) Belum berkembangnya sektor pariwisata karena belum didukung pengolahan objek-objek pariwisata yang potensial, sehingga perencanaan pariwisata yang ada masih parsial dan keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata belum tercapai;
- 2) Belum adanya kesatuan tekad antara pusat dan daerah serta industri pariwisata untuk menangani pariwisata daerah;
- 3) Belum berkembangnya sistem informasi kepariwisataan dan belum tersosialisasinya misi pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait lainnya.

Dengan kata lain, bahwa perkembangan obyek wisata 'diikuti' oleh pertumbuhan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi setempat yang pada gilirannya secara makro akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Eksploitasi secara maksimal dari berbagai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Musi Rawas masih belum maksimal terutama wisata alam pegunungan, wisata budaya sejarah maupun kerajinan rakyat.

Selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan secara signifikan sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkembangnya sektor pariwisata sebagai industri pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip ecotourism dan dikelola dengan sistem manajemen terpadu dengan sistem pengembangan wilayah secara keseluruhan serta didukung oleh sistem informasi kepariwisataan;
- 2) Terintegrasinya program pengembangan pariwisata dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, antara pemerintah pusat, daerah dan swasta untuk mengembangkan industri pariwisata daerah;
- 3) Berkembangnya paket-paket pariwisata yang lebih luas seperti wisata kuliner, budaya, agrowisata, dan pendidikan.

## **6. DEMOGRAFI**

### **a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Musi *Rawas* Tahun 2004 adalah 465.682 jiwa. Terdiri dari 234.000 orang penduduk laki-laki dan 231.682 orang penduduk perempuan dan terhimpun ke dalam 116.210 rumah tangga atau Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah 101,00. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk laki-laki terdapat 101,00 penduduk laki - laki.

Sebaran penduduk Kabupaten Musi Rawas tidak merata di 21 kecamatan, dimana tingkat kepadatan penduduk yang berbeda cukup jauh antar kecamatan. Secara umum dapat digambarkan bahwa sebaran penduduk di Kabupaten Musi Rawas cenderung terkonsentrasi di kecamatan - kecamatan yang dekat dengan perkotaan.

- 1) Kepadatan tinggi yaitu kepadatan  $>100$  jiwa/km<sup>2</sup>, yang meliputi Kecamatan Tugumulyo dan Purwodadi.
- 2) Kepadatan sedang 50 - 99 jiwa/km<sup>2</sup>, yang meliputi Kecamatan Rawas Ulu, BKL Ulu Terawas, Muara Beliti, Muara Kelingi, Megang Sakti, dan Karang Dapo.
- 3) Kepadatan rendah  $> 49$  jiwa/km<sup>2</sup> yang meliputi Kecamatan Ulu Rawas, Rupit, Rawas Ilir, Jayaloka, Muara Lakitan, Karang Jaya, Selangit, BTS Ulu, dan Nibung.

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk untuk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2006 adalah 1,27%. Untuk mengantisipasi pembangunan jangka panjang maka tingkat pertumbuhan penduduk harus ditekan hingga berada di bawah 1% bahkan mendekati *zero growth*. Selain itu untuk tahun 2025, diharapkan penduduk dapat tersebar merata di semua wilayah, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja.

#### **b. Mobilitas Penduduk**

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penduduk, yaitu kematian, kelahiran, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Jumlah penduduk lahir pada tahun 2004 di Kabupaten Musi Rawas adalah sebanyak 556 jiwa, mati 191 jiwa, pindah 48 jiwa dan datang 182 jiwa di Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan pada data di atas maka pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran, pindah dan datang adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kematian, kelahiran, kedatangan dan kepindahan yang terlingkup dalam kategori tinggi yaitu, dengan jumlah penduduk  $>40$  jiwa. yaitu meliputi kecamatan dan Tugumulyo, Muara Beliti.
- 2) Tingkat kematian, kelahiran, kedatangan dan kepindahan yang terlingkup dalam kategori sedang yaitu, dengan jumlah penduduk 20 – 50 jiwa, yang meliputi Kecamatan Rawas Ulu, Selangit, Jayaloka, Muara Beliti dan Karang Jaya. Sementara itu, untuk Kepindahan Penduduk Kecamatan Tugumulyo terlingkup didalam kategori ini.
- 3) Tingkat kematian, kelahiran, kedatangan dan kepindahan yang terlingkup dalam kategori rendah yaitu, dengan jumlah penduduk  $>50$  jiwa, terlingkup dalam kategori ini, yaitu Kecamatan Muara Beliti, Muara Kelingi, Rawas Ilir, Karang Jaya, BTS Ulu, Muara Lakitan, Purwodadi, Rawas Ulu, Jayaloka.

Jika dilihat dari besarnya data yang datang ke kabupaten Musi Rawas dibanding data yang pindah menunjukkan bahwa kabupaten ini sudah merupakan daerah tujuan migrasi bagi penduduk yang akan mencari pekerjaan walaupun hanya pekerjaan sebagai buruh harian perkebunan. Melihat kondisi di atas, ada beberapa isu permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- 1) Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk yaitu 2,34% (hasil SDKI tahun 2005), akibat : banyaknya penduduk yang menikah di usia muda, angka pasangan subur yang aktif menjadi akseptor KB masih rendah, rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB dan masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB;
- 2) Angka harapan hidup di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2006 adalah 65 tahun, angka ini masih tergolong rendah bila dibandingkan

wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang rata-rata capaiannya berkisar 73 tahun;

- 3) Angka kematian ibu hamil dan bayi pada tahun 2004 masih tinggi yaitu mencapai angka 42 dari 1000 kelahiran hidup;
- 4) Masih tingginya ratio ketergantungan (dependency ratio), yaitu sebesar 71% dengan kategori tinggi;
- 5) Masih tingginya arus urbanisasi yang terjadi menuju kota-kota besar akibat kurangnya peminatan terhadap sektor pertanian dan perdesaan;
- 6) Kabupaten Musi Rawas berada di urutan ke 15 dari 15 kab/kota dalam indeks pembangunan manusia, 0% dengan kategori berat.

Dan pada periode 2005-2025 diharapkan Kabupaten Musi Rawas dapat mencapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Tingkat kelahiran penduduk dapat ditekan hingga mendekati 0% (*zero growth*) dengan meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya akseptor KB, meningkatnya peserta KB laki-laki, meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien dan membaiknya institusi daerah dalam pelaksanaan KB;
- 2) Meningkatnya Angka harapan hidup pada tahun 2025 adalah 75 tahun;
- 3) Angka kematian ibu hamil dan bayi menjadi minimal;
- 4) Berkurangnya arus urbanisasi menuju kota-kota besar dan masyarakat mulai tertarik terhadap sektor pertanian dan perdesaan;
- 5) Dalam indeks pembangunan manusia, Kabupaten Musi Rawas berada pada nomor urut 3 – 5 dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan;
- 6) Ratio ketergantungan (dependency ratio) yang seimbang dengan kategori sedang, yaitu diharapkan sebesar 35.

## 7. PENDIDIKAN

Secara keseluruhan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Musi Rawas berjumlah 457 unit, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SDN/S) berjumlah 410 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMPN/S) berjumlah 36 unit dan Sekolah Menengah Umum (SMUN/S) berjumlah 11 unit. Walaupun demikian, kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang makin ketat pada masa depan. Jika dilihat kondisi di lapangan, ada beberapa permasalahan berkaitan dengan bidang pendidikan, yaitu:

- a. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah hal ini terlihat dari masih terdapat masyarakat yang buta huruf (5%). Selain itu untuk saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI 96,5%, tingkat SLTP 86%, dan tingkat SLTA 57%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI 84,17%, SLTP 75%, dan tingkat SLTA 37%. Hal ini mengindikasikan masih ada anak usia sekolah yang belum bersekolah, sehingga angka ini masih perlu ditingkatkan;
- b. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Musi Rawas masih dihadapkan pada berbagai permasalahan: (a) kurangnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, (b) rendahnya kualitas pembelajaran, (c) kurangnya relevansi pendidikan (pengembangan kurikulum);

- c. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat. Selain itu, kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik;
- d. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan, hal ini terlihat dari lulusan sekolah menengah, SMA/MA dan SMK sekalipun, belum memiliki keterampilan yang memadai untuk masuk ke lapangan kerja. Tidak ada *link and match* antara pendidikan dengan lapangan kerja. Hal ini terjadi akibat keterbatasan fasilitas pelayanan pendidikan, seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium komputer, fasilitas perpustakaan, dan fasilitas alat peraga;
- e. Kebijakan pemerintah pusat untuk memperbanyak jumlah SMK daripada SMA perlu disikapi secara arif mengingat bidang keahlian harus sesuai dengan potensi daerah;
- f. Jumlah dan kualitas guru masih relatif rendah, masih terdapat kesenjangan tingkat jumlah guru antar wilayah kecamatan di semua jenjang pendidikan;
- g. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai, peran masyarakat dalam komite sekolah belum efektif. Sumbangan BOS hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar dengan dana yang sangat terbatas.

Selama periode 2005-2025, diharapkan kondisi sektor pendidikan di Kabupaten Musi Rawas dapat meningkat yang dicirikan sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat paling rendah setara SLTA dan tingkat melek huruf menjadi 99%. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat PAUD 70%, tingkat SD/MI 115%, tingkat SLTP 100%, dan tingkat SLTA 95%. Dan untuk angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat PAUD 65%, tingkat SD/MI 100%, SLTP 95%, dan tingkat SLTA 85%;
- b. Kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat berkurang diikuti dengan meningkatnya kualitas pendidikan. Dan mulai mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik;
- c. Fasilitas pelayanan pendidikan telah tersedia secara merata dan meningkatnya kualitas layanan pada setiap strata pendidikan;
- d. Pembangunan pendidikan telah mampu meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan, semua lulusan telah memiliki keterampilan yang memadai untuk masuk ke lapangan kerja;
- e. Tercukupinya jumlah dan meningkatnya kualitas guru serta meratanya jumlah guru di wilayah kecamatan;
- f. Pembangunan pendidikan dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Hal ini didukung dengan tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan yang memadai, seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium komputer, fasilitas perpustakaan, dan fasilitas alat peraga;
- g. Anggaran pembangunan pendidikan sudah tersedia secara memadai (>20%) dan aktifnya peran masyarakat dalam komite sekolah. Sumbangan BOS sudah menjangkau ke semua jenjang pendidikan dengan dana yang mencukupi;
- h. Adanya dukungan penuh pada model sekolah unggulan sampai pada kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

## 8. KESEHATAN

Ditinjau dari ketersediaan sarana kesehatan, puskesmas pembantu merupakan sarana kesehatan yang memiliki jumlah relatif besar dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Jumlah seluruh sarana kesehatan 381 unit, terdiri dari Rumas Sakit 1 unit, Puskesmas 22 unit, Pustu 143 unit dan Polindes 214 unit. Jika dilihat kondisi di lapangan, ada beberapa permasalahan berkaitan dengan bidang kesehatan, yaitu:

- a. Secara umum jumlah sarana kesehatan masih kurang dan persebarannya belum menjangkau seluruh daerah. Selain itu, secara kualitas fasilitas kesehatan terbilang masih buruk dan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Jumlah tenaga kesehatan masih kurang merata dan masih rendahnya kinerja SDM kesehatan. Berdasarkan rasio layanan, untuk 1 dokter melayani 10ribu jiwa. Untuk Kabupaten Musi Rawas, yang jumlah penduduknya 492.437 jiwa, memerlukan minimal 50 orang dokter. Dan rasio layanan untuk 1 paramedis melayani 5ribu jiwa, sehingga diperlukan minimal 100 orang paramedis. Jadi secara jumlah masih kurang dan kualitas masih rendah;
- c. Belum optimalnya upaya peningkatan kesehatan individu dan keluarga;
- d. Masih cukup tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kecamatan dan perdesaan;
- e. Masih tingginya angka kesakitan untuk kasus-kasus penyakit menular, seperti malaria, TB Paru, Diare, dan lain-lain. Hal ini tentunya dapat menjadi bencana yang berpotensi menjadi masalah luas pada kesehatan masyarakat.

Selama periode 2005-2025, diharapkan kondisi sektor kesehatan di Kabupaten Musi Rawas dapat meningkat yang dicirikan sebagai berikut:

- a. Secara umum jumlah sarana kesehatan sudah cukup dan persebarannya sudah menjangkau seluruh daerah. Selain itu, secara kualitas fasilitas kesehatan sudah memadai dan sudah dimanfaatkan secara optimal;
- b. Jumlah tenaga kesehatan sudah merata di semua wilayah dan mencukupi standar rasio layanan serta diikuti dengan membaiknya kinerja SDM kesehatan;
- c. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan;
- d. Hilangnya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kecamatan dan perdesaan melalui berbagai program kesehatan yang lebih memihak kepada golongan menengah bawah;
- e. Menurunnya angka kesakitan untuk kasus-kasus penyakit menular, seperti malaria, TB Paru, Diare, dan lain-lain.

## **9. SOSIAL BUDAYA**

Kabupaten Musi Rawas menghadapi beberapa permasalahan di bidang sosial budaya, yaitu:

- a. Masih tingginya sikap (norma) individualisme dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Rendahnya apresiasi terhadap produk budaya lokal dan banyak budaya lokal yang mulai menghilang;
- c. Belum adanya konsep, kebijakan, dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan kebudayaan daerah. Dan masih lemahnya ketahanan budaya daerah dalam menghadapi budaya asing;

- d. Media massa belum dimanfaatkan dalam upaya pembentukan watak dan jati diri daerah;
- e. Belum adanya pedoman dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang kebudayaan;
- f. Pembangunan harus dapat menjangkau seluruh strata sosial yang ada di masyarakat di seluruh pelosok wilayah kabupaten Musi Rawas tanpa dipengaruhi oleh pilihan partai politik masyarakat tersebut;
- g. Data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional dan hasil-hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal;
- h. Upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut, disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk itu diharapkan selama periode 2005-2025 kondisi adat istiadat, nilai, norma, dan budaya lokal di Kabupaten Musi Rawas, akan:

- a. Tumbuhnya sifat kebersamaan dalam diri masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
- b. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya;
- c. Meningkatnya apresiasi terhadap produk budaya lokal dan budaya lokal yang tadinya menghilang, mulai digali dan dikembangkan lagi;
- d. Adanya konsep, kebijakan, dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan kebudayaan daerah, sehingga ketahanan budaya daerah dalam menghadapi budaya asing semakin kuat;
- e. Media massa sudah dimanfaatkan dalam upaya pembentukan watak dan jati diri daerah;
- f. Adanya pedoman dan semakin menguatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang kebudayaan;
- g. Data dan informasi kebudayaan telah dikelola secara profesional dan hasil-hasil penelitian kebudayaan sudah dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal;
- h. Menguatnya jati diri dan rasa cinta tanah air dalam diri bangsa Indonesia.

## **10. KEHIDUPAN BERAGAMA**

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Musi Rawas menganut agama Islam. Pembangunan agama merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan iman dan moral masyarakat dan memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Untuk Kabupaten Musi Rawas, ada beberapa permasalahan pembangunan beragama yang dihadapi, yaitu:

- a. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari masih kurang memadai. Agama masih dipandang sebagai sumber ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta dibanding hubungan antar manusia;
- b. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial atau yang lebih dikenal dengan ritual belaka;
- c. Sarana dan prasarana ibadah belum optimal pemanfaatannya dan belum efektifnya pengelolaan dana sosial keagamaan;
- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan agama diikuti dengan kurangnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik.

Sehingga diharapkan pada periode 2005-2025 kondisi bidang agama di Kabupaten Musi Rawas telah :

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik;
- b. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat sudah sepenuhnya bersifat substansial. Dan perilaku masyarakat yang sudah sejalan dengan moralitas dan etika keagamaan;
- c. Sarana dan prasarana ibadah sudah optimal pemanfaatannya dan efektifnya pengelolaan dana sosial keagamaan;
- d. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik sudah membaik dan memuaskan seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan agama.

## 11. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa diselesaikan melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Secara garis besar, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas meliputi:

- a. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas masih tinggi yaitu sekitar 38,6% KK dan masih terdapat 117 desa tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat;
- b. Keberpihakan program pemerintah masih terbatas pada jargon-jargon atau *charity* semata, belum ada aksi nyata untuk memberantas kemiskinan;
- c. Lapangan kerja bagi penduduk miskin masih sangat marjinal sehingga tingkat pendapatan masyarakat relatif masih rendah;

- d. Terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, layanan perumahan, sanitasi, air bersih dan terhadap hak-hak penguasaan lahan, sumberdaya alam, serta lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.

Dan selama periode 2005-2025, diharapkan kondisi Kabupaten Musi Rawas dapat mencapai kondisi sebagai berikut:

- a. Proses pembangunan yang ada telah menyentuh golongan bawah dan kondisi ekonomi (pendapatan) masyarakat semakin membaik, sehingga dengan sendirinya jumlah penduduk miskin berkurang dan semua desa dapat melepaskan diri dari ketertinggalan;
- b. Program pemerintah telah nyata dilaksanakan terutama dalam pengentasan kemiskinan masyarakat yang merupakan salah satu 'momok' bagi daerah berkembang;
- c. Meningkatnya keterampilan masyarakat khususnya golongan menengah bawah, sehingga kesempatan kerja dan berusaha semakin terbuka bagi masyarakat miskin;
- d. Mudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi, dan air bersih, serta adanya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.

## **12. HUKUM DAN POLITIK**

### **a. Hukum**

Di Kabupaten Musi Rawas saat ini mempunyai kondisi penegakan hukum dan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sinergitas antar kelembagaan Pemkab Musi Rawas dengan lembaga hukum yang ada di Kabupaten Musi Rawas;
- 2) Tidak sebandingnya luas wilayah dengan ketersediaan aparat hukum serta masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di Kabupaten Musi Rawas;
- 3) Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan-peraturan tingkat pusat dan daerah;
- 4) Kurangnya independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta transparansi dan independensi peradilan;
- 5) Rendahnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dan peraturan;
- 6) Tingginya tingkat dan insiden tindak kriminalitas di wilayah Kabupaten Musi Rawas; dan adanya rasa kebanggaan melakukan tindak kriminal di suatu wilayah dalam Kabupaten Musi Rawas.

Selama periode 2005-2025, diharapkan kondisi penegakan hukum di Kabupaten Musi Rawas akan menjadi:

- 1) Tumbuhnya sinergitas antar kelembagaan Pemkab Musi Rawas dengan lembaga hukum yang ada di Kabupaten Musi Rawas;
- 2) Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat hukum sehingga pengawasan dan penegakkan hukum semakin tegas;
- 3) Semakin meningkatnya independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta transparansi dan independensi peradilan;

- 4) Terus ditingkatkannya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi dan independensi peradilan;
- 5) Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dan peraturan telah tinggi;
- 6) Timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan, dan menurunnya angka tindakan kriminalitas di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

#### **b. Politik**

Permasalahan-permasalahan mengenai politik di Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya potensi konflik antar kelompok di dalam masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik yang berbeda;
- 2) Belum terbangunnya tradisi dan budaya politik yang elegan di tingkat kader dan simpatisan partai politik;
- 3) Belum terbangunnya tradisi komunikasi dialogis antara partai politik dengan konstituen berdasarkan rencana program Parpol;
- 4) Tingginya potensi konflik akibat perbedaan jumlah pemilih dengan pemilih yang terdaftar, perbedaan perhitungan suara mulai dari tingkat TPS, KPPS, dan KPUD;
- 5) Belum tegasnya aturan perundangan tentang *sharing cost* yang harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden/Wapres dan Pemilihan Umum Gubernur/Wagub;
- 6) Tingginya pelanggaran terhadap aturan perundangan tentang penyelenggaraan Pemilu oleh Parpol, Calon Legislatif, dan pasangan Calon Kepala Daerah;
- 7) Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dari belum konsistennya tema kampanye dengan program nyata yang dilaksanakan pasca pemilu;
- 8) Adanya kesenjangan latar belakang pendidikan, pengalaman dan keterampilan anggota DPRD dengan tuntutan pelaksanaan fungsi-fungsi dewan sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Tidak transparannya penjurian calon kepala daerah dalam partai dan belum ditetapkannya secara permanen kriteria calon kepala daerah.

Selama periode 2005-2025, diharapkan kondisi politik di Kabupaten Musi Rawas telah:

- 1) Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menyikapi perbedaan pandangan politik yang akan menurunkan potensi konflik antar kelompok di dalam masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik yang berbeda;
- 2) Terbangunnya tradisi dan budaya politik yang elegan di tingkat kader dan simpatisan partai politik dikarenakan semakin baiknya tingkat pendidikan politik;

- 3) Tradisi komunikasi dialogis yang semakin baik antara partai politik dengan konstituen berdasarkan rencana program Parpol;
- 4) Potensi konflik akibat perbedaan jumlah pemilih dengan pemilih yang terdaftar, perbedaan perhitungan suara mulai dari tingkat TPS, KPSS, dan KPUD berkurang;
- 5) Aturan perundangan tentang *sharing cost* yang harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden/Wapres dan Pemilihan Umum Gubernur/Wagub telah dilaksanakan dan ditegakkan;
- 6) Pelanggaran terhadap aturan perundangan tentang penyelenggaraan Pemilu oleh Parpol, Calon Legislatif, dan pasangan Calon Kepala Daerah disebabkan oleh telah berlakunya sangsi yang tegas;
- 7) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin tinggi;
- 8) Berkurangnya kesenjangan latar belakang pendidikan, pengalaman dan keterampilan anggota DPRD dengan tuntutan pelaksanaan fungsi-fungsi dewan sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Transparansi penjangkaran calon kepala daerah dalam partai yang tinggi dan telah disusunnya peraturan yang permanen mengenai kriteria calon kepala daerah.

### 13. APARATUR DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Di bidang aparatur dan pemerintahan daerah pada Kabupaten Musi Rawas terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan latar belakang pendidikan, pengalaman dan keterampilan aparatur dengan tuntutan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok kedinasan sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya akan mengakibatkan buruknya pelayanan kebutuhan dasar (*basic service*) masyarakat;
- b. Belum tersusunnya prosedur standar rekrutmen dan pembinaan karir pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip *Merit System*;
- c. Rendahnya penerapan *Reward and Punishment System*;
- d. Belum tersusunnya Perda tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang mengatur batas kewenangan kabupaten dengan pusat dan provinsi dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan atas pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan;
- e. Belum terbangunnya kesadaran kolektif tentang arti penting struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan daerah yang disusun berdasarkan prinsip batas tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program antar SKPD yang berbeda;
- f. Rendahnya kesadaran untuk membangun basis data dan statistik perencanaan masing-masing SKPD dalam rangka memudahkan penyusunan rencana kerja tahunan yang terukur;
- g. Belum melembaganya tradisi kerja sama antar SKPD yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berbasis pengembangan wilayah system terpadu;

- h. Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain;
- i. Belum tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.

Selama periode 2005-2025, fungsi layanan pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas telah :

- a. Meningkatnya tingkat pendidikan dan disiplin aparatur, sehingga permasalahan kesenjangan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi kedinasan dapat diselesaikan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak terhadap membaiknya tingkat pelayanan kebutuhan dasar (*basic service*);
- b. Telah tersusun dan berjalannya prosedur standar rekrutmen dan pembinaan karir pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip *Merit System*;
- c. Telah diterapkannya *Reward and Punishment System*;
- d. Perda tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang mengatur batas kewenangan kabupaten dengan pusat dan provinsi dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan atas pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan telah berjalan;
- e. Kesadaran kolektif tentang arti penting struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan daerah telah terbangun;
- f. Kesadaran untuk membangun basis data dan statistik perencanaan masing-masing SKPD telah tercipta;
- g. Sudah melembaganya tradisi kerja sama antar SKPD yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berbasis pengembangan wilayah system terpadu;
- h. Tingkat koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain sudah semakin baik;
- i. Informasi setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik telah tersedia dengan lengkap.

#### 14. ANALISIS ISSU STRATEGIS

Perencanaan wilayah dimaksudkan untuk menghasilkan kemajuan wilayah secara komprehensif bersifat progresif dan redistributif. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu diidentifikasi potensi, kendala, peluang dan tantangan pengembangan wilayah.

##### a. Potensi Pengembangan sebagai Kekuatan

Dari hasil analisis yang dilakukan ternyata Kabupaten Musi Rawas memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan wilayah. Potensi-potensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Letak geografis Kabupaten Musi Rawas yang dilintasi jalan arteri primer yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional Bandar Lampung-Bengkulu-Palembang- Jambi dan Padang;
- 2) Lebih dari 70% wilayah Musi Rawas merupakan lahan datar, sehingga dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya secara optimal;
- 3) Tersedianya lahan produktif dengan luas lebih dari 1,2 juta Ha yang terdiri dari kawasan lindung utama TNKS, lindung setempat dan sumber air, perkebunan, pertanian dan kehutanan;
- 4) Adanya potensi lahan untuk reboisasi, menguatnya kewenangan pemerintah daerah, masih berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan

serta ketatnya pengawasan dari pihak luar sehingga besar peluang untuk mengembalikan luasan, peran dan fungsi TNKS;

- 5) Terdapatnya potensi sumberdaya alam seperti pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan perkebunan) dan terdapatnya potensi pertambangan seperti minyak bumi (75 juta barel), batubara (1.087 juta ton), emas (10 juta ton), perak (7,5 juta ton), biji besi (275 juta ton) yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modal dasar membangun pondasi masa depan Musi Rawas;
- 6) Terdapatnya sumber mata air/air baku yang menjadi hulu dari tiga sungai besar, yaitu Sungai Musi, Sungai Rawas dan Sungai Lakitan;
- 7) Tersedianya tenaga kerja produktif lebih kurang 277.350 jiwa;
- 8) Terdapatnya jaringan irigasi teknis sejumlah 23 daerah irigasi dan 2 buah bendungan yang mengairi lebih dari 22.000 Ha padi sawah;
- 9) Tersedianya infrastruktur (jalan dan listrik) yang telah menghubungkan dan melayani seluruh IKK;
- 10) Telah dibangunnya sebagian besar pusat pemerintah di Muara Beliti dan tersedianya lahan untuk pembangunan pusat agropolitan dalam skala yang cukup luas;
- 11) Terdapatnya instalasi pengolahan air bersih (untuk perkotaan);
- 12) Telah ditetapkannya (SK Bupati) pola pembangunan peranian melalui pendekatan agropolitan;
- 13) Terdapatnya potensi alam sebagai sumber energi alternatif seperti CPO dan Kelapa untuk biodiesel, perbedaan ketinggian aliran air sungai yang dapat dijadikan tenaga pemutar turbin (non konvensional) untuk pembangkit listrik.

#### **b. Kendala Pengembangan**

- 1) Persoalan yang dihadapi Kabupaten Musi Rawas saat ini adalah ketertinggalan wilayah dibanding dengan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, karena struktur perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian dan pertambangan sehingga pertumbuhan perekonomiannya masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar mampu mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera Selatan. Dengan demikian diperlukan upaya untuk melakukan transformasi struktur perekonomian melalui pengembangan sektor-sektor lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- 2) Kondisi alam disamping menjadi potensi dapat juga menjadi kendala dalam pengembangan wilayah jika tidak dikelola secara hati-hati, hal ini disebabkan karena kondisi topografi, hidrologi, tekstur tanah dan kedalaman efektif yang sangat rentan terhadap beberapa jenis bencana alam seperti : banjir dan longsor yang pada gilirannya akan mempengaruhi aktifitas perekonomian dan kondisi lingkungan;
- 3) Letak geografis wilayah juga menjadi kendala tersendiri, dimana berada diantara daerah-daerah yang perkembangannya relatif sama dan berbasis pada sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan tingkat kompetisi produk-produk pertanian dengan wilayah sekitarnya menjadi tinggi. Disamping itu aksesibilitas pemasaran ke daerah-daerah yang lebih maju jauh, sehingga harga produk-produk pertanian yang dihasilkan menjadi lebih mahal dan sampai saat ini hanya dapat

dipasarkan ke daerah-daerah yang dihubungkan oleh jalur regional Sumatera;

- 4) Terjadinya penurunan luas hutan/kawasan lindung dan beralih menjadi perkebunan (karet dan sawit) atau dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya;
- 5) Terdapatnya beberapa kawasan yang rawan banjir/genangan dan longsor;
- 6) Secara geografis mempunyai akses yang rendah pada pelabuhan laut, jarak tempuh yang lebih dari 6 jam ke pusat ibukota provinsi (PKN);
- 7) Terjadinya penurunan luas areal pertanian dan penurunan debit air sungai/irigasi;
- 8) Terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan desa tertinggal;
- 9) Belum optimalnya tingkat produktivitas lahan, terutama kawasan dengan fungsi perkebunan karet dan tanaman lahan kering lainnya;
- 10) Kualitas SDM yang masih lemah, baik SDM pemerintah (*good governance*), masyarakat (*civil society*) dan swasta (*good corporate governance*);
- 11) Kuantitas penduduk yang rendah, dimana wilayah dengan luas lebih dari 1,2 juta Ha hanya dihuni oleh 490.000 jiwa lebih;
- 12) Ketersediaan infrastruktur yang belum menunjang peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
- 13) Belum terbangunnya sistem ekonomi wilayah yang berbasis kapasitas lokal;
- 14) Kapasitas keuangan daerah untuk pembangunan infrastruktur yang memadai masih terbatas. Diperlukan upaya dan investasi yang besar untuk menciptakan Muara Beliti sebagai pusat pemerintahan dan pusat agropolitan, namun bersamaan dengan itu pelayanan publik tetap harus dilakukan dengan baik dan program pembangunan kawasan agropolitan tetap harus dijalankan;
- 15) Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam membangun pusat pemerintahan di Muara Beliti yang pada gilirannya akan berdampak terhadap pelemahan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik;
- 16) Terdapatnya ribuan penduduk yang berada dalam kawasan TNKS yang mengandalkan matapencariannya pada hutan TNKS. Hal ini menyebabkan terjadinya perambahan hutan (*illegal logging*).

### **c. Peluang**

- 1) Terdapat peluang pengembangan produk-produk pertanian dengan memanfaatkan luas areal yang masih cukup tersedia melalui ekstensifikasi dan peningkatan produk melalui intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Peluang pasar produk-produk ini akan semakin besar terutama jika dikaitkan dengan semakin berkurangnya areal irigasi teknis di beberapa daerah, sehingga dengan demikian daerah ini dapat menjadi pemasok bagi kebutuhan berbagai wilayah, baik untuk kebutuhan internal Sumatera Selatan maupun daerah lainnya;
- 2) Hasil ternak di wilayah ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lainnya dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan dengan tersedianya areal untuk pengembangan hijauan makanan ternak. Hasil-

hasil peternakan ini sudah memiliki pasar yang jelas, antara lain Kota Lubuklinggau, Palembang, Bengkulu dan kota-kota lainnya;

- 3) Terdapatnya kelompok permukiman diluar Kabupaten Musi Rawas yang secara tradisional telah dilayani oleh pusat permukiman di Musi Rawas;
- 4) Masih besarnya peluang pasar bagi produksi mentah atau derivasi (turunan) dari sawit, karet dan kelapa yang merupakan komoditas dengan produksi yang cukup tinggi;
- 5) Dengan meningkatnya produk-produk pertanian maka memungkinkan untuk menjalin keterkaitan dengan sektor industri lokal melalui kegiatan agroindustri dan agrowisata sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian wilayah. Produk-produk industri kecil lainnya yang sudah berkembang perlu terus digalakkan terutama untuk mendukung ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan bahan baku lokal;
- 6) Tersedianya ragam sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi akan menjadi daya tarik bagi masuknya investasi dari luar;
- 7) Terdapatnya kebijakan pengembangan wilayah provinsi (RTRW Prov. Sumsel 2006) yang memerankan Musi Rawas sebagai salah satu sumber utama pangan dan energi;
- 8) Tersedianya akses darat yang memadai (Jalur Lintas Tengah Sumatera) menuju Musi Rawas dari 4 arah, yaitu Utara (Jambi), Palembang (Timur), Lahat (Selatan) dan Rejang Lebong (Barat);
- 9) Terdapatnya berbagai program nasional dan internasional dalam menguatkan fungsi kawasan lindung, terutama TNKS, serta menjadi peluang bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan kegiatan *ecotourism*, serta peluang menciptakan event-event pariwisata dengan mengkaitkan objek wisata lainnya di Musi Rawas dan daerah sekitarnya.

#### **d. Ancaman**

- 1) Hampir seluruh kabupaten di sekitar Musi Rawas mempunyai hasil pertanian/perkebunan dengan jenis komoditas yang sama, bahkan pengelolaannya lebih maju dari Musi Rawas, seperti agropolitan di Kabupaten Rejang Lebong dan Musi Banyuasin yang sudah mengolah Sawit dengan *by product* berupa energi listrik (6 MW);
- 2) Musi Rawas mempunyai potensi alam yang sangat besar yang bila salah dalam pengelolaannya akan menjadi bencana bagi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial;
- 3) Pengembangan wilayah pertanian/perkebunan dengan pendekatan agropolitan menuntut perubahan pola kerja dan kinerja petani kearah yang lebih efektif, efisien, produktif (industrial) serta tersedianya infrastruktur dan suprastruktur yang memungkinkan kegiatan agropolitan berlangsung dengan baik;
- 4) Dalam pengembangan wilayah diperlukan adanya strategi pembangunan dengan skala prioritas (kawasan strategis), namun pada sisi lain juga harus dilakukan pemerataan pembangunan/ pengembangan wilayah, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tidak terjadi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah ataupun ketidakadilan sosial antar masyarakat pada wilayah yang berbeda (misal kecamatan);

- 5) Tanpa adanya komitmen para pihak, sulit mewujudkan tata ruang yang mandiri secara pangan dan energi dalam konteks lokal maupun regional yang berkelanjutan;
- 6) Tersedianya tenaga kerja dari luar dalam kuantitas dan kualitas yang cukup tinggi untuk mengisi peluang ekonomi yang bertumbuh di Musi Rawas.

### **BAB III**

## **VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN**

### **A. VISI PEMBANGUNAN**

Visi adalah sebuah cita-cita ke depan atau suatu angan-angan luhur sebagai arah dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, maka visi berarti angan-angan luhur dari suatu lembaga pemerintahan yang menjadi arah dan tujuan utama dari pemerintahan sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Berpijak pada kondisi dan potensi Kabupaten Musi Rawas serta dengan memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi sampai tahun 2025 serta memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 dan Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, maka Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005–2025 adalah: “Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius”.

1. Kabupaten Musi Rawas yang maju memiliki arti bahwa tingkat kemakmuran masyarakat daerah ini relatif lebih baik dari daerah-daerah lainnya yang tercermin pada tingginya tingkat pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkembangnya lembaga dan pranata sosial kemasyarakatan yang ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban, menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya, hak-hak warga, keamanan dan ketenteraman terjamin dalam kehidupannya, tersedianya infrastruktur yang maju, kemandirian daerah yang tinggi tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan aparatur pemerintahan daerah yang baik, berkembangnya pemanfaatan sumberdaya lokal serta berkurangnya ketergantungan sumber daya dari daerah lain, sekaligus kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.
2. Kabupaten Musi Rawas yang sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, sehingga setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang sejahtera yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan daya beli serta pemerataan pendapatan, meningkatnya derajat kesehatan sesuai dengan standar, meningkatnya derajat pendidikan serta tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan religius.
3. Kabupaten Musi Rawas yang religius memiliki arti bahwa setiap kegiatan ekonomi dan sosial serta pemerintahan dan kemasyarakatan selalu dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, santun dan beretika tinggi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya,

mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa

## **B. MISI PEMBANGUNAN**

Misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam masa 2005-2025, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah adalah pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah dengan rincian sebagai berikut: pembangunan sumber daya manusia; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif pada sektor-sektor ekonominya; terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang handal dan terintegrasi; terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, terwujudnya Musi Rawas sebagai *Cyber District* melalui pengembangan sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktivitas; dan terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang aman, nyaman dan damai.
2. Mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan di setiap kawasan dan pelosok wilayah; kabupaten tanpa memandang suku, etnik dan ras, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
4. Mewujudkan *"Good Governance"* yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparatur, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik, demokratis, menjamin kebebasan berpendapat, memperkuat peran masyarakat sipil, dan mengarahkan setiap program pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat.
5. Mewujudkan masyarakat religius adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kabupaten Musi Rawas melalui berbagai program pendidikan dan keagamaan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

## C. ARAH PEMBANGUNAN

Untuk mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas sebagai “Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius” misi Pembangunan Jangka Panjang, maka arah pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Daya Saing Kabupaten Musi Rawas.
  - a. Kualitas SDM yang terus meningkat dengan ditandai oleh meningkatnya nilai IPM.

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks yang menjelaskan tentang keberhasilan pembangunan suatu daerah yang berkenaan dengan kualitas SDM. Semakin tinggi angka IPM suatu daerah menunjukkan kualitas kehidupan sosial ekonomi daerah yang bersangkutan tinggi. Lebih lanjut, bahwa IPM terdiri dari beberapa komponen antara lain: indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat yang diukur dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP). Untuk itu, dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Rawas yang berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah:

### 1) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar: *pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar *output*-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan daerah, setiap warga daerah berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga daerah tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya selama 9 tahun. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tersebut, arah pembangunan akan dilaksanakan sebagai berikut:

### a. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran;

- 2) Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja (*market friendly*);
- 3) Meningkatkan layanan pendidikan keterampilan bagi Anak Luar Biasa agar dapat hidup mandiri; dan
- 4) Mengintrodusir model sekolah unggulan di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

b. Kebijakan Pemerataan Pendidikan

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dengan :

- 1) Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta persiapan untuk wajib belajar 12 tahun;
- 2) Peningkatan sarana prasarana;
- 3) Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah;
- 4) Peningkatan akses pendidikan formal, yang terjangkau.

2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sehingga usia harapan hidup (*life expectancy*) masyarakat meningkat.

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan, haruslah menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit.

Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan, seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit. Dalam upaya terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat, arah pembangunan kesehatan antara lain berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan di Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah tertinggal; pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit;
- b. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, melalui pencegahan dan penanggulangan faktor resiko, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah berbagai penyakit termasuk flu burung; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
- c. Peningkatan ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan obat generik, pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);
- d. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin;
- e. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat;
- g. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan;
- h. Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

### 3) Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan agenda penting dalam mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi daerah. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk. Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program KB. Sehingga dengan pengendalian ini, ke depan akan terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi. Agar pengendalian pertumbuhan penduduk bisa terwujud

serta peningkatan keluarga kecil yang berkualitas, maka arah pembangunan jangka panjang meliputi:

- a. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang;
  - b. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja;
  - c. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
- b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga PDRB per kapita mencapai di atas US\$ 7,000.

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi daerah untuk bisa memberikan pelayanan optimal dan upaya mensejahterakan bagi masyarakat. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar, yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan penjelasan di atas, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Rawas yaitu berkenaan dengan tercapainya pendapatan per kapita masyarakat minimal US\$ 7,000 = Rp 66.500.000,00 (asumsi US\$ 1 = Rp 9.500,00) adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah) melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan;
- 2) Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada;
- 3) Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal;
- 4) Pengembangan potensi wilayah baik pada daerah aliran sungai, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah potensial lainnya dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- 5) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan meningkatkan peluang bagi kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya.

c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

Struktur perekonomian daerah lazim dibedakan menjadi 9 sektor ekonomi yang tertuang dalam PDRB masing-masing daerah, yakni mulai sektor pertanian sampai sektor jasa. Lebih lanjut, berkenaan dengan pembangunan ekonomi jangka panjang di Kabupaten Musi Rawas sehingga terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh, maka sektor pertanian diharapkan menjadi basis aktivitas kegiatan ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan dan manufaktur diarahkan sedemikian rupa hingga memiliki daya saing global. Untuk sektor jasa diharapkan dapat memberikan layanan publik yang bermutu dan berkualitas. Sejalan dengan pemikiran di atas, maka arah pembangunan jangka panjang bisa dirinci sebagaimana di uraian di bawah ini.

1) Revitalisasi Pertanian

Pembangunan pertanian mencakup sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Musi Rawas selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan daerah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang Pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai *multiplier effect* yang besar, karena di sektor ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Musi Rawas menggantungkan hidupnya.

Selain itu mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar, sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat, sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap guncangan ekonomi. Pada masa krisis, pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis, begitu pula sektor ini masih dapat menjadi penopang untuk tidak menjadikan krisis ekonomi berkelanjutan. Pembangunan di Bidang Pertanian ke depan menghadapi masalah antara lain semakin terbatas dan menurunnya daya dukung lahan dan kelangkaan sumber daya alam pertanian ditengah kondisi adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan pangan.

2) Peningkatan Investasi dan Perdagangan

Kinerja investasi selama lima tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini menjadi salah satu faktor masih tingginya angka pengangguran. Sejalan dengan pemahaman di atas, dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi dan perdagangan, maka pembangunan jangka panjang diarahkan pada upaya:

- a) Menjamin kepastian usaha, menjaga hak kepemilikan terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik di bidang investasi;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing;
- c) Penyederhanaan sistem dan prosedur;

- d) Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.

### 3) Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting karena di samping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata.

Kabupaten Musi Rawas cukup banyak memiliki potensi obyek pariwisata baik wisata alam, wisata agro maupun wisata budaya yang apabila dikelola dengan manajemen yang baik akan turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Untuk mendukung pengembangan potensi wisata, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Sebab dengan baiknya tingkat aksesibilitas suatu kawasan akan menambah daya tarik wisata yang bersangkutan. Sementara itu, untuk “mengikatkan” antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan obyek wisata dirasa perlu untuk menumbuhkembangkan produk-produk wisata yang terkait dengan UMKM yang ada di daerah-daerah tujuan wisata.

Sehingga untuk meningkatkan peran pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas, maka arah pembangunan sektor Pariwisata dalam 20 tahun yang akan datang adalah:

- a) Meningkatkan dan menumbuhkan kembali potensi pariwisata yang bersumber pada potensi alam dan budaya yang berwawasan lingkungan serta pelestarian budaya, sebagai aplikasi dari Konsep *Ecotourism*;
- b) Meningkatkan kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan diversifikasi produk pelayanan pariwisata yang memenuhi standar pelayanan, berdaya saing serta memenuhi rasa aman dan nyaman;
- c) Memberdayakan pengembangan pemasaran pariwisata terpadu agar tepat sasaran dan efisien serta menggalang peran serta masyarakat dengan cara memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan pariwisata, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha pariwisata yang kooperatif dan dinamis;
- d) Meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan; Meningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaan Pariwisata di Kabupaten Musi Rawas.

### 4) Peningkatan Daya Saing Industri

Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Musi Rawas didukung oleh tiga sektor besar, yakni sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian serta sektor industri. Sektor industri diarahkan untuk menjadi sektor yang kompetitif dalam rangka penciptaan struktur ekonomi yang seimbang melalui processing produk-produk agro dan turunannya serta terwujudnya kerjasama maupun kemitraan antar sub-sektor industri. Perkembangan sektor industri tersebut menggambarkan upaya keras Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menarik investor baru melalui penyederhanaan proses perijinan, peningkatan pelayanan perijinan,

adanya perencanaan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Pertumbuhan investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap selama kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi perekonomian mulai membaik dan iklim dunia usaha secara bertahap sudah mendukung pengembangan dunia usaha termasuk pengembangan industri informal. Dalam rangka perwujudan meningkatnya daya saing industri, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan sektor Industri adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri dalam rangka pengembangan rantai nilai untuk membentuk industri-industri yang kuat, meningkatkan nilai tambah dari setiap produk yang dibuat baik pada industri ataupun pada rantai nilainya, memperpanjang rantai nilai baik dengan meningkatkan inovasi maupun penguasaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai nilai untuk meningkatkan keseluruhan produktivitas;
  - b) Mengembangkan IMKM agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan IMKM yang mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan;
  - c) Mendorong investasi baru yang diarahkan pada industri yang berorientasi ekspor.
- d. Terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang handal dan terintegrasi

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, fungsi pelayanan umum transportasi harus dilakukan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat luas, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional. Kabupaten Musi Rawas juga akan mendukung transportasi antar wilayah yang akan membuka peluang terjadinya perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah melalui pembangunan jalur bebas hambatan.

Dengan adanya pemerataan keterampilan dan keahlian, maupun biaya antar wilayah, maka akan mendorong terciptanya kesamaan kesempatan pembangunan wilayah. Sejalan dengan gambaran di atas, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan transportasi adalah :

- 1) Penanganan ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala;
- 2) Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;
- 3) Mendukung sistem jaringan jalan lintas yang mendukung kebutuhan industri;
- 4) Membangun sistem jaringan jalan yang mendukung Kawasan Strategis Potensial;
- 5) Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan;

- 6) Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan;
- 7) Membangun sistem transportasi baik darat dan kereta api dan angkutan sungai.

e. Terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih

Untuk menunjang pengembangan industri dan pertumbuhan investasi serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka diperlukan ketersediaan energi listrik yang cukup. Dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, diperlukan alternatif pilihan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi listrik. Pembangunan di bidang sumberdaya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumberdaya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air. Potensi volume air yang cukup melimpah berupa sungai dan mata air, merupakan keunggulan dalam rangka peningkatan volume dan kualitas produk pertanian serta kualitas hidup masyarakat dalam bentuk penyediaan air bersih. Potensi tersebut juga merupakan peluang bagi terciptanya peningkatan pendapatan daerah sendiri melalui kerjasama investasi/ pengelolaan sumber air dengan daerah lain.

Sementara itu, berkenaan dengan terwujudnya pasokan air yang cukup dan layak, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan persoalan di atas adalah:

- 1) Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan;
- 2) Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;
- 3) Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;
- 4) Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

f. Terwujudnya Musi Rawas *Cyber District*

Arah kebijakan untuk terwujudnya Musi Rawas *Cyber District* antara lain:

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah:

- 1) Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk pemeratakan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek;
- 2) Meningkatkan peran media massa dan *cyber-media* yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif;

- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan media telekomunikasi dan informasi sehingga dalam aspek pelayanan publik sudah tidak perlu lagi temu muka antara pelayan dan yang terlayani;
- 4) Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi.

g. Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang aman, tertib dan damai

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, Kabupaten Musi Rawas memerlukan kemampuan pertahanan daerah yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya eksisnya daerah Kabupaten Musi Rawas. Demikian pula adanya gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horizontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting terlaksanannya pembangunan berbagai bidang dan merupakan salah satu daya saing yang harus terjaga.

- 1) Keamanan dan ketertiban daerah diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam daerah dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografis, demografi, sosial dan budaya serta berwawasan nusantara;
- 2) Sistem dan strategi pertahanan daerah secara terus menerus disempurnakan untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta berdasarkan kapabilitas pertahanan agar secara simultan mampu mengatasi ancaman dan memiliki efek penggentar. Dalam sistem pertahanan semesta tersebut, pertahanan daerah akan didesain untuk mempunyai kemampuan menangkal ancaman diwilayah tertular Kabupaten Musi Rawas dan kemampuan untuk mempertahankan wilayah daratan, serta mengawasi dan melindungi wilayah ruangan udara daerah;
- 3) Pemantapan komponen cadangan dan dukungan pertahanan daerah dalam kerangka basis strategis teknologi dan pembiayaan terus ditingkatkan dalam proses yang bersifat kontinyu maupun terobosan. Peningkatan kemampuan komponen dukungan pertahanan tersebut meliputi penguasaan kemampuan pemanfaatan kondisi SDA dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana daerah terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan, komponen bela daerah masyarakat, dukungan mutualisme industri strategis secara langsung maupun kemampuan konversi industri, serta keberlanjutan pembiayaan melalui rekayasa keuangan;
- 4) Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

2. Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen di Kabupaten Musi Rawas akan mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan juga akan mengurangi gangguan keamanan serta

menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Musi Rawas yang maju pada berbagai bidang. Perekonomian daerah yang kuat merupakan keniscayaan dalam era desentralisasi ekonomi, karena daerah telah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola pembangunan secara relatif mandiri. Penguatan ekonomi daerah itu baru bermakna apabila seluruh masyarakat terlibat dalam kegiatan perekonomian. Di sinilah urgensinya dikembangkan perekonomian yang berbasis kerakyatan yang memiliki dua dimensi, *pertama*, orientasi pembangunan ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, faktor produksi dan aset produktif dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Dengan jalan ini diharapkan pemerataan dan keadilan pembangunan dapat dicapai.

a. Tingkat pembangunan semakin merata diseluruh wilayah

- 1) Mengoptimalkan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), dengan memberdayakan potensi dari setiap kecamatan yang tetap memfokuskan pada aktivitas di SWP tersebut.
- 2) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
- 3) Pertumbuhan Kabupaten Musi Rawas dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan Agropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan, melalui: (1) Penerapan manajemen perkotaan untuk pengembangan Agropolitan dan kawasan pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga disekitarnya dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota kecil disekitar agropolitan agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kota satelit tetapi dapat menjadi kota mandiri; (2) Pengembangan ekonomi perkotaan di kawasan Agropolitan yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dan lain-lain; serta peningkatan kemampuan keuangan daerah agropolitan; dan (3) Pengembangan kawasan agropolitan melalui peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transformasi massal yang terintegrasi antar moda.
- 4) Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan tertinggal dan terpencil sehingga kawasan-kawasan tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung, termasuk jaminan pelayanan publik dan keberintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan-kawasan cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
- 5) Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal mata rantai industri, tahap produksi antara, tahap akhir produksi, sampai tahap konsumsi, serta perlu didukung, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas

orang, barang dan jasa antar kota/kawasan disekitar Kabupaten Musi Rawas.

- 6) Tidak meratanya sarana dan prasarana, menyebabkan penyebaran penduduk di Kabupaten Musi Rawas tidak merata, di mana penduduk lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat yang telah berkembang, agar perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah-wilayah di mana kepadatan penduduk rendah, agar wilayah tersebut nantinya dapat menyerap tenaga kerja;
- 7) Terdapat keluarga pra-sejahtera pada daerah pertanian, sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat petani agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
- 8) Peningkatan pembangunan suatu wilayah dimungkinkan, jika ada akses pada wilayah tersebut. Artinya, perlu adanya pemberdayaan pada wilayah yang tertinggal di Kabupaten Musi Rawas.
- 9) Pembangunan ekonomi wilayah akan lebih efisien dengan kerjasama antar daerah, terutama daerah yang saling berdekatan.
- 10) Pemerintah daerah lebih menekankan dan mempercepat pemberdayaan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang.
- 11) Mengoptimalkan wilayah-wilayah potensial untuk lebih berdaya, yang nantinya dapat membantu wilayah lain yang kurang berpotensi.
- 12) Percepatan pembangunan kawasan-agropolitan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah disekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kawasan masing-masing.
- 13) Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di Agropolitan center dengan hinterland didorong secara sinergis yang memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktifitas ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di agropolitan center.
- 14) Pembangunan pedesaan didorong melalui: pengembangan akropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; peningkatan kapasitas SDM dipedesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dikawasan pedesaan dan kota-kota kecil dalam upaya menciptakan keterkaitan sektor sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *sosial capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
- 15) Memanfaatkan Rencana Tata Ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.
- 16) Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan land reform, serta penciptaan insentif/disinsentif

perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penerapan peraturan perundang-undangan pertanahan di daerah dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*; selain itu perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanahan.

- 17) Pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat, kelembagaan; keuangan pemda termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan; penguatan lembaga legislative; Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan melalui: peningkatan pengetahuan dan ketrampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
  - 18) Peningkatan kerja sama dengan daerah-daerah lain dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun pembangunan lainnya.
  - 19) Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.
  - 20) Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung dengan peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
  - 21) Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya pewujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin
- b. Terwujudnya Kemandirian pangan
- 1) Mengoptimalkan dan mengembangkan lahan pertanian sebagai penghasil tanaman pangan dan melengkapinya dengan infrastruktur, misalnya saluran irigasi dan bendungan untuk meningkatkan hasil tanaman pangan.

- 2) Mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang sebagian sudah menghasilkan dan berperan penting dalam meningkatkan PDRB, seperti misalnya sektor pertanian, sektor tanaman perkebunan dan perikanan merupakan sumber daya alam yang potensial untuk dioptimalkan.
  - 3) Mengembangkan pengolahan hasil sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempunyai kualitas gizi yang baik dan ramah lingkungan, seperti subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan perikanan yang meningkat dapat diberdayakan dengan melakukan pengolahan, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik.
  - 4) Kegiatan-kegiatan sosialisasi informasi pada makanan bergizi, kesehatan masyarakat, dan penyuluhan pertanian dilakukan dengan melibatkan instansi/dinas terkait, misalkan Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan pangan yang memadai.
  - 5) Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman merata dan terjangkau.
  - 6) Koperasi di dorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisien kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen diberbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.
- c. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
- 1) Dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja pada pembangunan perumahan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduk rendah, menuju wilayah mandiri.
  - 2) Bekerjasama dengan sektor swasta (misalnya: investor/para pengembang) agar dapat membiayai terlaksananya pembangunan perumahan yang memadai.
  - 3) Melakukan perbaikan pada sarana transportasi untuk menarik investor/pengembang datang ke Kabupaten Musi Rawas.
  - 4) Melakukan relokasi pada rumah-rumah yang berada di tepi sungai, perbukitan atau kawasan peyangga TNKS, dengan memberikan penyediaan sarana dan prasarana.
  - 5) Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada: Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien; mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan swasta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan dan penyebaran

pembangunan; serta memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

### 3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang Asri dan Lestari

Pembangunan yang menyejahterakan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan yang dapat dilihat dari pendapatan per kapita, sedangkan kualitas hidup ditentukan oleh faktor yang lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Sungguh pun begitu, tidak selamanya proses pembangunan yang menyejahterakan rakyat diikuti dengan kesinambungan proses pembangunan itu sendiri akibat terjadinya kerusakan lingkungan. Inilah yang banyak terjadi di daerah terbelakang. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara merusak lingkungan, seperti eksploitasi pertambangan, minyak, hutan, dan lain-lain. Model pembangunan seperti ini harus dicegah sehingga hasil pembangunan yang dinikmati hari ini tidak akan mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang berdaya saing, sejahtera dan mandiri, SDA dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

- a. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
- b. Pendayagunaan SDA yang terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, serta diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
- c. Dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, sangat perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya berorientasi ekonomi semata tetapi juga mengarah pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- d. Di dalam memelihara kekayaan dan keragaman SDA untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing masyarakat sangat memerlukan kebijakan pengelolaan SDA yang didukung oleh peningkatan kelembagaan SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang

semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

- e. Menjaga dan melestarikan sumber daya air sangat penting untuk menunjang kehidupan dan keberlanjutan pembangunan. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Dengan demikian pengelolaan sumber daya air ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- f. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat akan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kehidupan. Fokus kebijakan ini dapat diarahkan kepada generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyediakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, jaminan sosial, dan lain-lain sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam (sebagai cara untuk menambah pendapatan).
- h. Mendayagunakan SDA yang terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkan kembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
- i. Mengelola SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomasa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus sungai, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan. Disamping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakat dengan demikian pembangunan energi terus diarahkan kepada penganekaragaman energi, konservasi energi, dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan

dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimum bagi tiap jenis energi.

- j. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas. Diversifikasi produk dan inovasi pengelolaan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Arahannya harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis SDA, disamping tetap menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang ada di wilayahnya. Dengan demikian pembangunan kedepan tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.
- k. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap wilayah. Kebijakan pengembangan SDA yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah secara berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi ditingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas SDA. Pengelolaan SDA terutama di kawasan tertinggal diberikan perhatian khusus agar dapat dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan kawasan, namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu diperlukan tata ruang yang mantap disertai penegakan hukumnya untuk menjadi pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
- l. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
- m. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan, sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- n. Meningkatkan kapasitas pengolahan SDA dan lingkungan hidup. Kebijakan pengolahan SDA perlu di dukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan peraturan lingkungan hidup yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan, etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasikan dalam kegiatan produksi

dan konsumsi, dan menanamkan nilai etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

#### 4. Mewujudkan *"Good Governance"*

Kabupaten Musi Rawas yang demokratis merupakan landasan yang sangat penting di dalam perwujudan pembangunan yang lebih maju, berdaya saing, sejahtera, dan mandiri. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah transparansi kebijakan. Hukum sendiri pada dasarnya akan memastikan munculnya aspek-aspek keadilan dan kebersamaan. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi setiap anggota masyarakat secara menyeluruh. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur daerah melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara daerah terhadap prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang baik. Dengan memiliki tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelayanan publik akan semakin efisien dan pembiayaan pembangunan tidak lagi hanya dipikul oleh kemampuan keuangan pemerintah sendiri, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat.
- b. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (a) mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan daerah secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa lokal yang independen; (c) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas untuk memudahkan proses sosialisasi dan transparansi kebijakan.
- c. Memfasilitasi dan menjalin kemitraan yang baik dengan berbagai organisasi dan lembaga profesi hukum dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan pelaksanaan pembangunan sektor hukum dapat berkembang dengan menunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh kondisi daerah yang baik agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

- d. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses terhadap pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga daerah serta terbentuk perilaku warga Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam kerangka *good and clean governance* yang mendukung akselerasi pembangunan daerah, yaitu: meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif; meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola remunerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi; meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah; meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab; mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik; meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.

## 5. Mewujudkan Masyarakat yang Religius

Mewujudkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui berbagai program yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kedaerahan.

- a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.

Disamping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

- b. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kerukunan antar umat beragama; Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak.
- c. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.
- e. Menciptakan program menuju Musi Rawas Darussalam.
- f. Pembangunan dan pementapan jati diri masyarakat ditunjukan untuk mewujudkan karakter bangsa yang merupakan kombinasi antar nilai-nilai luhur seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern untuk pembangunan.
- g. Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kabupaten Musi Rawas menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global yang dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersama dengan pengarahannya budaya konsumtif budaya produktif. Bentuk- bentuk pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia.

## **BAB IV**

### **PERIODESASI PEMBANGUNAN**

Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode sebelumnya, pembangunan daerah jangka panjang ini diprioritaskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi **“Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius”**. Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan dengan implementasi lima misi pembangunan selama 20 tahun, sebagai berikut :

Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah

1. Mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan
2. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari
3. Mewujudkan *“Good Governance”*
4. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang religius

Lebih lanjut, untuk terwujudnya kehendak-kehendak luhur di atas, akan diuraikan pentahapan implementasi dari arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Rawas yang dibagi menjadi empat tahap pembangunan jangka menengah, yaitu Tahap Pertama 2005-2010, Tahap Kedua 2011-2015, Tahap Ketiga 2016-2020, Tahap ke empat 2021-2025.

#### **A. RPJM Kabupaten Musi Rawas PERTAMA (2005 – 2010)**

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam periode sebelumnya, RPJM Kabupaten Musi Rawas periode pertama (2005-2010) ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta merintis daerah ini menuju Musi Rawas Darussalam, pembangunan infrastruktur wilayah dan merintis pembangunan infrastruktur strategis termasuk untuk mempersiapkan Musi Rawas sebagai lumbung pangan Sumatera Selatan, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan pembangunan agroindustri yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Musi Rawas. Pada tahapan ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 70 pada tahun 2010. Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan pertama ini menyangkut berbagai urusan yang telah menjadi kewenangan daerah, adalah :

##### **1. Bidang Pendidikan**

Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan merintis berkembangnya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung target tersebut dilakukan melalui pembagian peran (*Role Sharing*) pendanaan antara Pusat, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas dalam rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

APK (Angka Partisipasi Kasar) tingkat SD/MI sebesar 96,5%, tingkat SLTP sebesar 86%, tingkat SLTA sebesar 57%. Sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) tingkat SD/MI sebesar 84,17%, tingkat SLTP sebesar 75%, dan tingkat SLTA sebesar 37%.

Pemberantasan buta aksara juga menjadi target yang tak kalah pentingnya, melalui pengembangan pendidikan keaksaraan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terutama untuk daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses pendidikan formal. Program Pendidikan Non Formal yang diprioritaskan bagi penduduk yang tidak mendapat pendidikan formal, Program Pendidikan Penyuluhan Pemuda dan Olahraga serta Pendidikan Luar Sekolah, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, serta peningkatan program pendidikan keagamaan untuk mendukung Musi Rawas Darusalam.

Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan SDM, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran. Program peningkatan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja (*market friendly*). Program peningkatan layanan pendidikan ketermapilan bagi Anak Luar Biasa agar dapat hidup mandiri. Serta mulai dirintis berdirinya Universitas Musi Rawas.

Program Kebijakan Pemerataan Pendidikan melalui upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dengan :

- a. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta persiapan untuk wajib belajar 12 tahun;
- b. Peningkatan sarana prasarana.
- c. Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah.
- d. Peningkatan akses pendidikan formal, yang terjangkau.

Untuk memfasilitasi peningkatan wajib belajar minimal 15 tahun pada tahun 2025, maka pada periode ini mulai dirintis berdirinya perguruan tinggi, yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi terutama dalam mendukung program agropolitan dan sekaligus sebagai alat pemersatu budaya dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

## 2. Bidang Kesehatan

Prioritas pembangunan kesehatan pada periode ini diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, pengembangan puskesmas dan rumah sakit, peningkatan pengamatan yang terus menerus (*surveillans*) penyakit dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. Dengan program yang dilaksanakan meliputi (1) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan, (2) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, (3) Program penyehatan lingkungan, (4) Program upaya kesehatan masyarakat, (5) Program upaya kesehatan perorangan, (6) Program pencegahan dan pemberantasan penyakit, (7) Program perbaikan gizi masyarakat, (8) Program sumberdaya kesehatan, (9) Program obat dan perbekalan kesehatan, (10) Program pengawasan obat dan makanan, (11) Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, (12) Program pembangunan kemitraan dengan institusi lain, (13) Program *Hospital Marketing*, (14) Program kesehatan reproduksi, dan (15) Program yang memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB.

## 3. Bidang Keagamaan

Pembangunan di bidang keagamaan memprioritaskan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, dialog-dialog secara berkesinambungan untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa

dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda.

Selain itu untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara optimal, memfasilitasi lembaga-lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial dan menuju terciptanya Musi Rawas Darussalam yang religius. Sehingga sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, berkualitas pendidikan yang tinggi, santun dan beretika tinggi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Adapun program yang dilaksanakan pada periode 2005-2010 yaitu: (1) Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan; (2) Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; (3) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama; (4) Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan; (5) Program Penelitian dan Pengembangan Agama; dan (6) Program menuju Musi Rawas Darussalam melalui pembentukan TPA di setiap desa dan kelurahan, pemberian insentif bagi Guru Agama dan Guru Mengaji baik formal maupun informal di setiap kelompok pengajian (TPA/TKA), pemberian insentif bagi guru Pesantren, Madrasah, Pengurus Mesjid dan Mushollah, serta meningkatkan kapasitas para Alim Ulama di seluruh wilayah

#### 4. Bidang Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan di Musi Rawas diprioritaskan pada nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Musi Rawas. Selanjutnya langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, diawali dengan identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Musi Rawas.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi: (1) Mengembangkan nilai-nilai budaya daerah untuk memperkuat jati diri bangsa; (2) Memperkuat ikatan kebangsaan melalui pengelolaan keberagaman budaya; (3) Menyusun konsep pengelolaan industri budaya; (4) Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan; (5) Meningkatkan kualitas tenaga pengelola kebudayaan; (6) Meningkatkan pengelolaan pelestarian aset budaya, baik yang berupa nonbenda (*intangible*) maupun benda (*tangible*); (7) Menyusun strategi kebudayaan yang komprehensif dan aplikatif; (8) Meningkatkan apresiasi budaya dalam masyarakat melalui event-event festival dan forum diskusi budaya serta mempromosikan Musi Rawas Darussalam dalam kegiatan budaya; (9) Meningkatkan promosi kebudayaan; (10) Meningkatkan pemanfaatan media untuk pengembangan kebudayaan; (11) Meningkatkan kesadaran sejarah bangsa; dan (12) Pengembangan sistem informasi kebudayaan daerah.

#### 5. Bidang Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja. Program-program yang dilaksanakan pada bidang ketenagakerjaan adalah meliputi : (1) Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; (2)

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja menuju budaya kerja global; (3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

#### 6. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang kepemudaan di Musi Rawas diprioritaskan pada upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dalam mengisi pembangunan, mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, sedangkan pembangunan bidang olahraga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga yang berskala regional, nasional, serta melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi dari seluruh daerah di Musi Rawas. Selain olahraga prestasi, pengembangan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat menjadi prioritas pada RPJM Daerah tahap pertama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah dengan membangun sarana prasarana olahraga masyarakat di setiap wilayah dan di Ibukota Kabupaten.

#### 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan latihan, peningkatan pemahaman semua pihak tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, penguatan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, serta penyediaan data terpilah pada setiap aspek pembangunan.

#### 8. Bidang Sosial

Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan rincian program sebagai berikut: (1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; (2) Program pemberdayaan keluarga miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; (3) Program pengembangan sistem perlindungan sosial; (4) Program penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; (5) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; (6) Program peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial; (7) Program pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan rakyat; (8) Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial; (9) Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender; dan (10) Pemenuhan hak atas rasa aman.

#### 9. Bidang IPTEK

Prioritas pengembangan IPTEK diarahkan pada Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sehingga menjadi komoditi unggulan melalui penggalangan kerjasama antara lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sesuai kebutuhan pembangunan daerah, dengan program-programnya meliputi : (1) Program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Program pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) Program penguatan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.

#### 10. Bidang Industri dan Perdagangan

Pembangunan industri di Musi Rawas dilakukan melalui tahapan revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi yang ditandai dengan penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pendayagunaan potensi lokal,

penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar. Di samping itu, untuk peningkatan sistem perdagangan Musi Rawas melalui penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang, serta perintisan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Program bidang industri meliputi : (1) Program peningkatan kemampuan kelembagaan agroindustri; (2) Program peningkatan produksi dan daya saing agroindustri; (3) Program peningkatan pendapatan dan nilai tambah agroindustri; (4) Program peningkatan investasi dan promosi agroindustri daerah; (5) Program peningkatan keunggulan lokasi dengan membangun infrastruktur dasar di setiap kawasan agropolitan.

Pada bidang perdagangan dilaksanakan program pengembangan lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, pelaksanaan integrasi aktivitas perekonomian daerah dan nasional dalam pengembangan dan promosi penggunaan produksi dalam negeri, program peningkatan perdagangan antar kawasan, antar wilayah/daerah, dan terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau, mengembangkan komoditi dan jaringan perdagangan yang berorientasi ekspor, program peningkatan efisiensi dan daya saing produk melalui deregulasi dan menekan praktek-praktek ekonomi biaya tinggi di lapangan.

#### 11. Bidang Pertanian dan Perikanan

Pengembangan pertanian sebagai salah satu *core business* Musi Rawas ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan sub sistem agribisnis. Strategi penguatan sistem agribisnis Musi Rawas didasarkan kepada kondisi permasalahan faktual pada sistem agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan. Strategi penguatan sistem agribisnis Musi Rawas diharapkan dapat menghantarkan pertanian pada kondisi ideal sebagai salah satu *core business* Musi Rawas dan mampu mewujudkan masyarakat Musi Rawas sejahtera. Tahapan penguatan sistem agribisnis Musi Rawas disusun meliputi enam aspek penguatan antara lain (1) Penguatan sumber daya manusia; (2) Penguatan usaha; (3) Penguatan kondisi lingkungan; (4) Penguatan sarana dan prasarana; (5) Penguatan penelitian dan pengembangan agribisnis; (6) Penguatan koordinasi kelembagaan; (7) Pengembangan Agropolitan dan Kawasan Sentra Produksi dan perwilayahan komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan; (8) Program Pengembangan Sistem Usaha Tani/Pertanian terpadu dan pertanian organik; (9) Pengembangan sentra-sentra pembibitan/perbenihan bibit unggul untuk sentra perkebunan karet dan kelapa sawit, pangan dan hortikultura, sayur-sayuran, peternakan sapi dan kambing, ikan, nila, lele, dan gurami; (10) Program Pemantapan Sistem dan Usaha Agribisnis dan pengembangan kemitraan dengan mengembangkan komoditi bernilai tinggi dan peningkatan mutu, pengolahan hasil, pemasaran, serta pengembangan Agroindustri pedesaan; (11) Peningkatan kualitas SDM petani dan penyuluh; dan (12) Pengembangan sentra-sentra pembibitan/perbenihan bibit unggul untuk sentra perkebunan karet dan kelapa sawit, pangan dan hortikultura, sayur-sayuran, peternakan sapi dan kambing, ikan, nila, lele, dan gurami.

Pembangunan bisnis perikanan diarahkan pada pengembangan pusat pembibitan dan pelelangan ikan, pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat pengolah/pengrajin ikan tradisional, peningkatan fungsi pasar bibit ikan, pelestarian lingkungan sungai untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, pembuatan database pengembangan perikanan, pembuatan tata ruang wilayah DAS, penegakan hukum dan kebijakan, pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

keuangan dan permodalan, teknologi, produksi, pemasaran, pengembangan kemitraan dan kelembagaan pertanian, pengembangan sarana dan prasarana.

Program-program prioritas sektor pertanian antara lain : (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional; (2). Program Pengembangan Agribisnis, yang bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa pendukungnya; (3). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (4) Program Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan melalui program pengembangan dan peningkatan produktivitas peternaka dan perikanan berbasis keragaman sumber daya lokal, budidaya udang galah dan penggemukan sapi dengan teknologi tepat guna, pengembangan kawin suntik (IB) dan Hijauan Makan Ternak (HMT), diversifikasi usaha peternakan dan perikanan; (5) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas perkebunan dan pendapatan petani yang berusaha tani kebun; (6) Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dari sub sektor perkebunan, khususnya dalam penyediaan minyak nabati dan rempah; (7) Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan dan Kelembagaan Penyuluhan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur perkebunan dan memberdayakan masyarakat perkebunan; (8) Penguatan Kelembagaan Petani dan Tata Laksana Kelembagaan sosial dan ekonomi bidang pertanian untuk meningkatkan posisi tawar petani; dan (9) Memfasilitasi kegiatan pengembangan energi terbarukan seperti biofuel dan bioethanol berbahan baku komoditi pertanian seperti kelapa sawit, aren, jarak, ubi kayu dan sebagainya.

## 12. Bidang Kepariwisata

Adapun dalam rangka peningkatan citra Musi Rawas sebagai daerah kunjungan wisata, dilakukan upaya penataan objek dan daya tarik wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Musi Rawas, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based development*) serta peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata. Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi: (1) Memantapkan kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata daerah yang berwawasan lingkungan (*ecotourism*); (2) Menyusun *Grand Strategy* pengembangan objek pariwisata; (3) Memperluas diversifikasi dan meningkatkan daya saing daerah tujuan dan produk pariwisata melalui; pengembangan wisata domestik, revitalisasi program daerah sadar wisata; pengembangan wisata alam (arung jeram) dan wisata sungai; pengelolaan industri pariwisata yang ramah lingkungan; (4) Memantapkan strategi pemasaran pariwisata, termasuk pengembangan riset serta analisis pasar pariwisata; (5) Mengembangkan dan memantapkan promosi pariwisata di dalam maupun di luar negeri; (6) Mengembangkan dan memperkuat *data base* dan jaringan sistem informasi kepariwisataan; (7) Mengembangkan sekaligus memantapkan koordinasi dan jaringan kerja antar sektor, instansi, wilayah, daerah dan pelaku pariwisata; (8) Mengembangkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan di bidang pariwisata antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah; (9) Meningkatkan peran serta masyarakat dan UKM dalam pembangunan industri pariwisata; dan (10) Pengembangan dan pembangunan sarana & prasarana Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).

## 13. Bidang Koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dilakukan melalui tahap penyiapan pranata KUMKM melalui peningkatan kapasitas SDM KUMKM, perkuatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan

pelaksanaan implementasinya. Program-program pada bidang ini meliputi: (1) Program penciptaan iklim usaha bagi UMKM; (2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; (3) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; (4) Program pemberdayaan dan peningkatan usaha skala mikro; (5) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (6) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; (7) Program pengembangan ekonomi lokal; (8) Program pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan bagi angkatan kerja di perdesaan; (9) Program peningkatan akses koperasi, UMKM dan sektor informal lainnya terhadap sumber permodalan melalui penyederhanaan prosedur pengajuan kredit usaha di Bank dan jaminan memperoleh kredit tanpa agunan; (10) Program peningkatan kapasitas SDM KUMKM. Pada akhir periode ini diharapkan terbentuk 1.000 koperasi dalam berbagai bidang dan sektor.

#### 14. Bidang Investasi Daerah.

Pada tahap RPJMD I bidang investasi diarahkan pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal lokal dan asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Penyiapan prasarana dan sarana iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta promosi investasi khususnya di kawasan Agropolitan Distrik dan Agropolitan Center; (2) Program peningkatan kapasitas pembiayaan investasi, (3) Program peningkatan investasi daerah, (4) Menyusun regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan mempermudah masuknya investor, (5) Penyiapan daya saing investasi di berbagai bidang, (6) Menciptakan rasa aman dengan membangun harmonisasi masyarakat daerah dengan investor. Diharapkan dengan membangun iklim investasi yang kondusif diawal tahapan ini dapat menjadikan Musi Rawas sebagai daerah tujuan investasi di segala bidang.

#### 15. Bidang Pertambangan dan Energi.

Pada tahap ini penyiapan pranata dalam pengelolaan energi difokuskan pada penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya konservasi dan penghematan energi serta dimulainya pengembangan energi alternatif. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, energi matahari, arus sungai, dan tenaga angin. Sedangkan program prioritas dalam pengembangan energi di Musi Rawas meliputi : Program Pembangunan PLTU di Mulut Tambang dan Pengembangan Listrik Perdesaan, Program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan; Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan PLTMH. Hal ini dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu: (1) Memfasilitasi pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah melalui pengembangan pembangkit baru; (2) Pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik secara efisien, produktif, dan profesional, sehingga peran pemerintah daerah, khususnya untuk wilayah nonkomersial dapat berkembang; (3) Pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik baru yang berbasis batubara dan gas, mengedepankan energi terbarukan, khususnya bioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya; (4) Pengembangan sistem ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan (6) Memfasilitasi pembangunan jaringan pipanisasi BBM, kilang, depot, dan

terminal transit; (7) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi batubara dari lokasi pertambangan ke pelabuhan serta sarana dan prasarana distribusinya; serta (8) Pengembangan sarana dan prasarana energi alternatif terbarukan, terutama mikrohidro dan energi surya.

#### 16. Bidang Infrastruktur Wilayah

Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Pada tahap ini, arah pengembangannya adalah pada penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi : (1) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup lokal maupun regional; (2) Program pengurangan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik; meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; (3) Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, pembangunan jalan tembus ke seluruh wilayah, angkutan perdesaan, bandara, pelabuhan peti kemas dan jalur kereta api, waduk dan jaringan air baku, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan sanitasi serta perumahan secara merata di seluruh wilayah; (4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (5) Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan (6) Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Distrik Agropolitan.

Pembangunan infrastruktur wilayah pada tahap ini, ditandai dengan peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang, dan jasa, melalui penyelesaian dan pemantapan pembangunan beberapa jalan poros yang menghubungkan seluruh kawasan agropolitan dan kawasan perkotaan horizontal di seluruh wilayah Musi Rawas, pembangunan jalan lintas antar kota-kota yang dilaksanakan pada ruas Muara Rupit–Bingin Teluk, Simpang Semambang- Bts Ulu–Muara Enim, Simpang Nibung–Nibung–Batas Muba, Selangit Napal Melintang, Tugumulyo–Bamasco–Simpang Semambang, Pusat Pemerintahan–Durian Remuk, Megang Sakti–Karang Dapo, dan lain-lain. Berkenaan dengan penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur transportasi jalan, dilakukan tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan jalan tembus ke setiap kawasan.

#### 17. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program-program yang akan dikembangkan dalam periode ini antara lain: (1) Program Pemantapan dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi hutan secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan; (2) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas; (3) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral, Batubara, Air Tanah, Galian Golongan C; (4) Program Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam yang meliputi Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, perumusan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam; Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, legislatif dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam; Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan; Penyusunan tata ruang dan zonasi untuk perlindungan

sumber daya alam; (5) Program Rehabilitasi Pemulihan Sumberdaya Alam meliputi penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pinggiran sungai; Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana, dan prasarana rehabilitasi hutan, lahan, dan kawasan pinggiran sungai; (6) Peningkatan efektivitas reboisasi yang dilaksanakan secara terpadu; Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan TNKS, pinggiran sungai, bekas kawasan pertambangan, disertai pengembangan sistem manajemen pengelolaannya; (7) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan; (8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup; (9) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang meliputi Pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan terutama pada kawasan sungai padat pembangunan; (10) Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari sumber institusi (*point sources*) dan sumber non institusi (*non point sources*); (11) Penetapan regulasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) di Kabupaten Musi Rawas, penetapan pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum; dan (12) Pengkajian mendalam terhadap dampak perubahan iklim global dan upaya antisipasinya pada sektor-sektor prioritas daerah.

#### 18. Bidang Kependudukan

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana, sistem administrasi kependudukan dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Kabupaten. Program pada bidang kependudukan adalah sebagai berikut: (1) Program Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); (2) Program Keresasian Kebijakan Kependudukan; (3) Program Penataan Administrasi Kependudukan; (3) Program persebaran penduduk melalui Transmigrasi Lokal dan program pengembangan wilayah secara terpadu, sehingga daerah-daerah dengan potensi besar dapat berkembang secara optimal dan daerah-daerah konservasi harus di proteksi dan dibatasi dari pertambahan penduduknya.

#### 19. Bidang Politik, Hukum dan HAM

Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif serta membaiknya sistem perpolitikan di daerah.

Dalam bidang hukum dan HAM dilakukan upaya penataan hukum daerah serta penciptaan landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan program legislasi daerah.

#### 20. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban umum diarahkan pada upaya: (1) Mewujudkan rasa tentram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial; (2) Menurunnya angka kriminalitas; dan (3) Tercapainya prasyarat pembangunan.

#### 21. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Pembangunan Bidang Aparatur diarahkan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai, penguatan unit-unit pelayanan publik, pembentukan

Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan.

## 22. Bidang Keuangan Daerah

Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil.

## 23. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki.

Program Penataan Ruang Daerah Kabupaten Musi Rawas meliputi Penyusunan RTRW Kabupaten, RTR Kawasan Agropolitan Distrik & Agropolitan Center, dan RTR Kawasan strategis dan cepat tumbuh, RTR Kota-Kota Kecamatan dan lain-lain; Penerapan '*land use and growth management*' termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan penerapan '*zoning regulation*' secara tegas, adil dan demokratis; Peningkatan peran dan fungsi kota-kota kecamatan, termasuk kota baru supaya menjadi *self sustained city*, sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunaan sarana, prasarana, dan utilitas pada kota inti; Menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kawasan dengan RTRW Kabupaten termasuk dengan RTRW Provinsi dan RTRWN; Pelaksanaan legalisasi dan sosialisasi berbagai Rencana Tata Ruang; Penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penetapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta berbagai pedoman teknis daerah mengenai pelaksanaan Rencana Tata Ruang; Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan daerah untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor; Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi; Pemantapan koordinasi dan konsultasi antar lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang; Pembuatan Data Base Kabupaten Musi Rawas berbasis Peta Citra, *Quick Bird* dan Foto Udara serta GIS untuk perencanaan pembangunan; Memfasilitasi pemekaran wilayah kabupaten, pemekaran kecamatan dan desa serta peningkatan status beberapa desa menjadi kelurahan dan meningkatkan bagian wilayah desa dari dusun menjadi desa. Diperkirakan pada akhir periode ini, luas wilayah Kabupaten Musi Rawas akan menjadi setengahnya, karena terjadi Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan dan jumlah desa sebanyak 150 desa, sedangkan di Musi Rawas Induk akan terjadi pemekaran kecamatan menjadi 17 kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 200 desa dan kelurahan.

Sedangkan program Pengelolaan Pertanahan ditujukan untuk: (1) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten; (2) Memperkuat kelembagaan pertanahan di daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (3) Mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan (4) Melanjutkan

penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat; (5) Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform* serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah; (6) Menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*; dan (7) Penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.

## **B. RPJM DAERAH KEDUA (2011- 2015)**

RPJM Daerah kedua ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Musi Rawas. Pada tahapan ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 75 pada tahun 2015. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Bidang Pendidikan**

Selain meneruskan program-program pada periode RPJM Pertama, Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) melalui upaya Musi Rawas Bebas Putus Jenjang Sekolah (JB-BPJS) dan penuntasan penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pada jenjang pendidikan menengah difokuskan pada Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di sekolah-sekolah yang telah memenuhi syarat. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah.

APK (Angka Partisipasi Kasar) tingkat SD/MI sebesar 100%, tingkat SLTP sebesar 90%, tingkat SLTA sebesar 75%. Sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) tingkat SD/MI sebesar 90%, tingkat SLTP sebesar 80%, dan tingkat SLTA sebesar 50%.

Penanganan pendidikan dilaksanakan sejak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi melalui upaya peningkatan pemenuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara bertahap. Perhatian secara khusus akan dikembangkan fasilitas pendidikan di Kawasan Agropolitan Center dan Agropolitan Distrik dengan membangun Sekolah Unggulan Terpadu dan perhatian secara proporsional untuk pelaksanaan pendidikan yang memadai termasuk pelaksanaan pendidikan di daerah perdesaan, daerah perbatasan antar Kabupaten dan daerah terpencil. Selain itu dalam pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat masih tetap diprioritaskan, dengan target peningkatan rata-rata lama sekolah bagi seluruh masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal.

Selain itu Sekolah Berstandar Nasional/Internasional menjadi prioritas pada periode ini. Untuk pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai keunggulan lokal pertanian, Perikanan, industri dan pariwisata. Pembangunan sekolah kejuruan tidak

terlepas dari upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah SMK berbanding SMA menjadi 60:40. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal. Peningkatan kepedulian dari pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan terhadap pendidikan pertanian dan peningkatan budaya pertanian perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Pada tingkat pendidikan tinggi pada periode ini sudah mulai terjadi proses belajar mengajar di Universitas Musi Rawas, yang terdiri dari beberapa program unggulan yang dikaitkan dengan kebutuhan dan kompetensi pendidikan serta dunia kerja.

## 2. Bidang Kesehatan

Selain meneruskan program-program pada periode RPJM pertama, pada periode ini juga pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak, dengan harapan indeks kesehatan dapat meningkat untuk mencapai target IPM yang ditetapkan.

## 3. Bidang Keagamaan

Selain meneruskan program-program pada periode sebelumnya, fokus pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Prioritas lain dalam kurun waktu tersebut adalah upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Musi Rawas Darussalam yang religius dapat terwujud. Serta upaya optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat.

## 4. Bidang Kebudayaan

Dalam Pembangunan bidang kebudayaan disamping meneruskan program dan kegiatan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, pada periode ini diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Musi Rawas. Upaya yang dilakukan antara lain menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Musi Rawas terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan yang harmoni dan berbudaya tinggi.

Membangun Museum dan Galeri Daerah sebagai Pusat Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas; Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kampanye, lomba-lomba, pameran dan memasyarakatkan peran dan fungsi perpustakaan; Pelestarian dan pengembangan seni budaya; Penggalan dan pelestarian adat istiadat asli daerah dan hukum adat.

## 5. Bidang Ketenagakerjaan

Selain program-program yang merupakan Program-program lanjutan, pada periode ini program prioritas Pembangunan bidang ketenagakerjaan difokuskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

## 6. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang olahraga diprioritaskan pada persiapan pembangunan Stadion Utama Musi Rawas di Kawasan Sarana Olah Raga Muara Beliti sebagai pusat sarana dan prasarana olahraga yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas olahraga yang berskala nasional maupun internasional, serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong prestasi olahraga di Musi Rawas. Sedangkan untuk pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah. Adapun pembangunan bidang kepemudaan diupayakan melalui peningkatan kualitas generasi muda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.

## 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program pada periode sebelumnya terus dikembangkan dengan meningkatkan target-target yang akan dicapai, selanjutnya pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

## 8. Bidang Sosial

Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan dan keluarga; peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan peningkatan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

## 9. Bidang IPTEK

Pada tahap ini, bidang IPTEK diarahkan untuk pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi; pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkannya dalam mendukung peningkatan kualitas insani yang berdaya saing serta berbudaya ilmu (*science*) dan teknologi; perwujudan layanan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berbasis teknologi informasi (*cyber district*).

## 10. Bidang Industri dan Perdagangan

Bidang industri dan perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antar industri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Musi Rawas sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Musi Rawas serta berkembangnya pasar luar negeri dengan telah terbukanya jalur penerbangan dan beroperasinya Peti Kemas di Durian Remuk sebagai feeder bagi Tanjung Api-Api.

Pada sub sektor agroindustri, diharapkan telah berkembangnya industri hilir dari CPO, karet, bahan pangan lainnya seperti beras, hortikultura, dan produk-produk bahan olahan pangan lainnya dengan skala wilayah, baik dari subsektor

pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan, perkebunan maupun kehutanan.

Pada sisi suplai untuk pertanian diharapkan berkembangnya industri pemasok pertanian seperti industri pakan ikan, pakan ternak, industri pemasok perkebunan, dan berbagai industri sebagai pemasok yang dibutuhkan di daerah ini.

#### 11. Bidang Pertanian dan Perikanan

Pembangunan pertanian pada tahap RPJM kedua diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, serta peningkatan produktivitas pertanian. Dalam kaitannya dengan pengembangan agribisnis, upaya yang dilakukan adalah: (1) Penataan agribisnis yang ada dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang tepat guna menghasilkan produksi pertanian yang tinggi per hektar antara lain dengan menggunakan pendekatan SRI (*System of Rice Intensification*); (2) Perbaikan subsistem agribisnis; (3) Revitalisasi agribisnis; (4) Meningkatkan nilai tambah agribisnis dalam struktur perekonomian; dan (5) Realokasi sumber daya, pendanaan, dan pengembangan kawasan pertumbuhan agribisnis di perdesaan.

Strategi pengembangan bisnis perikanan Musi Rawas pada tahap kedua ini diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Kawasan Tugumulyo dan Irigasi Teknis Daerah Irigasi Lakitan, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha teknologi Perikanan tangkap, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir.

Adapun arahan pengelolaan zonasi untuk kawasan agropolitan perkebunan pada periode ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kawasan agropolitan perkebunan dilakukan sesuai kaidah teknis pengelolaan agropolitan
- b. Perkebunan atas milik rakyat tidak dapat diubah menjadi milik perusahaan, kecuali menjadi milik negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pengelolaan kawasan agropolitan seyogyanya didukung dengan prasarana dan sarana penunjang yang berakibat terhadap peningkatan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan
- d. Areal agropolitan yang berada pada kawasan potensial terkena bahaya alam, baik banjir, longsor dan lain-lain seyogyanya ditangani dengan pendekatan mitigasi termasuk mengalokasikan areal untuk lindung setempat
- e. Untuk areal perkebunan sawit tidak dapat ditambah (diperluas) areal tanamnya, kecuali tukar areal kebun dengan luas yang sama. Hal ini dapat dilakukan mengingat perlunya pemulihan tingkat kualitas/kesuburan tanah. Alih lahan hanya dapat dilakukan pada areal yang sesuai secara teknis dan hukum.
- f. Pihak pengelola/pemilik izin, setelah RTRW ini disahkan seyogyanya melakukan penyusunan ulang masterplan perkebunan dengan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang bersesuaian dengan UU Penataan Ruang 26/2007, khususnya terkait dengan kawasan lindung, seperti sempadan sungai, kawasan potensial terancam banjir, lahan dengan kemiringan diatas 40%, dll.
- g. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas lahan pihak swasta bersama pemerintah dan masyarakat setempat seyogyanya menyediakan

infrastruktur pendukung kegiatan agropolitan perkebunan secara efektif dan optimal.

- h. Perkebunan swasta dalam penataan kawasan perkebunan harus memperhitungkan dan mengalokasikan lahan untuk infrastruktur, permukiman pekerja/karyawan, pabrik (bila ada) dan fasilitas penunjang lainnya sebagai syarat minimal suatu agropolitan berbasis perkebunan swasta.

Arahan pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan pada periode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah ditetapkan secara definitif batasan areal/kawasan pertanian pangan, maka pada areal/lahan tersebut tidak diperkenankan menerbitkan IMB dan melaksanakan pembangunan bangunan.
- 2) Sawah irigasi teknis, sesuai dengan SE Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-1850/1994 dan No. 410-1851/1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian, dan SE/KBAPPENAS No. 5334/MK/9/1994 tentang Pelarangan Konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis Untuk Non Pertanian, tidak diperkenankan untuk dialih fungsikan, apalagi untuk bangunan, tetapi ditetapkan sebagai kawasan Sawah Abadi.
- 3) Bagi petani yang telah menggarap/mengolah sawah lebih dari 5 tahun sejak ditetapkannya Perda RTRW ini akan mendapat berbagai insentif seperti IMB untuk pembangunan rumah/toko diluar kawasan pertanian, beasiswa sekolah anak petani, keringanan pajak tanah dan bangunan.
- 4) Pengembangan kawasan agropolitan pertanian pangan harus mendapat dukungan pengadaan infrastruktur yang memadai dan penunjang lainnya seperti jalan produksi, mesin penggiling padi (*milling rice*), irigasi teknis, transportasi yang terjangkau, dan tempat pemasaran (terminal agribisnis).

## 12. Bidang Kepariwisata

Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Musi Rawas yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional, penciptaan daya saing daerah tujuan wisata yang ramah lingkungan, berkembangnya kegiatan *ecotourism* di berbagai lokasi tujuan wisata, serta meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis tourism.

## 13. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

Pembangunan KUMKM dilakukan melalui optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Musi Rawas. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan dalam lingkup nasional.

Program lanjutan lainnya dari periode sebelumnya adalah mengembangkan 1000 koperasi dalam berbagai bidang dan sektor, sehingga perekonomian masyarakat di daerah ini dapat maju berbasiskan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

#### 14. Bidang Investasi Daerah

Upaya peningkatan investasi yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.

#### 15. Bidang Pertambangan dan Energi

Semakin membaiknya pengelolaan energi, dicerminkan dengan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi, penyiapan desain dan rencana induk energi regional Musi Rawas dan rencana pengembangan desa mandiri energi, meningkatnya upaya efisiensi energi, meningkatnya upaya konservasi dan hemat energi, meningkatnya kemampuan pasokan energi, meningkatnya akses energi bagi masyarakat perdesaan serta memberdayakan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan. Meningkatnya penyediaan infrastruktur energi diantaranya dengan meningkatkan kemampuan pembangkit listrik tenaga air dengan perbaikan lingkungan sekitarnya, mendorong pengembangan energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin serta perluasan jaringan listrik perdesaan untuk tercapainya akses listrik di seluruh desa di Musi Rawas menuju Program Musi Rawas Benderang 2012.

#### 16. Bidang Infrastruktur Wilayah

Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur wilayah, diarahkan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengembangkan sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transport*) serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah. Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi jalan, pada tahap ini akan dikembangkan dan diimplementasikan kebijakan mekanisme pendanaan jalan melalui konsep *Road Fund* dan *Turn Key Project*.

Sedangkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah secara keseluruhan, pada tahap ini akan dikembangkan dan diimplementasikan konsep *Multi Years Project*, sebagai konsep pendanaan pembangunan infrastruktur dalam tahun jamak, termasuk penyiapan konsep kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis. Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api akan dikembangkan ruas Durian Remuk – Kota Padang sebagai pintu ke Kawasan Peti Kemas yang sekaligus menjadi pengumpan untuk pelabuhan Samudra di Tanjung Api-api.

Dalam hal pengembangan infrastruktur transportasi sungai, proses penyiapan pranatanya dilakukan melalui perencanaan dan persiapan pengembangan pelabuhan atau tambatan perahu di Muara Rupit, Surulangun dan Bingin Teluk serta Muara Lakitan sebagai pelabuhan pengumpan untuk Palembang. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, proses penyiapan pranata dilakukan melalui perencanaan dan persiapan pembangunan Bandar Udara Silampari yang berada di dalam Kota Lubuk Lainggau yang akan melayani rute Lubuk Lainggau–Palembang–Jakarta. Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, dilakukan melalui pembangunan waduk-waduk strategis, pengendalian bencana banjir dan kekeringan, serta peningkatan layanan jaringan irigasi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini dalam rangka pembangunan waduk strategis antara lain penyelesaian pembangunan Bendungan Irigasi Lakitan di Selangit; perencanaan dan persiapan pembangunan Daerah Irigasi Air Rawas; perencanaan, persiapan dan pembangunan Daerah Irigasi Air Musi dan pengembangan daerah irigasi strategis lainnya. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi yang ditandai dengan peningkatan cakupan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, pengembangan konsep *Musi Rawas Cyber District*, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah di kawasan kecamatan dan agropolitan serta di kawasan perdesaan . Pada tahap ini diharapkan wilayah perdesaan telah dilayani oleh fasilitas air bersih sebesar 75% dari seluruh desa dan kelurahan, membaiknya fasilitas lingkungan perumahan dan permukiman, sistem drainase di seluruh perdesaan dan perkotaan berfungsi dengan sangat baik, dan sistem persampahan telah diolah secara terpadu.

#### 17. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta semakin tumbuhnya perilaku ramah lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, berkembangnya kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, kecukupan air baku, kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai.

Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R (*reduce, reuse, recycle*), meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan kritis dan rusak, air permukaan, air tanah, tercapainya kawasan lindung sebesar 35% dari luas Musi Rawas, serta meningkatnya penegakan hukum lingkungan. Melakukan penataan lingkungan kawasan DAS dan Sub DAS yang terintegrasi dengan kawasan daratan.

Semakin meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana. Upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah diarahkan melalui integrasi aspek lingkungan dalam kegiatan sektoral, pendidikan lingkungan dan membangun sinergitas antar daerah serta pemangku kepentingan dalam rangka memulai upaya mewujudkan Musi Rawas sebagai Kabupaten Konservasi (*Conservation District*) atau *Eco-District*.

#### 18. Bidang Kependudukan

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Kabupaten. Serta mulai menerapkan kebijakan satu anak untuk satu keluarga dan usia perkawinan pertama bagi wanita adalah 25 tahun.

#### 19. Bidang Politik, Hukum dan HAM

Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada fasilitasi pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (*civil society*), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penataan hubungan eksekutif dan legislatif, penyusunan rencana induk daerah otonom, penataan daerah otonom serta pengembangan kerjasama dengan institusi Kabupaten Musi Rawas dengan institusi lainnya.

Pembangunan bidang hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum serta pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Selain itu dalam penegakan HAM perlu pentaan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara dengan terwujudnya rasa aman dan damai.

#### 20. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.

#### 21. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada pemantapan organisasi perangkat daerah, pemantapan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan sebagai bagian dari perwujudan *Musi Rawas Cyber District*, Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien menuju pelayanan yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan iklim pemerintahan yang kondusif bagi kalangan internal maupun eksternal khususnya dunia usaha/investor akan dikembangkan upaya terobosan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa baik secara manual maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); serta melalui peningkatan fungsi Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTS). Disamping itu guna meningkatkan kualitas pembangunan Musi Rawas dalam perspektif pelibatan masyarakat secara menyeluruh dibutuhkan perhatian khusus secara melembaga pada aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, pemberdayaan perempuan dan pengembangan olah raga.

#### 22. Bidang Keuangan Daerah

Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil, serta peningkatan pendayagunaan aset-aset daerah dan BUMD serta persiapan pemanfaatan Obligasi Daerah. Selain itu, diupayakan penggalangan sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dilakukan dengan mengembangkan opsi kolateral dan pembelian saham BUMD yang maju.

#### 23. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara dan mekarnya sebagian wilayah desa, kelurahan dan kecamatan, maka kebijakan tata ruang

kabupaten Musi Rawas akan direvisi kembali, meskipun beberapa kawasan tidak mengalami perubahan. Namun seiring dengan perkembangan pembangunan penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan yang berdasarkan rencana tata ruang di setiap kawasan, serta berjalannya fungsi pengendalian tata ruang dan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang, kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan penyiapan petunjuk pelaksanaan RTRW Musi Rawas dan rencana tata ruang yang lebih rinci. Hal tersebut diikuti dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antar kawasan. Perwujudan Struktur Ruang Musi Rawas ditandai dengan mulai terbentuknya Sistem Kota-Kota yang dicapai melalui Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Muara Beliti, Berkembangnya Kawasan kota-kota Orde 2 dan Kawasan Agropolitan Distrik yang berada dalam Sistem Kawasan Perkotaan di Musi Rawas, dan Pengembangan kerjasama dengan wilayah-wilayah perbatasan.

Selain itu, dilakukan persiapan dalam Pengembangan/Peningkatan Fungsi Pusat-pusat pelayanan perkotaan di wilayah seperti ibukota kecamatan. Perwujudan Pola Ruang Musi Rawas ditandai dengan peningkatan fungsi dan luasan menuju capaian 35% Kawasan Lindung, yang di antaranya merupakan Taman Nasional (TN) Kerinci Seblat dan Kawasan Lindung Bukit Cogong, serta kawasan berfungsi lindung lainnya seperti DAS dan Sub-DAS, serta menuju penetapan lahan sawah abadi dalam rangka ketahanan pangan yang terletak di Kecamatan Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Megang Sakti dan Sumberharta.

Perwujudan Struktur dan Pola Ruang tersebut juga didukung melalui langkah persiapan dalam Pengembangan Kawasan Andalan di Agroploitan Distrik, Kawasan Andalan Peti Kemas, Kawasan Andalan Pertambangan, serta memfasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Musi Rawas yang meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci dan Ibukota Kabupaten Muara Beliti dan Agropolitan Centre, Kawasan Andalan Pertambangan Migas dan Batubara.

Pengembangan wilayah Musi Rawas mulai diarahkan pada persiapan pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan andalan dan cepat tumbuh kabupaten untuk mencapai optimasi pemanfaatan ruang khususnya dalam penyediaan ruang-ruang investasi. Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana disebutkan di atas perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur data spasial yang operasional dan terintegrasi dengan jaringan data spasial nasional.

### **C. RPJM DAERAH KETIGA (2016-2020)**

RPJM Daerah ketiga ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Musi Rawas dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Musi Rawas terhadap pembangunan nasional.

Pada tahapan ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi (IPM = 75) diproyeksikan terwujud pada tahun 2015, dan di akhir tahapan akan terwujud IPM sebesar 80. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Bidang Pendidikan**

Sasaran utama bidang pendidikan yaitu penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan bagi masyarakat se-Musi Rawas pada periode sebelumnya dan merintis. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka

mendukung akselerasi tersebut yaitu tuntasnya penanganan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui pembangunan unit sekolah baru (USB), rehabilitasi dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

APK (Angka Partisipasi Kasar) tingkat SD/MI sebesar 110%, tingkat SLTP sebesar 95%, tingkat SLTA sebesar 85%. Sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) tingkat SD/MI sebesar 95%, tingkat SLTP sebesar 85%, dan tingkat SLTA sebesar 70%.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih merupakan sasaran prioritas pada periode ini, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal. Pada periode ini juga dilakukan upaya peningkatan pendidikan keterampilan dan penguasaan multi media bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan melalui bantuan sarana dan prasarana serta tenaga terdidik sebagai fasilitator pendidikan keterampilan di perdesaan.

Adapun upaya dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, dilakukan melalui peningkatan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi yang diprioritaskan pada peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, serta implementasi hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dalam pembangunan.

## 2. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diupayakan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta meningkatkan program-program yang telah dijalankan pada periode sebelumnya.

## 3. Bidang Keagamaan

Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Musi Rawas memprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara. Pada masa ini diharapkan telah tampak indentitas Kabupaten Musi Rawas yang religius dengan berkembangnya program Musi Rawas Darussalam.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan merevitalisasi dan mengevaluasi peran dan fungsi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.

Selain itu dilakukan upaya untuk meng-implementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara, agar penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh nilai-nilai agama.

## 4. Bidang Kebudayaan

Perhatian di bidang kebudayaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Musi Rawas serta modal sosial yang sudah berkembang dapat ditingkatkan lagi. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan

kebudayaan tersebut, antara lain dengan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Bidang Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial diharapkan dapat menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja serta berkembangnya jaringan peluang kerja di manca negara dengan meningkatnya daya saing tenaga kerja dari Kabupaten Musi Rawas.

6. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kabupaten Musi Rawas sebagai Kabupaten yang mampu berprestasi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada event olahraga nasional. Selain itu dalam rangka meningkatkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

8. Bidang Sosial

Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

9. Bidang IPTEK

Bidang IPTEK diarahkan pada peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian internasional dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, persiapan Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat pengembangan SDM dan sarana prasarana IPTEK secara nasional, serta perluasan perwujudan Kabupaten berbasis teknologi informasi pada setiap wilayah kecamatan, kelurahan dan desa serta berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang kehidupan di Kabupaten Musi Rawas.

10. Bidang Industri dan Perdagangan

Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan

distribusi barang, pemberdayaan produk-produk daerah dan pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta berkembangnya jaringan pasar internasional.

Produk agroindustri tidak hanya melayani pasar lokal dan domestik, tetapi sudah mempunyai daya saing global dengan meningkatnya kualitas dan diversifikasi produksi barang yang dihasilkan. Sedangkan pada produk pangan olahan, diharapkan Kabupaten Musi Rawas dapat menjadi pemasok utama mulai dari produk hilir padi-padian, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan.

#### 11. Bidang Pertanian dan Perikanan

Pada bidang pertanian diarahkan pada pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir, setelah diperolehnya komitmen terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Musi Rawas. Pemantapan mutu merupakan komitmen Kabupaten Musi Rawas untuk merespons setiap tuntutan konsumen, terutama terhadap mutu, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelestarian dan isu-isu lingkungan lainnya. Pada tahap ini diperlukan: (1) Pengelolaan kualitas rantai produksi (*supply chain management*) yang efektif dan efisien; (2) Budaya mutu dan merk; (3) Sertifikasi dan standisasi produk; (4) Respons terhadap upaya mencapai kepuasan konsumen; (5) Kelembagaan penunjang yang efisien; dan (6) Pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir.

Strategi pengembangan bisnis perikanan Kabupaten Musi Rawas pada tahap ketiga diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial di perairan umum dan perikanan air tawar, kolam air deras dan kolam air tenang, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan teknologi perikanan umum, pengembangan usaha pembuatan pakan ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan jejaring usaha perikanan, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, penguatan pasar untuk industri hilir, pengembangan usaha permodalan, serta pengembangan usaha informasi perikanan.

#### 12. Bidang Kepariwisata

Pengembangan pariwisata diarahkan pada penciptaan destinasi wisata Musi Rawas, dimana persaingan dalam kepariwisataan yang semakin tajam, menuntut setiap wilayah untuk terus menggali potensi sumber daya agar berdaya jual, diminati dan dikunjungi wisatawan, termasuk promosi kembali untuk turis internasional agar kembali datang ke Kabupaten Musi Rawas khususnya di kawasan TNKS.

#### 13. Bidang Koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

Pengembangan KUMKM di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Musi Rawas dan memiliki daya saing untuk memenangkan kompetisi dalam konteks regional Provinsi Sumatera selatan dan bahkan nasional.

#### 14. Bidang Investasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pada tahap ini diupayakan pada (1) Peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi; (2) Memperluas kerjasama investasi dengan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia dan negara-negara lain.

#### 15. Bidang Pertambangan dan Energi

Dalam upaya kemandirian energi regional, maka pada tahap ketiga, diharapkan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi yang diupayakan dapat mendorong kehandalan pasokan energi, terciptanya desa mandiri energi serta mencari cadangan-cadangan energi tidak terbarukan dengan semakin meningkatnya efisiensi energi, serta dapat memantapkan konservasi dan penghematan energi, pengembangan infrastruktur energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi, mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, mengembangkan energi alternatif lainnya dan sumber daya panas bumi, bio fuel, bio gas, mikrohidro, surya, angin dan arus sungai.

#### 16. Bidang Infrastruktur Wilayah

Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang produktif dan memiliki daya saing.

Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan berkembangnya sistem transportasi yang sangat baik antar wilayah dan kawasan; terbangunnya jaringan transportasi dari dan ke kawasan-kawasan andalan seperti kawasan Peti Kemas, Kawasan Agropolitan, Kawasan Tambang Batubara; meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan; optimalnya pengendalian banjir dan kekeringan; optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi; meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta meningkatnya penyediaan rumah susun bagi masyarakat perkotaan.

Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kuantitas kemandirian infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, melalui penyelesaian persiapan pembangunan jalan dan jemabatan yang menghubungkan setiap kawasan dan fasilitasi pembangunan sistem transportasi lintas Sumatera dan Jaringan Kereta Nasional, serta penyelesaian persiapan pembangunan jalan lintas antar kawasan di bagian selatan dan jalan dalam kota pada ruas tengah Kabupaten Musi Rawas dan pembangunan jalan tol dalam kota pada ruas Muara Beliti – Peti Kemas dan Muara Rupit – Lubuk Linggau.

Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api dilakukan melalui penyelesaian persiapan dan permulaan pembangunan jaingan Kereta Api ruas Bingin Teluk – Muara Beliti sebagai pengangkutan Kereta Api Baktubara. Pengembangan infrastruktur transportasi sungai , dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Sungai di Muara Rupit, Sorolangun, Bingin Teluk, Muara Lakitan. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan melalui optimalisasi pengangkutan udara dengan membuka jalur penerbangan Musi Rawas – Palembang – Singapore – Kuala Lumpur, untuk membuka jalur internasional sebagai gerbang investasi.

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan melalui persiapan dan pembangunan tahap awal Waduk Irigasi Air Rawas, Irigasi Air Musi dan revitalisasi Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo, penyelesaian tahap akhir prasarana irigasi Air lakitan. Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui

penyelesaian pembangunan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, penerapan konsep *Musi Rawas Cyber District*, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan perumahan sehat di kawasan perdesaan.

#### 17. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan Kabupaten Musi Rawas yang mantap atau sebagai *eco-district* dicerminkan oleh proses penataan ruang Kabupaten Musi Rawas yang mampu mewadahi jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan wilayah-wilayah, secara seimbang sesuai daya tampungnya, meningkatnya potensi sumberdaya alam dan membaiknya infrastruktur alam serta fungsi lingkungan hidup, terutama dari ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, lahan subur dan produktif, kualitas udara dan ekosistem DAS yang lebih baik, terwujudnya optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar serasi dengan daya dukung lingkungan. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal. Sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal, serta sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang semakin lengkap dan memadai.

Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan, menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, semakin efektifnya upaya konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai dan cekungan air bawah tanah. Terciptanya sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang handal, pengelolaan DAS dan kawasan perlindungan setempat secara terpadu, dan tetap dipertahankannya luasan 30% kawasan lindung dari luas Kabupaten Musi Rawas.

Peningkatan efisiensi, efektivitas dari nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup tetap menjadi prioritas untuk menjaga daya dukung lingkungan yang memadai bagi proses pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Sistem pemantauan dan penilaian lingkungan semakin dimantapkan dalam rangka perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) kualitas lingkungan.

Dalam masa periode ini perwujudan pemanfaatan ruang kawasan lindung merupakan upaya mewujudkan pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana yang telah direncanakan, dimana langkah kegiatannya dapat berupa mempertahankan yang sudah ada, alih fungsi lahan sesuai peruntukannya ataupun memberikan fungsi lindung pada kawasan budidaya (misalnya hutan produksi atau perkebunan yang diberi fungsi lindung).

Dalam rangka perwujudan kawasan lindung diperlukan pengelolaan yang berdasarkan pada pertimbangan semua aspek yang terkait dengan tata ruang. Berdasarkan kajian dan hasil perumusan dialog beserta seluruh komponen pembangunan dan atau stakeholders, maka tahapan pencapaian Kawasan Lindung adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan lindung yang diprioritaskan perwujudannya adalah kawasan lindung yang berdekatan dan atau berbatasan dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perkotaan.
- b. Perwujudan kawasan lindung dengan target pelaksanaan meliputi;
  - 1). Lima tahun pertama dengan proporsi target pencapaian adalah 25% dari rencana perwujudan kawasan lindung.

- 2). Lima tahun kedua dengan proporsi target pencapaian adalah 25% dari rencana perwujudan kawasan lindung.
- 3). Demikian selanjutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat dan pihak swasta, khususnya pengelola perkebunan yang lahannya berada pada kawasan berpotensi dilanda bahaya banjir.
- c. Kawasan lindung dengan tipologi, (a) kawasan yang berpotensi dan atau memiliki kekhasan alam maka dipertahankan keberadaannya, (b) kawasan lindung tersebut meliputi;
  - 1). Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
  - 2). Kawasan Rawan Bencana
- d. Kawasan lindung dengan tipologi, a) pelaksanaan perwujudan relatif mudah; b) Biaya perwujudan relatif kecil; dan c) merupakan kawasan prioritas perlindungan, karena memiliki fungsi perlindungan strategis terhadap kualitas dan kuantitas air maupun bencana alam seperti banjir, erosi, pendangkalan sungai, dll, maka pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada lima tahun pertama.
- e. Kawasan lindung yang terlingkup pada tipologi diatas meliputi;
  - 1) Hutan Produksi yang diberi Fungsi Lindung
  - 2) Sempadan Sungai
  - 3) Kawasan Sekitar Danau/Bendungan
  - 4) Kawasan Sekitar Mata Air
- f. Kawasan lindung yang memiliki tipologi, a) relatif sulit perwujudannya karena wilayah konflik; b) memiliki nilai ekonomis.
- g. Maka perwujudan kawasan lindung dilakukan secara bertahap dan proporsional hingga akhir tahun perencanaan 2028:
  - 1) Kawasan Hutan Lindung
  - 2) Kawasan Konservasi dan Resapan Air
  - 3) Kawasan Ruang Terbuka dan Hutan Kota
  - 4) Kawasan yang diberi Fungsi Lindung
    - a). Perkebunan, dengan ketinggian lahan > 500 mdpl.
    - b). Lahan Kering, dengan ketinggian lahan > 500 mdpl

#### 18. Bidang Kependudukan

Pada periode ini, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta penyelenggaraan program transmigrasi lokal.

#### 19. Bidang Politik, Bidang Hukum dan HAM

Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (*civil society*). Pada tahapan ini pula dilakukan upaya perluasan akses partisipasi publik, penataan daerah otonom di Kabupaten Musi Rawas serta pemantapan kerjasama dengan institusi di Kabupaten Musi Rawas dengan institusi lainnya.

Pembangunan Bidang Hukum diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi

manusia (HAM). Pada tahap ini pula selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juga dilakukan pula perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

#### 20. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan Bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.

#### 21. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan.

#### 22. Bidang Keuangan Daerah

Pembangunan bidang keuangan daerah, disamping tetap melanjutkan upaya-upaya yang telah ditempuh pada RPJM Daerah tahap kedua, juga diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah, optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah, penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah.

#### 23. Bidang Tata Ruang dan Pengolahan Pertanahan

Perkembangan wilayah di Kabupaten Musi Rawas semakin baik yang ditunjukkan dengan berkembangnya permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang dan mantapnya sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang. Proporsi Kawasan lindung sebesar 30% dan Kawasan Budidaya sebesar 70% termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten.

Pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah disiapkan pranatanya, termasuk dalam pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya, sebagai kawasan strategis Kabupaten. Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir (selalu terbaharui) serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial.

Pada periode ini pembangunan dapat dilaksanakan dengan mantap dan terintegrasi secara baik, meskipun secara luasan, wilayah Kabupaten Musi Rawas sudah terbagi menjadi dua wilayah kabupaten.

### **D. RPJM DAERAH KEEMPAT (2021-2025)**

RPJM Daerah keempat ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat Kabupaten Musi Rawas dalam segala bidang dalam konteks pembangunan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Musi Rawas memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain

dan pembangunan Kabupaten Musi Rawas relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Kabupaten Musi Rawas terhadap pembangunan regional dan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain. Pada akhir tahapan ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan diatas 80. Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan keempat ini adalah :

#### 1. Bidang Pendidikan

Perhatian bidang pendidikan pada periode 2021-2025 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0 – 6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.

APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD sebesar 70%, tingkat SD/MI sebesar 115%, tingkat SLTP sebesar 100%, tingkat SLTA sebesar 95%. Sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD sebesar 65%, tingkat SD/MI sebesar 100%, tingkat SLTP sebesar 95%, dan tingkat SLTA sebesar 85%.

Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.

Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh. Sedangkan upaya pemerintah Kabupaten dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada pengembangan Universitas Musi Rawas di Muara Beliti dan mendukung pendanaan bagi mahasiswa asal Kabupaten Musi Rawas yang meneruskan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

Selain itu dilakukan pemantapan pembangunan di bidang pendidikan yang diawali dengan rintisan Program Wajib Belajar Lima Belas Tahun pada periode sebelumnya, pada periode ini dicanangkan untuk dilakukan di seluruh wilayah kabupaten Musi Rawas. Upaya - upaya yang terus dilakukan dalam rangka pencanangan tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan tinggi melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi dari setiap kecamatan di Musi Rawas. Selain itu mantapnya pengembangan lembaga pendidikan tinggi di daerah yang berbasis keunggulan daerah dan berelevansi terhadap kebutuhan kerja.

#### 2. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diupayakan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan, selain itu dilaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

### 3. Bidang Keagamaan

Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Musi Rawas diprioritaskan pada peningkatan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan sehingga cita-cita Musi Rawas Darussalam dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga Musi Rawas Darussalam dan religius dapat benar-benar terwujud.

### 4. Bidang Kebudayaan

Perhatian di bidang kebudayaan di Kabupaten Musi Rawas diprioritaskan pada penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Musi Rawas serta pada upaya pemantapan Ketahanan Budaya Kabupaten Musi Rawas dalam kehidupan global. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Musi Rawas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Kabupaten Musi Rawas dalam pergaulan masyarakat berskala regional, nasional maupun internasional.

### 5. Bidang Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan. Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial dapat menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

### 6. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Adapun pembangunan olahraga diarahkan untuk mempertahankan keunggulan olahraga Kabupaten Musi Rawas di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

### 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat

dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

#### 8. Bidang Sosial

Selain meneruskan program pada tahap sebelumnya dengan tetap meningkatkan target untuk periode ini, maka diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### 9. Bidang IPTEK

Pembangunan bidang IPTEK selain meneruskan dan memantapkan program pada tahap sebelumnya juga diarahkan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Selain itu Pembangunan bidang IPTEK diarahkan untuk dapat mempertahankan dan terus mengembangkan inovasi IPTEK serta pemantapan kabupaten berbasis teknologi informasi sebagai rujukan nasional. Kabupaten Musi Rawas telah mencapai *Musi Rawas Cyber District*.

#### 10. Bidang Industri dan Perdagangan

Bidang industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perluasan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar. Pada bidang industri juga diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbaharukan, serta penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan antar industri.

Adapun pada sektor perdagangan, diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri.

#### 11. Bidang Pertanian dan Perikanan

Pada tahap ini, pengembangan pertanian Kabupaten Musi Rawas harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem pertanian. Untuk itu diperlukan: (1) Perusahaan induk (*Holding Company*) dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional; (2) Kolaborasi bisnis di tingkat Musi Rawas dan Kabupaten lain; dan (3) Relasi bisnis di pasar internasional. Pada tahap ini pertanian Kabupaten Musi Rawas sudah berkembang menembus batas-batas wilayah Kabupaten dan negara. Konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global akan semakin kuat. Untuk itu diperlukan: (1) Penguatan keunggulan kompetitif; (2) Terpenuhinya konsumsi Kabupaten Musi Rawas dan domestik; (3) Tingginya daya terima pasar internasional; dan (4) Nilai tambah ekspor yang tinggi. Kegiatan pertanian pada tahap ini dicirikan dengan komitmen yang tinggi terhadap tujuan memenangkan keunggulan kompetitif di pasar global, dengan ciri bisnis yang berorientasi pada efisiensi, kualitas, keamanan dan keberlanjutan.

Selama tahapan sebelumnya dapat dilalui dengan baik, maka pada tahap pengembangan selanjutnya diharapkan terlaksana dengan baik. Strategi pengembangan bisnis Perikanan Musi Rawas pada tahap keempat diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Kawasan DAS, pengembangan perikanan air tenang dan kolam air deras, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan pabrik pakan ikan dan pakan ternak,

pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi perikanan, pengembangan budaya perikanan sungai, pengembangan desa-desa pinggir sungai (*water front towns*), pengembangan wisata perikanan dan pengembangan usaha eko-konservasi.

## 12. Bidang Kepariwisata

Pada bidang pariwisata, pembangunan lebih diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Musi Rawas, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata. Program promosi ke berbagai negara maju tentang objek *eco-tourism*, khususnya di kawasan TNKS dan destinasi-destinasi wisata lainnya. Selain itu pada tahapan ini, pariwisata diarahkan untuk keberlanjutan pariwisata yaitu melalui pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan baik sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata Musi Rawas. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dukungan spesifik daerah.

## 13. Bidang Koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

Pada tahapan ini, pengembangan KUMKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan internasional.

## 14. Bidang Investasi Daerah

Pembangunan investasi daerah diarahkan pada pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi serta jaringan global.

## 15. Bidang Pertambangan dan Energi

Semakin mantapnya kemandirian energi pada tahap ini diharapkan dapat tercapai dengan mantapnya desa mandiri energi, mantapnya infrastruktur energi, terwujudnya kehandalan pasokan energi, tingkat efisiensi pendayagunaan energi semakin baik, masa pemeliharaan pasokan energi, mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi, meningkatnya pengembangan energi alternatif, meningkatnya investasi swasta dalam pengembangan energi alternatif, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan energi, terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas.

## 16. Bidang Infrastruktur Wilayah

Arah pengembangan infrastruktur wilayah pada tahap ini adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai oleh mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem transportasi massal ke seluruh wilayah termasuk perkotaan (*Mass Rapid Transport*), terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan (rumah tangga, industri, komersial, dan lain-lain), handalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih

dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah susun bagi masyarakat perkotaan.

Pemantapan pengelolaan infrastruktur transportasi jalan ditandai dengan peningkatan kualitas dan kemandirian infrastruktur yang telah ada serta penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, melalui penyelesaian pembangunan berbagai ruas jalan kabupaten yang menghubungkan seluruh kawasan. Selain itu dilakukan pula pembangunan jalan arteri yang menghubungkan kawasan Peti Kemas dengan kawasan penghasil perkebunan. Adapun pada pemantapan pengelolaan infrastruktur transportasi sungai, dilakukan melalui penyelesaian pengembangan Pelabuhan Sungai sebagai alternatif untuk angkutan ekspor dalam jumlah besar dengan melalui alur Sungai Musi dan Sungai Rawas untuk menuju pelabuhan Samudra di Palembang dan Tanjung Api-api.

Dalam hal pengembangan transportasi jalan kereta api, dilakukan melalui penyelesaian pembangunan rel *double track* dari dan ke Kawasan Pertambangan Batubara menuju kawasan Peti Kemas dan fasilitasi pembangunan jalur kereta api Peti Kemas Durian Remuk – Kota Padang seterusnya menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Kota Palembang. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan melalui pengembangan promosi dan pemantapan pengangkutan rute-rute domestik dan rute internasional untuk pengangkutan cargo udara untuk berbagai komoditi.

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan melalui revitalisasi sarana dan prasarana irigasi strategis serta penyelesaian pembangunan daerah irigasi strategis lainnya. Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui pelaksanaan konsep Desa Punya Internet (Desa Pinter) tahun 2020, pelaksanaan konsep *Musi Rawas Cyber District*, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah di perkotaan.

#### 17. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan Musi Rawas, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.

Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui, membudayanya perilaku ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem pemantauan, penilaian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan terutama semakin membaiknya status mutu sungai-sungai dan waduk serta danau-danau, fungsi kawasan lindung, kondisi cekungan air bawah tanah, kualitas udara perkotaan, kondisi lahan bekas penambangan, bekas tempat pembuangan sampah, serta kualitas lahan pertanian dan perkebunan. Bertambahnya potensi dan cadangan sumberdaya alam dan terciptanya diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang ramah lingkungan. Menguatnya ketahanan masyarakat di kawasan resiko bencana, serta tertatanya kawasan rawan bencana.

#### 18. Bidang Kependudukan

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan

persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, dan lebih memantapkan lagi program transmigrasi.

19. Bidang Politik, Hukum dan HAM

Bidang politik diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Musi Rawas serta penguatan kerjasama antar institusi. Pada bidang hukum diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, perwujudan harmonisasi produk hukum, pemantapan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

20. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

21. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Bidang aparatur diarahkan pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta mengembangkan budaya organisasi. Selain itu, dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayanan publik diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel dibidang pajak daerah dan retribusi.

22. Bidang Keuangan Daerah

Pembangunan bidang keuangan daerah akan terus diarahkan pada pemantapan upaya-upaya yang telah dilakukan pada RPJM sebelumnya dan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

23. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Musi Rawas semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya, tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Musi Rawas. Melalui koordinasi penataan ruang pelaksanaan kegiatan pembangunan di Musi Rawas telah sesuai dengan rencana tata ruang dan keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud. Hal ini ditandai dengan terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung, dan terjaminnya lahan untuk sawah, serta optimalnya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Infrastruktur data spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

Seluruh masyarakat Musi Rawas telah menikmati sarana dan prasarana baik layanan dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dilaksanakan

melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua kawasan didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pengertian secara umum Rencana Jangka Panjang (RPJP) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun (2005-2025). Menurut skalanya, RPJP merupakan perencanaan tingkat makro daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama seluruh *stakeholders* dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Mengingat begitu pentingnya RPJP sebagai dokumen yang memberikan arah harus kemana pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dilakukan, maka RPJP seharusnya merupakan hasil pemikiran yang menampung partisipasi dari semua pihak (*stakeholders*) di Kabupaten Musi Rawas ini.

Selanjutnya dokumen RPJP secara teknis menjadi pedoman dalam rangka menyusun pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam skala waktu lima tahunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJP Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Seluruh komponen masyarakat dunia usaha dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjabarkan RPJP ke dalam kerangka program yang lebih rinci pada dokumen RPJM Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020, dan 2020-2025 dengan sebaik-baiknya;
- b. Apabila terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJP ini ditetapkan, baik yang memperlambat ataupun mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 20 tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kecuali hanya dapat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.
- c. Setiap awal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah patut menjadikan RPJP ini sebagai landasan dasar pembangunan secara simultan Kabupaten Musi Rawas.

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**

